

Buruh MIGRAN

Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN

MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN

Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA
yang Bekerja di MALAYSIA

Diterbitkan oleh:

KOMNAS Perempuan

2006

Dengan Dukungan:

Ford Foundation

Dokumen ini merupakan hasil penelitian
KOMNAS Perempuan

bekerjasama dengan:
FOBMI, SBMI Jawa Timur, PPK Mataram, LPP Bone,
dan LBH Apik Pontianak.

Maret, 2005

Daftar Isi

- 4 Pengantar
- 5 Bab I .Pendahuluan
- 11 Bab II. Lima Pengalaman Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia
- 44 Bab III. Dinamika Mempertahankan Kehidupan dalam Migrasi tak berdokumen: Mereka mengais peluang untuk mendapatkan pendapatan layak di luar negeri.
- 63 Bab IV. Pengalaman Dideportasi: Tambahan Himpitan dan pelanggaran HAM
- 69 Bab V. Kebijakan dan Peraturan yang Tersedia
- 73 Bab VI. Kesimpulan dan Rekomendasi
- 79 Lampiran-lampiran
- 79 Metodologi Studi

Pengantar

Dalam rangka berpartisipasi menciptakan iklim dan membangun sistem perlindungan hak asasi buruh migran, khususnya untuk buruh migran perempuan asal Indonesia, Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya di lima wilayah Indonesia telah melakukan studi tentang buruh migran tak berdokumen yang bekerja di Malaysia. Ruang lingkup studi ini meliputi empat pertanyaan utama, yaitu : (1) Mengapa buruh migran perempuan menjalani status tak berdokumen di Malaysia, (2) Sejauh mana hukum dan peraturan yang tersedia berimplikasi pada keberadaannya sebagai buruh migran tak berdokumen, (3) Bagaimana buruh migran perempuan tak berdokumen menjalani kerjanya, dan (4) Sisi-sisi kemanusiaan apa saja yang terlanggar dan terlindungi.

Mengapa studi undoc dan mengapa perempuan

Proses pengumpulan data dan analisa studi ini dapat dilangsungkan karena adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, keluarga buruh migran di lima wilayah, peneliti lapangan, LSM-LSM, dan The Ford Foundation.

Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada....

Kami menyampaikan laporan ini kepada berbagai pihak di Indonesia sebagai pemenuhan tugas kami menyediakan hasil analisa masalah penegakan hak asasi perempuan. Secara khusus laporan ini juga kami sampaikan sebagai laporan berkala Komnas Perempuan kepada *Special Rapporteur on the Human Rights of Migrant Workers*.

Harapan kami, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.

Desember, 2005

BAB 1. Pendahuluan

Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkannya gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.

Berdasarkan data Ditjen PPTKLN (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri), Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Januari - Maret 2004 memperlihatkan bahwa negara penempatan TKI untuk kawasan Asia Pasifik tertinggi adalah Malaysia dengan total jumlah tenaga kerja mencapai 20.007 juta, yang terdiri dari 3.957 juta TKI laki-laki dan sebagian besar lainnya (16.050 juta) berjenis kelamin perempuan.

Internal dan Eksternal

Keberadaan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia di Malaysia tak bisa dilepaskan dari persoalan internal Indonesia dan eksternal Malaysia. Persoalan internal yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya lapangan kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiski-

nan. Berdasarkan data tahun 2004 (Kompas 29/5/2004), total jumlah pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran mencapai lebih dari 40 juta orang. Sekitar 10,8 juta adalah pengangguran terbuka dan selebihnya, sekitar 31,9 juta merupakan setengah pengangguran. Sementara, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan lebih dari 35 juta jiwa (Kompas 19/6/2003).

Persoalan di atas berdampak pada munculnya berbagai persoalan di tingkat masyarakat termasuk yang melekat pada TKI/calon TKI. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat berujung pada rendahnya tingkat pendidikan, akses yang rendah terhadap informasi sehingga peluang yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan hidup relatif terbatas. Peluang yang ada yang masih dapat dihaapkan untuk dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan adalah dengan menjadi TKI. Namun, untuk menjalani hidup sebagai TKI pun nampaknya tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia kurang melindungi Bahkan interaksi antara aparat pemerintah dengan calon TKI yang seharusnya memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para TKI dan calon TKI justru cenderung membuka peluang terjadinya berbagai tindakan pemerasan, pemalsuan dokumen, dan penipuan terhadap TKI/calon TKI.

Persoalan internal Indonesia bertemu dengan kondisi internal Malaysia. Pada tingkat makro, industrialisasi yang pesat yang berlangsung di Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja 'kasar' dengan karakteristik latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, tetapi memiliki kemauan kerja yang besar, terutama untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan konstruksi. Di Kota Sarawak misalnya, hingga tahun 2010 akan membuka perkebunan kelapa sawit hingga 1 juta hektar (Kompas, 24/7/2002). Untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan jumlah tenaga kerja berkisar 100 ribu orang. Dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari tenaga kerja asal Malaysia, tetapi berasal dari tenaga kerja asing. Selain jumlah tenaga kerja yang besar yang tidak dapat

dipenuhi secara internal oleh Malaysia, juga kecenderungan bahwa tenaga kerja internal Malaysia lebih mengisi segmen tenaga kerja tingkat menengah dan atas dengan karakteristik tingkat pendidikan, keterampilan yang tinggi.

Kebutuhan Malaysia terhadap tenaga kerja dengan karakteristik di atas bertemu dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Namun sayangnya kebutuhan terhadap tenaga kerja tersebut juga tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah Malaysia yang melindungi terhadap kepentingan dan hak-hak TKI. Dalam banyak hal, kebijakan-kebijakan Malaysia, justru cenderung lebih banyak ditujukan untuk melindungi kepentingan industri Malaysia sendiri. Kondisi seperti ini mengkondisikan TKI rentan terhadap pemerasan, tindak kekerasan, dan penipuan yang dilakukan aparat pemerintah Malaysia, terutama polisi yang sering melakukan operasi untuk memeriksa keabsahan TKI bekerja di Malaysia, maupun majikan tempat TKI bekerja.

Dalam perspektif Malaysia, keberadaan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia selama ini cenderung diposisikan sebagai beban dan ancaman bagi pemerintah Malaysia sendiri. Sedikit sekali, bahkan hampir tidak pernah ada, kajian yang memperlihatkan kontribusi tenaga-tenaga kerja Indonesia dalam mendukung perekonomian Malaysia. Padahal seperti diketahui bahwa sektor perkebunan, konstruksi dan rumah tangga di Malaysia, selama ini sangat bergantung pada tenaga-tenaga kerja migran asal Indonesia.

Bahkan muncul kecenderungan pihak-pihak tertentu memanfaatkan keberadaan dan status buruh migran tak berdokumen asal Indonesia. Berbagai perusahaan di Malaysia, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan jasa konstruksi, banyak yang memanfaatkan keberadaan buruh migran tak berdokumen sebagai bagian dari strategi bisnis dalam kerangka memperbesar keuntungan. Upah yang seharusnya 500 RM per bulan, misalnya hanya dibayarkan sebesar 150-200 RM jika mempekerjakan buruh migran tak berdokumen. Itu pun dengan jadwal pembayaran yang tidak tepat waktu. Bahkan tidak sedikit kasus dimana perusahaan sama-sekali tidak membayar upah buruh migran tak berdokumen sesuai dengan aturan. Jika hal tersebut dipersoalkan oleh buruh migran maka majikan umumnya mengancam akan melaporkan keberadaan mereka yang berstatus ilegal kepada polisi. Ancaman itu memadamkan keberanian buruh migran tak berdokumen sehingga mereka hanya bisa pasrah menerima perlakuan yang tidak adil

seperti hukuman cambuk yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini sangat diskriminatif dan merupakan bentuk kriminalisasi korban serta tidak menghargai hak-hak dasar manusia. Peraturan perburuhan Malaysia memangkas hak buruh migran untuk mengangkat masalah mereka secara hukum. Buruh migran juga tidak berhak atau dilarang untuk membangun serikat pekerja dan menikah saat mereka terikat kontrak kerja. Peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah Malaysia yang mengatasnamakan perlindungan terhadap warga negaranya telah secara nyata melanggar hak asasi buruh migran tak berdokumen dan melanggar hak asasi manusia.

dari majikan mereka. Kasus larinya buruh migran tak berdokumen dari majikan seringkali dipicu oleh perlakuan majikan yang terlalu menekan. Kasus-kasus tindakan kekerasan, eksploitasi tidak hanya diterima oleh buruh migran tak berdokumen tetapi juga terhadap buruh migran yang berdokumen. Jika sudah tidak tahan lagi menghadapi berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dari majikan maka buruh migran berdokumenpun seringkali melarikan diri, atau pindah kerja ke majikan lain dengan meninggalkan paspor pada majikan sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan salah satu diantara berbagai alasan mengapa buruh migran berdokumen pada akhirnya menjadi berstatus tak berdokumen.

Pemerintah Malaysia cenderung menutup mata terhadap kondisi-kondisi di atas. Bahkan menetapkan peraturan keimigrasian yang memberikan sanksi tak seimbang terhadap buruh migran tak berdokumen, tanpa peduli dengan kenyataan bahwa para buruh migran tak berdokumen telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Kritik ini dinyatakan sendiri oleh warga masyarakat Malaysia¹ dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim². Menurut Tenaganita, kebijakan pemerintah Malaysia bersifat inkonsisten dan reaktif. *Akta Immigresen* yang terbaru bersifat *punitif* dan *draconian* karena menggunakan alat untuk menyiksa

Berbagai hasil pengamatan dan studi memperlihatkan bahwa perempuan buruh migran Indonesia yang tak berdokumen di Malaysia memiliki situasi khusus. Kondisi ini diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor yaitu keberadaan mereka sebagai buruh migran tak berdokumen yang tidak dilindungi hak-haknya sebagai tenaga kerja dan juga karena statusnya sebagai perempuan. Kondisi ini membuat TKI perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia; termasuk praktek perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Mereka juga tersembunyi dan sangat bergantung pada majikan mereka. Perempuan buruh migran yang bekerja di sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga) di Malaysia tidak diakui sebagai pekerja. PRT tidak termasuk dalam hukum perburuhan di Malaysia. Gambaran media massa

1 Pers Release Tenaganita "Stop The Racist Form of Violence and Abuse Against Migran Workers- Respect Rights and Dignity of People", September 5, 2002.
2 Tempo News Room, 4 September 2002.

tentang perempuan pekerja migran yang bekerja di Malaysia juga cenderung menyudutkan dengan mengilustrasikan mereka sebagai perempuan tidak bertanggung jawab yang telah meninggalkan suami dan anak-anak mereka di tanah airnya, perempuan bebas yang membahayakan, penggoda, dan membawa penyakit-penyakit sosial. Penggambaran yang tendensius ini perlu dikaji secara serius³.

Berbagai gambaran kasus TKI khususnya di Malaysia, baik terhadap TKI laki-laki maupun perempuan, sangat tidak manusiawi. Apabila dipandang dari perspektif hak asasi manusia, maka semua manusia, termasuk buruh migran, baik laki-laki maupun perempuan, yang datang secara legal (berdokumen) maupun ilegal (tak berdokumen/PATI), berada dalam situasi regular maupun irregular mempunyai hak untuk hidup bermartabat, bebas dari prasangka dan segala bentuk diskriminasi, serta terlindungi⁴. Dengan demikian, perlakuan maupun kebijakan atau peraturan pemerintah Malaysia yang mengatas-namakan perlindungan hak-hak warganegaranya, yang bertentangan dengan hak-hak dasar tersebut, berarti telah melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran dalam berbagai bentuk tersebut tentunya juga memiliki konsekuensi pada bentuk-bentuk sanksi tertentu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana isu TKI tersebut (berdokumen dan tidak berdokumen) dipahami dalam kerangka yang lebih besar, yaitu perlindungan hak asasi manusia; dan tidak sekadar dipandang secara parsial dalam konsep perlindungan satu kelompok manusia dari satu negara dengan melanggar hak asasi kelompok manusia dari negara yang lain.

- 3 Sebagai perbandingan, di USA, studi yang dilakukan oleh Grace Chang tentang “Undocumented Latinas” membuka kedok propaganda sistematis yang dilakukan oleh negara dan pemilik modal dalam membangun image perempuan imigran tak berdokumen dari Amerika Latin sebagai perusak sejahteraan dan ...Image ini dibesar-besarkan dengan dua tujuan, yaitu untuk mendapatkan pembenaran ideologis atas pengabaian bantuan bagi imigran perempuan dengan alasan bahwa mereka adalah kriminal dan berpotensi menjadi beban masyarakat. Kedua pengabaian bantuan ini menyediakan alat yang efektif untuk memaksa imigran perempuan bekerja dalam bidang jasa yang berupah rendah.
- 4 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.

wawancara mendalam dengan lima buruh migran perempuan Indonesia, studi kebijakan, analisa kepustakaan dan laporan-laporan yang tersedia, observasi wilayah asal buruh migran perempuan yang tak berdokumen, wawancara mendalam terhadap mereka, serta FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan subyek-subyek lain seperti anggota keluarga inti, anggota komunitas, pejabat tingkat desa/kabupaten/propinsi/ nasional, dan aktifis pendamping buruh migran.

Untuk lebih memahami mengenai situasi dan kondisi perempuan buruh migran tak berdokumen tersebut maka dibutuhkan sebuah penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dicapai tujuan penelitian yaitu memperoleh gambaran mendalam mengenai perempuan buruh migran tak berdokumen berdasarkan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama mantan perempuan buruh migran Indonesia di Malaysia yang tak berdokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perumusan arah advokasi untuk persoalan buruh migran tak berdokumen baik untuk pemerintah Indonesia maupun Malaysia.

Perhatian terhadap undoc; studi yang telah dilakukan berkaitan dengan undoc, kebijakan yang berpihak dan tidak berpihak kepada posisi undoc & alasan kuat komnas perempuan untuk melakukan penelitian undoc ini

Studi berlangsung selama 7 bulan sejak September 2004 hingga Maret 2005 mencakup 4 daerah asal buruh migran yaitu: desa Burno di Lumajang – Jawa Timur, desa Banyu Praya Nusa Tenggara barat, Walengreng Bone Sulawesi Selatan dan Pontianak Kalimantan Barat, serta satu daerah transit, Jakarta.

Metode yang digunakan adalah kombinasi antara

Dari studi ini tersimpulkan bahwa: migrasi kerja tanpa dokumen adalah strategi perempuan mempertahankan hidup dari himpitan kemiskinan struktural. Kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, khususnya pertanian di wilayah asal mereka tidak memenuhi hak mereka untuk memperoleh pendapatan layak. Mereka mengais peluang untuk mendapatkan pendapatan layak di luar negeri. Namun demikian kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan migrasi kerja tidak memudahkan mereka untuk mendapatkan dokumen kerja di luar negeri. Peraturan justru memposisikan mereka menjadi buruh tak berdokumen, melemahkan posisi tawar mereka dan merentankan kondisi mereka pada sasaran perdagangan manusia serta pelanggaran HAM. Kebijakan deportasi pun terlihat tidak menyelesaikan masalah buruh migran tak berdokumen. Kebijakan deportasi ini justru memperberat himpitan dan memperparah pelanggaran HAM atas keberadaan mereka.

Berbagai gambaran kasus TKI khususnya di Malaysia, baik terhadap TKI laki-laki maupun perempuan, sangat tidak manusiawi. Apabila dipandang dari perspektif hak asasi manusia, maka semua manusia, termasuk buruh migran, baik laki-laki maupun perempuan, yang datang secara legal (berdokumen) maupun ilegal (tak berdokumen/PATI), berada dalam situasi regular maupun irregular mempunyai hak untuk hidup bermartabat, bebas dari prasangka dan segala bentuk diskriminasi, serta terlindungi⁴. Dengan demikian, perlakuan maupun kebijakan atau peraturan pemerintah Malaysia yang menga-

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

tas-namakan perlindungan hak-hak warganegaranya, yang bertentangan dengan hak-hak dasar tersebut,

Hasil temuan studi ini telah dipresentasikan dalam acara konsultasi dan mendapat masukan-masukan penting dari organisasi buruh migran, organisasi keluarga buruh migran, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, PJTKI, Komnas HAM dan peneliti independen.

Laporan ini terdiri dari 6 bagian yaitu bagian I memuat Catatan Pendahuluan; bagian kedua menguraikan Lima Pengalaman Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia, bagian ketiga menguraikan Dinamika Mempertahankan Kehidupan dalam Migrasi tak berdokumen: Mereka mengais peluang untuk mendapatkan pendapatan layak di luar negeri; bagian keempat memberikan ilustrasi Pengalaman Dideportasi: Tambahan Himpitan dan pelanggaran HAM ; dan bagian kelima analisa berkaitan dengan Kebijakan dan Peraturan yang Tersedia ; sementara bab VI merupakan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Laporan ini juga dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Uraian tentang Metodologi Studi dan Profil Lembaga Pelaksana Penelitian

Bab II

Pengalaman Lima Perempuan

Menjadi Buruh Migran Tak Berdokumen Di Malaysia

Pengalaman AMI: Kepala keluarga (Janda), dari Jawa Timur

Ami berusia 25 tahun ketika pertama kali berangkat ke Malaysia tahun 1992 bersama suaminya lewat “jalur belakang”. Waktu itu, tahun 1992, kakak kandung Ami sudah berada di Malaysia, demikian juga adik ipar, dan beberapa orang tetangga. Mereka membangkitkan keinginan Ami dan suami untuk coba-coba mencari kerja di negeri jiran. Disamping itu, calo di desa sangat aktif menawarkan jasa untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri.

“...saya ingin seperti orang lain... banyak yang berhasil kerja di Malaysia; saya dibantu tekong pak Sam, bikin surat-surat, bayarnya sejuta, sebenarnya berat, uang itu terlalu besar, tapi denger-denger jalur lain malah lebih mahal lagi. Waktu berangkat saya nelongso, apalagi harus ninggalin dua anak sama neneknya, tapi, ya sopo ngerti (siapa tahu, ed.) balik dari sana hidup lebih baik. Dari Burno kami ke Surabaya dulu, terus naik kapal Feri langsung dari Tanjung Perak ke Pasir Gudang Johor. Setelah sampai di Johor, kami sudah ditunggu oleh temannya pak Sam, seorang tekong Malaysia. Bersama tekong itu, saya dan suami naik taksi ke Subang di Kuala Selangor... Untung selamat di jalan, denger-denger banyak orang yang mengalami gangguan di jalan, ketemu

polisi, ...surat saya cuma untuk pelancong, kami semua “dipermitkan” di Malaysia..., gampang urusannya, tidak seperti sekarang”

Latar belakang pendidikan Ami adalah tamat sekolah dasar. Ia lahir akhir Januari tahun 1967, sebagai anak ketiga dari enam saudara keluarga buruh tani di desa Burno Kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada usia 13 tahun ia menikah, suaminya juga seorang buruh tani. Mereka berdua tidak memiliki lahan garapan sendiri. Setelah melahirkan dua orang anak, penghasilan dari buruh tani dirasakan sangat tidak memadai untuk menghidupi keluarganya.

Menjadi Kuli Bangunan

Dengan memegang paspor pelancong, Ami dan suami bekerja di proyek-proyek bangunan, sebagai buruh. Mereka dinamai *pekerja kontrek*, tetapi mereka tak punya kontrak tertulis apapun, mereka bekerja dengan upah harian yang jumlahnya berubah-ubah tergantung hubungan dengan toke dan mandor.

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHAKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

“...Waktu pertama kerja di Malaysia, saya jadi kuli bangunan, Kerjaannya gampang kok, lebih susah jadi buruh tani. Kerja saya cuma bawain adonan semen dalam ember kecil-kecil diberikan kepada pekerja yang laki-laki, ya gitu aja kerjanya, yang ngaduk semen ya laki-laki, yang masang batu ya laki-laki, saya cuma bantu sana-sini, ambil ini, ambil itu, bawain ini bawain itu. Saya tinggal dengan suami di tempat yang disediakan oleh toke. Pagi-pagi jam 8.00 saya dan suami sudah sampai di tempat proyek, kerjanya sampai jam lima sore, tapi ada istirahat beberapa kali, kira-kira dua jam semuanya... Upahnya, mula-mula cuma 20 ringgit, terus ningkat, dikit-dikit, terakhir, saya dapat 32 ringgit per hari karena oleh mandor dianggap rajin bekerja. Kalau laki-laki biasanya mendapat upah 40 ringgit...”

Dibandingkan dengan kerja sebagai buruh tani di desanya, menjadi buruh bangunan dengan upah harian tersebut di atas dirasakan jauh lebih baik. Mandor dan Toke (orang Malaysia yang mengepalai keberadaan mereka sebagai pekerja di suatu proyek bangunan) juga menyenangkan hasil kerja mereka, karena itu mereka bisa bertahan sampai tahun 1998.

...Kalau satu bangunan sudah selesai, saya pindah kerja di bangunan yang lain. Saya tuh sudah kemana-mana, pernah kerja bangunan di Subang, di Melaka, di Taman Melati, di Sa' alam, dan di Sungai Bulu. Kalau pindah lokasi, saya dan pekerja lainnya diangkut dengan mobil pribadi majikan, sedangkan barang-barang milik pekerja dinaikkan lori...”

Visa turis (pelancong) memang merupakan hambatan, Ami harus kucing-kucingan dengan polisi; untungnya dia bisa pinjam IC (Identification Card) milik kakak kandung Ami, kebetulan foto yang tertera mirip dengan wajah Ami. Toke membantu mereka mengurus perpanjangan dokumen (permit) dari waktu ke waktu. Pada tahun 1998 Ami diberitahu bahwa Pemerintah Malaysia tak mau lagi memperpanjang izin kerjanya karena sudah 6 tahun; Toke tak dapat membantu, maka Ami dan suaminya diharuskan pulang ke desanya.

Langkanya Penghasilan di Desa, Perpisahan Sementara dengan suami, dan Runtuhnya Perkawinan

Tahun 1998 ada perubahan politik yang besar di Indonesia, tapi tak banyak berarti bagi desa Burno tempat asal Ami. Seperti waktu sebelum mereka berangkat ke Malaysia, basis kehidupan hanya pertanian.

sama suami, di tempat yang sama; kali ini mereka bekerja sendiri-sendiri, suami sebagai buruh bangunan, Ami sebagai pekerja rumah tangga. Dulu mereka tak mempunyai ketegangan emosional, kali ini hubungan mereka penuh dengan tekanan psikologis. Hal ini mempengaruhi kinerjanya. Majikan sering mengomeli karena pekerjaannya dianggap tidak beres.

Saya cuma bisa bertahan kerja 9 bulan, capek diomelin terus, kerjanya juga berat dari pagi sampai malam, upah saya cuma 350 ringgit sebulan, bisa dibilang cuma sepertiga dari upah yang pernah saya terima dulu. Pikiran saya tidak tenang. Akhirnya saya memutuskan pulang dulu ke desa untuk mengurus surat perceraian dengan suaminya.

Tidak ada lapangan pekerjaan lain yang menghasilkan dampak lebih baik. Satu-satunya dampak situasi tahun 1998 adalah uang hasil kerja yang mereka bawa ketika dirupiahkan jumlahnya sangat besar. Mereka bisa membeli motor yang kemudian dipakai untuk usaha ojek oleh anaknya, dan membuka warung kecil-kecilan. Tetapi dua usaha ini padam dengan begitu cepat, tak membawa hasil; tidak banyak orang yang menggunakan jasa ojek, daya beli masyarakat terlalu kecil untuk menghidupkan perputaran barang-barang dan modal di warung Ami. Akhirnya bukan saja tak ada hasil, modalpun terkikis, terpakai untuk biaya hidup sehari-hari. Tahun 2000 suami Ami memutuskan untuk kembali lagi bekerja di Malaysia. Ami masih berusaha untuk mempertahankan usahanya di desa, ternyata sia-sia.

“...perjalanan saya ke Malaysia yang kedua, tidak barengan, suami berangkat duluan, dia bareng dengan seorang tetangga kami, perempuan. Saya berangkat beberapa bulan kemudian, sekitar tahun 2001 ...ternyata di Malaysia, saya melihat pemandangan yang menghancurkan. Cuma beberapa bulan suami tidak serumah dengan saya, ternyata dia selingkuh. Saya dihianati...

Situasi yang dihadapi oleh Ami pada kedatangannya yang kedua di Malaysia berbeda besar dengan situasi yang pernah dialami. Dulu dia bekerja ber-

Menjadi janda, menjadi nenek, menjadi pekerja migran lagi

Surat cerai sudah ada di tangan Ami pada awal tahun 2002. Di satu sisi ia merasa terpukul, sedih, dan berat menanggung biaya ekonomi keluarganya sendiri; di sisi lain ia merasa lapang. Ketika ia mendapatkan seorang cucu dari anak pertamanya, ia merasa perlu memiliki lembaran hidup baru. Malaysia masih merupakan tanah harapan, apalagi kakaknya sudah menetap di sana. Dia merasa tak ada yang perlu diawatirkan, meski hanya berbekal visa pelancong melalui jalur calo/tekong desa dan pada tahun-tahun tersebut Pemerintah Malaysia mulai menerapkan Akta Imigrasi yang baru di-
mandemen dimana sanksi terhadap mereka yang dikategorikan sebagai PATI (pendatang asing tanpa izin) jauh lebih tegas dan lebih keras.

Saya kembali lagi ke Malaysia untuk yang ketiga kalinya tahun 2002, bareng dengan tetangga-tetangga, ada 9 orang. Kali ini saya pakai bantuan tekong pak Ben namanya, bayar sebesar Rp 3,5 juta. Yang 600 buat bikin Paspor, 300 buat medikal, sisanya buat permit dan ongkos. Saya berangkat rame-rame, bersama dengan 15 orang lain dari desa Burno. Semuanya pakai visa pelancong. Dari desa kami diangkut dengan mobil Bison milik pak Ben ke Surabaya. Dari Surabaya perjalanan dilanjutkan ke Jakarta dengan naik kereta api, lalu ke Batam dengan naik bis. Di Batam menginap selama 2 malam di rumah teman pak Ben karena pak Ben mengurus surat-surat kami sebagai pelancong di Batam. Untuk mengurus surat itu, pak Ben harus menyogok orang imigrasi Malaysia. Tidak seperti waktu berangkat pertama, tahun 1992, yang ketiga ini sulit dapat permit, tidak ada bukaan permit, tapi saya dan teman-teman terus aja berangkat. Besoknya itu, kami naik kapal feri menuju Pasir Gudang Johor. Setelah sampai di Pasir Gudang ini kami menyebar, beberapa orang bersama dengan tekong pak Ben yang mencarikan pekerjaan untuk mereka, saya sendiri pergi ke rumah kakak ...”

Ami kemudian tinggal bersama kakaknya sampai tahun 2004 dengan membayar iuran untuk kontrak rumah. Ia mendapat pekerjaan sebagai koki di sebuah restoran yang berjarak hanya 5 menit jalan kaki dari rumah kontrakannya. Pada 6 bulan pertama, upah yang ia terima per bulan sebesar 800 ringgit Malaysia, baru pada 17 bulan terakhir ia menerima upah sebesar 900 ringgit per bulan, sementara upah rata-rata pekerja restoran yang memiliki dokumen sebesar 1500 ringgit per bulan.

“...upah saya memang hampir separuh pekerja yang punya permit, tapi sudah bagus, status saya kan kosongan, sudah syukur majikan mau mempekerjakan saya; karena dia bisa dihukum kalau ketahuan mempekerjakan pegawai yang tidak punya permit seperti saya ini...”

Selain posisi kosongan yang membuat Ami tak bisa punya posisi tawar, ada hal-hal lain di restoran tersebut yang membuat Ami merasa senang bekerja di restoran tersebut –meskipun upahnya jauh lebih rendah dari rata-rata—

“...Saya diajari masak berbagai masakan yang disediakan di restoran itu, banyak sekali lebih dari seratus jenis masakan, meskipun pemiliknya orang China, restoran ini tak menyediakan masakan babi, ada surau untuk shalat, ada hari libur mingguan, bukan di hari Minggu liburinya, karena restoran

donesia untuk mengurus dokumen migrasi kerja yang resmi. Saat itu pemerintah Malaysia sedang memberikan amnesti sebelum men deportasikan pekerja Indonesia ilegal. Keluarganya di kampung juga telah menelepon memintanya segera pulang, khawatir Ami akan dideportasi.

Saya tak bisa berbuat lain... wong semua pada panik minta saya pulang karena takut ada apa-apa... Akhirnya ya saya pulang, barengan anak saya, Ridhu, dan dua orang adik saya yang tidak punya permit. Kami pulang dengan biaya sendiri untuk naik pesawat dan travel..."

penuh pada hari Minggu, tapi pada hari lain. Saya juga dapat makan di restoran..."

Selain itu Ami telah merasa nyaman tinggal di Malaysia. Dia dapat menikmati hubungan sosial di komunitas tempat tinggal dan tempat kerjanya.

Saya akrab dengan semua penduduk yang berada di sekitar rumah kontrakan, orang-orang situ banyak yang jadi langganan di restoran tempat saya kerja.

Dengan penghasilan yang lumayan besar dibandingkan jika ia menjadi PRT di Malaysia atau menjadi buruh tani di desanya, serta hubungan sosial yang hidup di lingkungan tempat tinggalnya, Ami kemudian menarik minat anggota keluarga lainnya untuk datang ke Malaysia. Anak sulung Ami beserta dua orang adik Ami kemudian datang untuk bekerja di Malaysia. Malaysia menjadi tanah harapan keluarga besar.

Sayang semua nilai lebih ini kembali lepas lagi dari tangan Ami. Pada pertengahan tahun 2004, majikan tak mau mengambil resiko mempekerjakan orang yang tak berdokumen di restorannya. Penerapan Undang-undang Keimigrasian Malaysia yang baru diamandemen dan diberlakukan memberikan ancaman hukuman yang berat. Walaupun Ami sangat cakap bekerja, dapat memasak lebih dari 100 macam masakan, toke memulangkan Ami ke In-

Antara Polisi, petugas RELA, dan Preman-preman Penipu Buruh Migran

Polisi dan petugas RELA dikenal sebagai penegak peraturan keimmigrasian baru untuk menghalau PATI. Buruh migran yang tak berdokumen gentar terhadap ketegasan Polisi dan pasukan RELA yang bergerak tegas sejak awal tahun 2002. Ami menyiasati situasi ini dengan meminjam IC (identification Card) milik kakaknya. Yang justru ditakutkan Ami adalah preman-preman jalanan berkebangsaan Indonesia, kebanyakan laki-laki. Modus kerjanya bermacam-macam.

"... Kalau polisi ya iya..., kalau kita tak punya permit kita suka dikejar-kejar, ditangkap, ditahan atau dipulangkan ke Indon. Ya takut sih, tapi saya kelabui aja dengan IC kakak saya. Ada yang lebih menakutkan, preman-preman orang kita sendiri. Yang biasanya kena tipu itu TKW yang kerja di rumah tangga. Terkadang pelaku menipu korban dengan berpura-pura istrinya hamil di rumah sakit dan butuh biaya untuk mengambilnya, biasanya. TKW yang merasa kasihan melepaskan begitu saja perhiasan atau uang mereka, ada yang bilang preman itu pakai tenaga hipnotis..."

Pulang ke desa bagai menyongsong area kuburan, tanah mati. Di desa belum ada pekerjaan yang bisa dia lakukan, sawah tak punya, uang hasil kerja habis untuk biaya pulang ke ke Indonesia. Sementara

kehidupan terus berjalan dan harus dijalani. Ami hanya melihat kembali ke Malaysia sebagai satu-satunya jalan ke luar.

“...Saya tetap akan kembali ke Malaysia, saya lagi ngurus keberangkatan dengan jalur resmi, itu jalur yang ditetapkan Pemerintah. Biayanya mahal, tapi daripada di desa ngga ada kerjaan begini. orang-orang di kampung sini juga masih ingin kembali ke Malaysia tapi tidak mau lagi memanfaatkan jasa tekong atau toke seperti dulu, sebab sudah takut menggunakan visa pelancong untuk bekerja di sana ... Saya masih kuat bekerja, jadi harus kembali ke Malaysia untuk bekerja lagi. Saya ngurus pembuatan paspor di Jember, harusnya di Malang tapi terlalu jauh jaraknya dari Lumajang, jadi saya ambil yang terpendek dan lebih murah ongkosnya, Jember...”

Nampaknya Ami tak menyadari bahaya yang kini sedang membayang-bayangi proses resmi yang kini dia jalani. Pembuatan paspor di Jember –dalam rangka penghematan biaya— akan membuka ruang pemalsuan KTP Ami, karena ia harus mengganti alamat tinggalnya ke dalam cakupan wilayah kerja imigrasi Jember, sementara Lumajang masuk dalam wilayah imigrasi Malang. Dalam pembuatan paspor di kantor Imigrasi Jember, Ami dibuatkan KTP palsu dengan alamat tinggal di Banyuwangi, bukan di Lumajang tempat tinggalnya yang asli. Hampir semua orang yang akan berangkat ke Malaysia dari Lumajang menggunakan KTP palsu karena mereka membuat paspor di kantor imigrasi Jember.

“ Gimana lagi, ya harus gitu mas... anak saya yang kedua, Jeyen sekarang sedang menunggu proses pemberangkatan ke Malaysia, bukan cuma alamat tinggalnya yang dipalsukan tapi juga usianya; sekarang dia masih 17 tahun, tapi karena Malaysia cuma mau pekerja asing yang berumur di atas 25 tahun... ya umur Yeyen ditulis jadi 26 tahun... pokoknya bisa dapet kerja...”

Ami kembali lagi ke Malaysia ...

Pengalaman AYA : Belum menikah, dari NTB

Aya lahir tahun 1987 di pulau Dompu Nusa Tenggara Barat, dua puluh tahun lebih muda dari Ami. Meski sama dengan Ami berasal dari keluarga petani miskin, Aya sedikit lebih beruntung karena mengenyam pendidikan formal hingga ke Tsanawiyah (setingkat SLTP). Pada usia 16 tahun ia memutuskan untuk kerja di Malaysia, keluarga tak menyutujui rencananya, terutama paman Aya yang telah berpengalaman bertahun-tahun kerja di Malaysia, tetapi Aya tetap teguh pada keinginannya.

“...Saya ingin dapat uang ... saya sangat ingin membahagiakan Inaq Suk, dia telah membesarkan dan menyekolahkan saya ...

Transmigrasi, Sawah tadah hujan, dan Pabrik Tembakau: lintasan latar belakang:

Dompu hanya sebuah tempat kelahiran yang Aya kenali secara samar-samar; demikian pula orang tua kandungnya. Aya dilahirkan oleh keluarga transmigran; tapi sejak usia dua bulan Aya tidak tinggal bersama orang tuanya, ia dibesarkan oleh bibinya, Inaq Suk, di Lombok Tengah, tempat asal orang tuanya.

Sebagai transmigran, bapak kandung saya bersama dua orang kakak tiri saya membuka

lahan pertanian baru, Ibu saya menikah dengannya di Lombok terus ikut trans ke Dompu, membantu Bapak. Tapi waktu saya dalam kandungan Ibu, katanya, orang tua saya itu sering cekcok. Setelah saya lahir, mereka cerai, Mungkin saya jadi beban, saya dititipkan di rumah bibi di kampung halaman Ibu, bibilah yang jadi ibu saya selama ini. Saya memanggilnya Inaq, itu bahasa Sasak artinya ibu. Ibu kandung saya kembali ke Dompu, saya jarang bertemu...”

Keluarga Inaq Suk tinggal di Dusun Pepekat, sebuah dusun kecil, menjorok ke dalam jauh dari jalan besar. Dusun ini merupakan bagian dari desa Batunyala kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah, propinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka tinggal di sebuah rumah bilik dengan ukuran sekitar 12 x 15 meter yang dihuni oleh 8 orang. Meskipun dusun ini terisolasi, warganya tidak asing dengan perjalanan jauh melintasi batas-batas desa, batas pulau, atau batas negara. Atas kenyataan ini Aya berpendapat:

“...hidup di desa ini susah..., cari makan susah, tanam padi hanya sekali setahun, jadi banyak orang pergi, ... contohnya ya orang tua saya sendiri, trans ke Dompu, paman saya, Amaq Suk, bertahun-tahun bekerja di Malaysia, dulu, dia kerja jadi kuli kebun sawit, sepupu saya, anak sulung inaq Suk kerja di Saudi, di rumah tangga, teman saya juga banyak yang berangkat ke Malaysia. Kalau kerja di Malaysia upahnya bisa 5 sampai 10 kali lipat dari upah di desa ini...;

Desa Batunyala telah dikenal sebagai salah satu desa “pemasok” buruh migran di Lombok, namun demikian tidak ada data resmi berapa jumlah warganya yang bermigrasi, informasi yang tersedia bersifat sepenggal-sepenggal, dari mulut ke mulut, itupun lebih banyak karena kebetulan ada yang tahu warga desa berangkat membuat paspor. Lebih banyak buruh migran asal desa ini yang berangkat ke luar negeri tak diketahui petugas/kantor desa.

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

Menurut data desa per 31 Desember 2004, Desa Batunyala terdiri dari 11 Dusun, dihuni oleh 2.252 KK, atau 6.719 Jiwa. Luas tanah desa ini sekitar 910 ha. Hanya sekitar seperempat dari luas tanah ini yang dimiliki oleh warga setempat. Sebagian besar warga desa bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap yang biasa disebut *nyakap* (mengerjakan sawah milik orang lain). Sistem pertanian di desa ini mengandalkan air hujan (tadah hujan) sehingga hanya dapat satu kali produksi setiap tahun.

Mata pencaharian utama keluarga Inaq Suk adalah bertani yang dikerjakan bersama-sama dengan Aya.

“...sejak SD, saya biasa kerja, yaa...biasa, ... bantu-bantu kerjaan di rumah: masak, nyapu-nyapu, cuci piring, bantu pekerjaan di sawah; ada sawah sendiri, kecil, ada juga sawah nyakap....”

Penghasilan keluarga dirasakan amat kecil untuk menopang kehidupan sehari-hari 8 orang anggota keluarga. Sesekali mereka dapat pasokan biaya hidup dari anaknya yang bekerja di Riyadh (Saudi Arabia). Dulu ketika Amaq Suk masih bekerja di Malaysia, situasi ekonomi tak terlalu muram; kini Amaq Suk sudah makin tua tak kuat lagi bekerja di perkebunan, ia mulai menetap di desa. Karena kondisi ekonomi keluarga kian redup, Aya pernah mencoba mencari pekerjaan di luar lahan sawah.

“...Lulus MTs saya tidak melanjutkan sekolah. Kebetulan dekat kampung sini, kira-kira enam, sampai paling jauh sepuluh kiloan, ada pabrik tembakau, Kolae namanya, meskipun ijasah waktu itu belum ada di tangan saya, saya coba-coba daftar, kebetulan ada saudara perempuan saya, yang saya panggil ibu sudah bekerja di sana, alhamdulillah saya diterima...”

Pekerjaan saya cuma misah-misahkan daun tembakau sesuai dengan rasa dan aromanya... tapi dari pagi sampai sore, tidak pakai istirahat. Mandornya amit-amit, galak, salah sedikit saja kena hukuman, ya dipukul atau dicaci maki

Saya menerima upah mingguan yang dihitung per harinya 7.500 perak; tahun berikutnya ada kenaikan per harinya jadi 9.500. Semua upah ia serahkan kepada bibi karena pamannya tak bekerja lagi di Malaysia.

Hal yang paling sulit diterima adalah perlakuan mandor dan majikan perusahaan ini; mereka sangat keras dan kasar. Tekanan batin pokoknya. Pernah satu waktu saya ditendang dari belakang oleh majikan. Terus di lain waktu, saya lihat saudara saya dipukul. Saya nangis... memohon-mohon agar majikan agar tidak memukul saudara saya

terutama kerabat mereka— untuk menjadi calon buruh migran; para tekong ini memiliki jaringan yang kuat dengan birokrasi yang berhubungan dengan kerja mereka, dari pembuatan KTP di desa sampai pembuatan paspor di kantor imigrasi. Para tekong tidak segan-segan mengumbar janji untuk memberangkatkan calon buruh migran ke Malaysia tanpa biaya sepeserpun.

Pengalaman Aya berhubungan dengan tekong dimulai dengan kedatangan seorang perempuan yang konon masih ada hubungan keluarga jauh, bernama Nikmah

PINTU KE LUAR: Rayuan Tekong, Polisi Pelabuhan, Penampungan, dan Perjalanan ke Malaysia

Kerja apapun di desa hasilnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak mengherankan apabila kemudian orang berusaha untuk dapat bekerja di luar desa/pulau (transmigran) seperti ayah dan ibu Aya, atau bekerja di luar negeri, seperti paman, kakak sepupu, atau teman-teman Aya. Pergi ke luar desa nampak sebagai satu-satunya jalan keluar dari himpitan ekonomi. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai tekong.

“...Tekong itu orang-orang yang tahu banyak tentang lapangan kerja di luar negeri, hubungannya luas, terutama dengan pihak yang mengurus penempatan TKI di luar negeri, bisa mengantarkan orang desa sini sampai ke tempat kerjanya di luar negeri. Di desa Batunyale ada lima tekong besar, boss, anak buahnya tersebar di kampung-kampung...” (kepala Desa Batunyale)

Cara kerja tekong terlihat sangat intens, dengan berbagai taktik mulai dari iming-iming, bujuk-rayu, menggunakan jalur kerabat, mematahkan birokrasi, melanggar aturan, hingga menipu mentah-mentah. Banyak mantan TKI direkrut menjadi anak buah tekong; mereka bekerja hingga ke pelosok-pelosok dusun untuk meyakinkan warga desa –

“Nikmah datang dari Surabaya ke dusun, kalau tidak salah ingat, bulan januari, tahun ini (2004) ; Nikmah mmbawa kabar ada pekerjaan di Malaysia, apa mau di rumah tangga, apa mau di kilang. Di kilang katanya gajinya dua juta lebih per bulan; dia juga bilang kalau mau dia bisa ngurusin tanpa dipungut bayaran di muka, nanti dipotong gaji. Saya langsung tertarik, saya percaya karena dia kan masih keluarga, apalagi dia janji akan menolong saya sampai dapat pekerjaan itu...”.

Inaq Suk pada mulanya keberatan dengan keinginan Aya ke Malaysia karena Aya masih muda, Umur 17 pun belum genap. Amaq Suk juga berkeberatan karena menurut pengalamannya kerja di Malaysia jauh lebih berat dari yang bisa dibayangkan. Tetapi bujukan Nikmah jauh lebih meyakinkan Aya sebagaimana yang ia tuturkan dengan mengutip beberapa pendapat Nikmah

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

"...Mumpung ada keluarga yang mau ngurus saya, memang ini bukan jalur resmi, tapi kata Nikmah, kalau berangkat pakai jalur resmi jalannya lebih rumit, itupun belum tentu lulus karena ada syarat umur, ada medikal chek dan ada tes segala macam; terus kalau pakai jalur resmi itu tidak bisa mengumpulkan uang lebih banyak karena hanya diizinkan kerja dua tahun saja, kalau pakai jalur belakang bisa terus menerus kerja, tidak terbatas waktunya; pakai jalur resmi itu lagi potongannya banyak untuk permit, untuk paspor, kata Nikmah saya tinggal kerja saja, dia yang ngurus semuanya..."

Pendapat tersebut di atas tak saja berhasil meyakinkan Aya, tetapi juga meyakinkan banyak warga di Batunyalta untuk berangkat ke Malaysia melalui "jalur belakang", atau bermigrasi tanpa dokumen. Kasus-kasus buruh migran tak berdokumen yang dideportasi, yang diperlakukan sewenang-wenang, yang gajinya tak dibayarkan, atau terlunta-lunta di perjalanan nyaris tidak menjadi bahan pertimbangan. Inaq dan Amaq Suk yang semula keberatan dengan rencana Aya ke Malaysia pun kemudian berubah.

"... Akhirnya semua keluarga membolehkan saya pergi. Mereka membekali saya uang tiga ratus ribu rupiah; saya juga diantar ke rumah tuan guru, minta doa supaya selamat. Semua keluarga memberi nasihat agar saya menjaga diri selama di perantauan.

Bayar Polisi Pelabuhan

Bersama dengan Nikmah dan seorang temannya, Aya meninggalkan desanya menuju Malaysia, tanpa membawa satu lembar dokumen apapun, termasuk KTP. Tidak ada aparat desa yang mengetahui keberangkatan Aya. Mula-mula mereka menggunakan ojek motor menuju pelabuhan Lembar. Di pintu masuk pelabuhan seorang polisi mencegat, menanyakan KTP, manahannya beberapa saat, setelah mendapatkan bayaran, Aya boleh masuk ke dalam areal pelabuhan..

"Polisi itu memperhatikan saya dari kepala sampai ujung kaki, dia minta saya untuk menunjukkan KTP, saya deg-degan karena tidak punya KTP, polisi itu bilang bahwa saya terlalu kecil untuk untuk

Setelah tinggal di rumah ini, kami dibawa ke Tanjung Pinang dengan menggunakan kapal Feri selama 3 hari 3 malam. Di sini masuk penampungan lagi. Lebih lama lagi, sampai satu setengah bulan, kalau saya tanya kapan saya bisa mulai kerja katanya lagi dibuatkan paspor. Lama-lama uang bekal saya yang 300 ribu rupiah habis, Anting-anting yang saya bawa dari Lombok juga saya jual, dapat 50 ribu. Uang habis sama sekali, belum juga berangkat, akhirnya saya cari-cari uang dengan menjadi penjaga kedai, upahnya lima ribu per hari.

kerja di Malaysia, nanti saya akan dijual". Saya dan Nikmah berbohong, bilang bahwa saya cuma mau liburan ke rumah bibi saya di Surabaya. Polisi itu menahan saya, katanya karena tak ada KTP tidak boleh pergi, kalau saya maksa tetap pergi, saya harus bayar Rp 50.000,-. Nikmah nawar, akhirnya polisi mau menerima Rp 10.000,-, saya bisa masuk..., lega rasanya. Kami lalu naik bis, sehari semalam, turun di Surabaya, minap 2 hari di rumah Nikmah..."

Rangkaian Rumah Penampungan,

Rumah Nikmah adalah penampungan sementara, selain itu Aya masih tinggal di dua rumah penampungan lainnya sebelum ia dapat bekerja. Hal ini tidak ada dalam cerita Nikmah sebelum ia berangkat yang membuat Aya sempat berang.

" Setelah dua malam bermalam di rumah Nikmah, saya dan teman tidak langsung diberangkatkan ke Malaysia, tapi di bawa dulu ke rumah penampungan TKI. Saya tidak tahu lokasinya di mana, tapi masih di Surabaya. Empat hari empat malam di sini, aya sempet bingung karena ada banyak orang yang menunggu diberangkatkan ke luar negeri, semuanya yang ada di rumah itu diwajibkan kerja, termasuk saya: ngepel, nyapu, atau bersih bersih. Kalau ada yang dianggap malas, petugas akan memukul dan menendang.

Ahirnya, buku paspor saya terima, saya kaget, ditulis umur saya 25 tahun, padahal baru masuk 17, alamat sayapun bukan dari Lombok, terus, yang lucu, saya ditulis sudah kawin, padahal masih perawan. Saya tidak tahu itu kesalahan atau sengaja bikin seperti itu..., saya seneng karena bisa segera berangkat ke Johor. Kami naik kapal fery lagi selama 4 jam. Sesampainya di Johor, eh kami bukannya langsung kerja tapi di masukkan ke dalam penampungan lagi. Ada banyak laki-laki di tempat penampungan ini. Saya diberitahu bisa mulai kerja sebagai pembantu, saya tidak mau, kan janjinya di kilang, saya marah, saya di suruh nunggu lagi.

Ahirnya, suatu hari datang seorang bos kontrek, namanya Faisal, dia bilang rombongan bisa dia pekerjakan di kilang komputer dengan upah 600 ringgit per bulan. Kalau dirupiahkan mungkin 1 juta dua ratus. Berapa pun gajinya rasanya saya mau berangkat saja daripada terus menerus di penampungan..."

Tempat tinggal dan Kondisi Kerja

Aya ikut dengan rombongan yang dibawa Faisal ke areal kilang elektronik. Paspor mereka dipegang oleh Faisal. Mereka diberi tempat tinggal yang dinamakan hostel. Aya tinggal bersama 3 orang buruh perempuan lainnya dalam satu kamar yang berukuran 2 kali 3 meter, ada ranjang susun di dalamnya, dengan kasur busa tipis, bantal, robek-

robek bantalnya, ada TV, dan ada alat masak. Tapi mereka harus bayar air dan listrik sendiri...". Pekerja di pabrik ini datang dari berbagai tempat, termasuk dari Vietnam. Tempat kerja Aya sebuah pabrik elektronik *United Moor* memproduksi sparepart computer dan TV.

"Jenis pekerjaan saya macam-macam, saya pindah-pindah, pertama di bagian molding, tempat ini terlalu panas, karena dekat mesin dan lampu sorot di atas kepala; lalu pindah ke bagian spray atau semprot warna-warna (assembly). Saya juga pernah di bagian pasang power, duduk sambil nunggu mesin dan menaruh barang yang akan di perbaiki, disini sini hanya bertahan satu bulan saja, lalu saya pindah ke bagian menggosok barang, tapi ada bos yang melihat saya menggosok terlalu keras dan ditegur, saya dilaporkan dan dipindahkan lagi ke bagian pembungkusan barang".

Jaminan kesehatan di pabrik ini tidak memadai. Pekerja yang dianggap sakit kecil atau tidak terlalu parah tidak mendapat pengobatan. Hanya yang dikategorikan menderita sakit parah atau membutuhkan perawatan rumah sakit, baru biayanya ditanggung oleh perusahaan. Hubungan dengan para pekerja cukup baik, mereka saling tolong menolong terutama kalau ada yang sakit.

Upah yang diterima juga tidak berstandar. Pada bulan pertama ia terima 200 ringgit, bulan kedua 400 ringgit, bulan-bulan berikutnya upahnya tak menentu: kadang 100 ringgit, kadang 200, kadang ditunda, pernah ada penundaan gaji sampai 3 bulan lamanya.

"... Saya tidak puas dengan upah yang saya terima, karena upah yang disepakati RM 600 sebulan hanya diterima 1000 ringgit selama 10 bulan. Upah yang saya terima beda dengan yang bekerja di bagian lain di kilang yang sama. Pekerja yang legal mendapat 700 – 900 ringgit, yang illegal paling banyak 600. Padahal kerjanya sama, saya bekerja dari pukul 07.00 – 19.00. Istirahatnya sekali, jam 12 sampai jam satu. Kalau tidak masuk satu hari, maka gaji dipotong 20 ringgit. Selama 10 bulan bekerja saya hanya dapat mengumpulkan 1000 ringgit saja; Rp 500.000,- saya kasih inaq Suk, dan sisanya saya berikan pada ibu kandung saya...."

Berkaitan dengan masalah upah: pemberian upah yang tidak sesuai dengan janji, upah yang sering terlambat, dan adanya potongan-potongan, Aya bersama 30 orang pekerja lainnya melakukan

seputang dari kerja ia berpapasan dengan seorang pemuda dari Lombok, mereka lalu mengobrol di jalan. Bos kontrek melihat peristiwa ini dan menjatuhkan hukuman yang tak setimpal bagi tindakan itu

“ saya dilempari batu, lalu dijenggiut dan ditarik sampai ke depan hostel, saya ditampar, dimaki-maki, dan dipukul sampai bibir saya berdarah, dua jam saya dianiaya, dari jam tujuh sampai jam sembilan . Mulut saya berdarah, kepala saya sakit, saya jatuh pingsan. Terlalu sakit dan memalukan. Setiap kali mengingat hal itu, saya menggigil, ada rasa takut yang luar biasa, sampai pingsan..., saya trauma...”

demonstrasi. Kegiatan ini dipimpin oleh salah seorang teman perempuan bernama Haeriah dan Ayu, buruh migran asal Lombok yang sudah lebih dahulu bekerja disitu.

Demonstrasi ini hanya berimpak pada pengurangan potongan biaya permit awalnya 220 menjadi 120. Namun demikian demonstrasi yang dilakukan mereka membuat bos kontrek marah, mengancam akan memecat pimpinan aksi, dan memotong gaji para pengikut aksi. Kondisi tersebut juga dilaporkan kepada polisi yang kebetulan sedang melakukan razia, maka Fahmi adik Faisal (bos kontrek) diperiksa oleh polisi, akhirnya oleh Fahmi mereka dijanjikan akan diberikan permit, namun sampai mereka kembali pulang ke Indonesia permit yang dijanjikan itu tidak pernah ada

Peraturan pergaulan sosial di lingkungan pabrik dan hostel sangat ketat. Mereka dilarang bertemu dengan orang di luar lingkungan pabrik/hostel. Mereka juga dilarang ke luar dan bertemu orang lain di luar. Hukuman diberikan kepada yang melanggar aturan tersebut, bentuknya bermacam-macam:

“Ada teman yang tidak menerima gaji selama sebulan, karena ketahuan memiliki teman laki-laki...”

Aya pernah dengar melanggar peraturan itu karena

Status sebagai buruh ilegal membuat Aya “terpenjara”. Ia tak bisa keluar lingkungan pabrik dengan tannya dari kebaikan pabrik untuk melindunginya, pada bos kontrek, pada “leader”. Semua itu bagai mendirikan benang basah, karena dalam keseharian Aya hanyalah mangsa mereka

“ saya dilempari batu, lalu dijenggiut dan ditarik sampai ke depan hostel, saya ditampar, dimaki-maki, dan dipukul sampai bibir saya berdarah, dua jam saya dianiaya, dari jam tujuh sampai jam sembilan . Mulut saya berdarah, kepala saya sakit, saya jatuh pingsan. Terlalu sakit dan memalukan. Setiap kali mengingat hal itu, saya menggigil, ada rasa takut yang luar biasa, sampai pingsan..., saya trauma...”

Hubungan dengan keluarga dan Perjalanan Pulang

Selama bekerja di Malaysia, Aya sempat menghubungi keluarga via telfon lewat HP tetangga di Lombok. Ia sempat mengabarkan kondisi kerja yang kurang baik, gaji yang tidak lancar dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ia terima. Gaji yang ia terima hampir semuanya ia kirimkan ke desa, sekitar 500 ringgit untuk inaq Suk, dan 500 ringgit untuk ibu kandungnya di Dompu.

Ketika Pemerintah Malaysia menerapkan program Amnesti, Aya mendaftarkan diri dan pulang ke Lombok tanpa uang sepeser pun di tangannya. Pihak pabrikpun mendorong Aya pulang karena ia tidak bisa mnejamin keamanan mereka jika tetap berada di Malaysia.

Saya menelfon, memberitahu akan pulang tanggal 25 Desember, tapi, ternyata pasport terus ditahan oleh bos kontrek, janjinya kalau saya pulang paspor akan diberikan, kalau pindah kerja paspor tak diberikan, ternyata lekak (bohong), gaji saya pun tidak diberikan. Saya dibantu oleh Haeriah, dan tekong Ma' as. KBRI memberi saya SPLPuntuk pulang.

Perjalanan pulang Aya adalah bagian dari program amnesti, ia pulang bersama rekan-rekannya mayoritas laki-laki; hanya Aya dan dua kawannya yang perempuan. Perjalanan pulang yang terasa panjang, membawa harapan yang putus.

Bulan Januari 2004 saya meninggalkan pelabuhan Lembar, bulan Januari 2005 saya masuk ke pelabuhan lembar... saya masih ingat polisi yang minta uang 10.000 itu, saya masih ingat dia bilang saya terlalu kecil untuk kerja di Malaysia, saya akan dijual; saya masih merasakan bagaimana takutnya membayangkan diri di jual, saya tidak dijual tapi rasanya seperti dijual..

Waktu saya tiba di rumah keluarga menyambut dengan sangat gembira. Inaq Suk sampai menangis. Mereka denger cerita-cerita tentang orang yang dipulangkan. Saya sendiri tidak cerita pengalaman pahit saya.

Untung saya punya teman baik Haeriah. Dia terus menerus menolong saya, waktu di kilang juga waktu pulang. Kami berangkat dari hostel tgl 28 Desember 2004, minap di Johor 1 malam, baru besoknya, tanggal 29, kami naik feri ke Tanjung Pinang, malem sekitar jam sembilan, sampai di

Bone dikenal sebagai lumbung padi bukan hanya di propinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia (KTI)¹.

Sebagian penduduk desa Kawerang, termasuk Halimah, mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan laporan Badan Pusat Statistik tersebut di atas. Meskipun memang pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa, tetapi mereka tak dapat hidup dari pertanian. Bagian dari lumbung padi ini nyatanya lengang.

Tanjung Pinang subuh. Biayanya 120 ringgit. Kami lama di Tanjung Pinang, 4 malam. Dari sana baru ke Surabaya pakai Feri selama 2 malam 1 hari. Terus langsung ke Pelabuhan Lembar 1 hari 1 malam. Saya menghabiskan biaya seluruhnya 350 ringgit dan uang Indonesia Rp 100.000,- untuk bis Engkel dari Lembar ke Lombok Timur. Saya minap dulu satu malam di rumah Haeriah, Besoknya, diantar Haeriah ke rumah, kalau ngga salah baru sampai di rumah tgl. 7 Januari 2005. Tidak bawa apa-apa..."

"...Saya kerja sebagai petani, hasilnya tak tentu, habis untuk makan sehari-hari dan untuk biaya pengolahan berikutnya, ..."
(Tahir, warga desa)

" masyarakat disini masih banyak yang mendapat raskin², dan banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak, banyak yang menganggur dan akhirnya pergi merantau ...
(Kiling, tokoh masyarakat).

Kepala desa Kawerang menyatakan bahwa banyak warganya, terutama generasi muda, yang tidak menyukai pekerjaan pertanian, mereka mencari pekerjaan ke luar. Namun demikian kantor desa tidak mempunyai catatan berapa orang dari warga desanya yang bekerja di luar desa, luar kecamatan, atau bahkan luar pulau. Mereka yang pergi dari desa jarang sekali melapor. Laporan warga pun sering dianggap tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi

Pengalaman dari BONE: Desa Kawerang: Lumbung padi yang lengang

Halimah adalah penduduk desa Kawerang yang lahir pada tahun 1979. Desa ini terletak di kecamatan Cina, menghampar di bagian tengah ke arah Timur Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik kabupaten Bone, kecamatan Cina termasuk dalam kategori sentra penghasil padi sementara pertanian adalah tiang utama kegiatan ekonomi Bone. Sensus penduduk tahun 2000 juga menegaskan bahwa suku Bugis di kabupaten Bone yang mencapai 97,4% handal dan tekun di ladang-ladang pertanian. Sebanyak 72,2% dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengolah dan hidup dari sektor pertanian.

1 Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Kompas Jilid 3, September 2005, hal. 531-532

2 Raskin: beras untuk orang miskin, sebuah program yang menyediakan beras murah untuk penduduk miskin.

“... bilang mau merantau ke propinsi lain, ternyata bekerja di luar negeri, desa pun hanya bisa memberikan surat jalan, tidak bisa memberi apa-apa yang dibutuhkan mereka” (Zulhaeri, kepala desa Kawerang).

Halimah adalah salah satu dari generasi muda desa Kawerang yang juga pergi merantau ke Malaysia, tetapi ia sempat menenuki lahan pertanian sampai akhir tahun 1999. Penghasilan yang didapat Halimah—sebagaimana juga yang didapat warga desa lainnya—, sangat terbatas.

“... Pekerjaan saya di desa adalah buruh tani: memotong padi, cabut kacang, panen wijen; penghasilannya hanya sekali setahun, musiman, pas-pasan saja padahal pekerjaan ini membutuhkan tenaga kuat....

Saya menjadi buruh tani di sawah milik om dan sawah orang lain. Disamping itu saya mengerjakan sawah keluarga sendiri, tapi sawah keluarga sendiri sempit; dengan om saya pakai cara bagi hasil, sepertiga buat om, dua pertiga saya; kalau selesai mengerjakan sawah sendiri baru saya mengerjakan sawah om atau sawah orang lain...biasanya mulai jam 7 sampai jam 11 pagi, dan setelah dhuhur dilanjutkan lagi sampai jam lima; kami menanam padi, jagung, kedelai, wijen, kacang tanah, dan berbagai macam kacang-kacangan. Ganti-gantian. Hasilnya sedikit, paling banyak 30 karung, ... untuk makan sekeluarga; kami bertujuh di rumah. Ada juga hasil yang dijual untuk beli lauk pauk dan beli pupuk. Kakak saya jarang ke sawah karena tidak tahan panas, dia terima jahitan, adik saya kerja jaga toko di Bone. Saya yang ke sawah dengan orang tua; habis dari sawah kalau orang di rumah belum masak, saya langsung memasak, membantu orang tua... Saya bosan...begini-begini saja.... saya ingin mencari pekerjaan yang lain dengan cara berangkat ke Malaysia” (Halimah)

gelombang migrasi kerja penduduk dari kabupaten Bone baik pada tahun 1970-an, 1980-an, atau tahun 1990-an. Laki-laki dan perempuan bermigrasi, mencari nafkah sebagai pekerja kebun atau buruh industri.

“... Penyebabnya adalah karena tidak ada lapangan pekerjaan disini sehingga orang banyak ke Malaysia, saya sendiri ke Malaysia pada tahun 1988....Saya kerja di perkebunan coklat dan perkebunan kelapa sawit. (Ibu Jusmi, warga desa).

“ ... Saya pergi ke Malaysia sejak tahun 1994 dan kembali pada tahun 1999, waktu berangkat ke Malaysia tidak ada surat-surat, saya tidak melaporkan keberangkatan saya akan ke Malaysia. Saya ke Malaysia karena disini kurang lapangan kerja, saya kerja di kebun kelapa sawit, saya tinggal di daerah kuno di satu asrama dengan beberapa orang teman, saya sering diliputi rasa takut...” (Emi, mantan buruh migran)

MIGRASI: Merajut Harapan Tanpa Dokumen Keimigrasian

Bagi penduduk desa Kawerang, bekerja di Malaysia bukan hal yang asing. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Halimah:

“...sebelum saya ke Malaysia sudah banyak orang dari daerah sini yang ke Malaysia... Kira-kira ... sejak tahun 1964 orang sini sudah ada yang ke Malaysia ...

Beberapa tetua (tokoh) desa juga menyatakan bahwa penduduk desa ini telah mulai merantau ke Sumatra pada tahun 1960-an; sebagian untuk menghindari gerakan kelompok Kahar Muzakar; sebagian lagi bertransmigrasi untuk menggarap lahan yang baru di buka di Sumatera, konon lahan baru itu jauh lebih subur dibandingkan lahan di Bone yang kian kering. Penduduk desa ini diperkirakan baru ke Malaysia pada tahun 1970-an.

“...Saya di angkat menjadi imam pada tahun 70-an, seingat saya sejak tahun itu banyak orang yang ke Malaysia (Yusuf, imam desa)

Beberapa tahun kemudian penduduk desa Kawerang yang telah tinggal di Malaysia sejak tahun 1970-an itu disusul oleh anggota keluarganya, atau mereka sengaja mengajak anggota keluarganya yang lain, atau memboyong banyak anggota keluarganya, termasuk merekrut tetangga-tetangganya. Dengan kata lain, terdapat gelombang

Saya kurang tau tentang pengelolaan sawah sebab saya tidak pernah mengelola sawah dan saya hanya kerja sebagai buruh di Malaysia sudah hampir 20 tahun, sejak tahun 1986, saya baru kmbali bulan lalu, bekerja sebagai sopir di perkebunan kelapa sawit, pertama datang tidak bawa dokumen, setelah setahun dibuatkan toke surat-surat. (Muhamad Amin, mantan buruh migran berdokumen)

Halimah adalah salah satu dari warga desa Kawerang yang berangkat migrasi ke Malaysia pada akhir tahun 1990-an, berkaitan dengan kesulitan situasi ekonomi di desanya maupun tawaran dari calo/ketong.

“....Saya dapat informasi dari menantu tetangga saya yang bernama Harud; kebetulan kakaknya Harud itu sebagai mandor di Malaysia, jadi saya berani ikut sama dia karena saya pikir saya akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan..., waktu itu saya tidak punya pekerjaan jadi saya ingin mencari pekerjaan dengan

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHAKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

pergi ke Malaysia dan saya minta ijin sama mama ternyata mama tidak melarang saya..., kakak juga tidak melarang saya ... dia bilang dari pada kamu tinggal disini tidak ada pekerjaan lebih baik kamu ke Malaysia. Sebelumnya saya tidak kenal Harud, tapi dia itu menantu tetangga saya, tetangga yang sangat saya kenal. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan Harud, saya tidak takut karena tetanggaku bilang, nggak apa-apa kamu ikut sama dia karena dia adalah menantuku...’ (Halimah)

“... saya bertekad ke Malaysia, saya ingin mandiri, ingin punya penghasilan sendiri ingin membantu kedua orang tua mencari nafkah. (Halimah)

Pada umumnya, buruh migran asal Bone, masuk ke Malaysia Timur melalui “jalur tradisional” atau “hubungan kekerabatan” tanpa membawa dokumen-keimigrasian dan visa kerja. Ada banyak sebutan tradisional tentang cara masuk buruh migran asal Bone tak berdokumen ke Malaysia, seperti “berangkat lewat samping”, “cili”, atau “ketemu keluarga”

“Saya ke Malaysia tidak punya surat-surat, saya ikut sama Haji Dali; saya tertarik ke Malaysia karena sepupu saya di sana hampir setiap bulan di mengirim uang (Fatma, warga desa Kawerang)

Pendapat itu dikutakan oleh Kepala Desa Kawerang dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Hampir tidak ada yang melaporkan keberangkatan mereka. Kalau pun ada yang melapor mau ke luar desa, kita sebagai kepala desa membuat surat izin jalan, atau pas jalan tapi kita memberi izin hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Ada sebagian masyarakat yang melapor, katanya ingin keluar, ingin merantau di provinsi lain tapi tahu-tahunya mereka keluar negeri; menjadi TKI di sana nanti. Setelah mereka mendapat masalah baru kita tahu kalau mereka ternyata keluar negeri mencari kerja. (Zulhaeri .S. Kawilarang, kepala desa Kawerang)

Data migrasi buruh ke luar negeri (TKI) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bone menunjukkan buruh migran asal Bone tidak besar, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mayoritas dari mereka tidak terdaftar sebagai buruh migran (TKI). Menurut Kadis Walurtrans Bone, Muh Amin :

“...Pemberangkatan mereka secara resmi tidak ada. Mereka tidak dinaungi oleh perusahaan jasa tenaga kerja. Mereka dibawa oleh person-person yang merasa mempunyai kepentingan di Malaysia, jadi mereka tidak mengetahui siapa

Perjalanan Migrasi: menempuh resiko

Halima berangkat ke Malaysia hanya berbekal harapan (plus makanan dari rumah dan uang satu juta rupiah), tanpa informasi yang jelas mengenai: tempat yang dituju, pekerjaan yang akan dimasuki, hal-hal yang akan dihadapi, serta persyaratan yang harus dipenuhi.

majikannya, apa pekerjaan mereka. Mereka itu rata-rata mempergunakan pasport kunjungan keluarga. Itu yang sangat dominan, nanti di sana mereka dimanfaatkan oleh tekong-tekong itu. Mereka dijual di perusahaan untuk dijadikan tenaga kerja dengan janji gaji 18 Ringgit perhari tapi pas mereka bekerja mereka hanya mendapat gaji sebanyak 8 ringgit dan yang 10 ringgit itu diambil oleh tekong-tekong. Itu yang saya tahu dari pemulangan tenaga kerja emberkasi pare-pare pada bulan puasa.

Pengalaman Halimah mencerminkan realitas pemberangkatan tenaga kerja yang dikategorikan ilegal, atau bermigrasi tanpa membawa dokumen resmi seperti paspor dan visa kerja:

“... Saya berangkat tahun 1999, hanya membawa KTP, bekal makanan dari mamma, dan uang satu juta. Waktu mau ke Malaysia, rencana pertamanya saya ingin mengurus surat-surat (dokumen, ed.) tapi kakaknya calo mau menjamin saya akhirnya saya tidak mengurus surat-surat... karena calo akan menguruskan surat-surat setelah sampai di Nunukan. Tapi setelah satu minggu saya berada di Nunukan tidak ada juga surat diurus oleh calo... “

“...tidak ada dari unsur pemerintah desa atau kabupaten yang tahu keberangkatan saya, karena saya anggap ini adalah urusan pribadi, keinginan saya sendiri, dan juga tidak perlu ada surat-surat yang diurus di pemerintah setempat...”

“... saya berangkat, sama-sama dengan 17 orang calon tenaga kerja; saya meninggalkan desa naik pete-pete³ menuju agen Irwan Jaya di Bone dengan biaya. 10.000,- Keluarga saya mengantar sampai agen Jaya. Dari Bone kita naik bis menuju Pare-pare, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut Kerinci selama 3 hari 3 malam menuju Nunukan... Pertamanya saya mau mengurus surat-surat di Nunukan. Setelah sampai di Nunukan saya dimintai uang oleh calo untuk biaya pengurusan surat-surat itu sebanyak Rp. 250.000,- tapi setelah bermalam 5 hari surat-surat itu tidak juga diurus oleh calo..., karena itu kami semua maksa untuk segera diberangkatkan. Saudaranya calo yang jadi mandor di Malaysia, namanya Dullah, menjamin kami untuk bekerja di Malaysia tanpa surat-surat, dan uang yang diambil oleh calo hanya sebagian saja yang di kembalikan. Secara keseluruhan uang yang saya habiskan untuk biaya transport, makan, dan lain-lain selama proses keberangkatan ke Malaysia adalah sekitar Rp 800.000,-

3 Pete-pete adalah sebutan untuk mobil transportasi umum, sejenis Toyota Kijang, mengangkut sekitar 10-15 penumpang.

Saya dan teman-teman diberangkatkan ke Malaysia tanpa surat-surat. Kami diberangkatkan secara berangsur-angsur dengan menggunakan perahu kayu kecil untuk penjual sayur, sekali berangkat tiga atau empat orang agar tak kedapatan⁴ polisi. Saya takut sekali, apalagi saat-saat polisi patroli melintas, takut ketangkap. Walaupun sudah berhati-hati, empat orang teman saya tertangkap, saya lolos.. Sesampainya di Malaysia kami di jemput oleh mandor Dulmin. Kami naik teksi⁵ ke Sandakan. Sesampainya di Sandakan kami langsung bekerja ...”

Tempat Kerja

Halimah bekerja di sebuah perusahaan kayu yang mempekerjakan buruh dari Indonesia –antara lain berasal dari Mare, Sinjai, dan Maros—, serta dari Filipina. Mereka tinggal dalam satu bangunan besar yang terdiri dari kamar-kamar kecil. Setiap kamar dihuni oleh tiga sampai 5 orang pekerja. Laki-laki dan perempuan bercampur dalam bangunan itu. Bangunan besar itu dilengkapi dengan peralatan dapur seadanya, beberapa tempat tidur dan kasur usang, bantal-bantal yang sudah kotor dan layu. Setiap pekerja membayar tiga ringgit untuk tinggal di rumah itu. Halimah menuturkan kondisi tempat tinggalnya sebagai berikut:

“...Saya tinggal bersama dua orang pekerja, perempuan, asal Bone.. Perlengkapan yang disediakan sangat minim, saya sering tidur hanya beralas tikar, tidak ada kasur, tidak ada kelambu, padahal nyamuk banyak sekali, setiap saat menggigit seisi bangsal. Masing-masing orang membersihkan tempat tidurnya, dan ada juga petugas yang datang menyemprot nyamuk. Di barak ini pekerja perempuan dan laki-laki campur... Jumlahnya banyak... Saya selalu was-was tinggal campur dengan banyak laki-laki, apalagi mandornya sangat suka menggoda wanita...”

4 Yang dimaksud dengan kedapatan adalah bertemu secara tak sengaja atau ditangkap

5 Yang dimaksud teksi di sini adalah mobil, kebetulan mobil milik perusahaan tempat Dulmin bekerja.

Kondisi Kerja

Status Halimah, sebagaimana juga pekerja lainnya, di perusahaan kayu tersebut adalah sebagai buruh harian, tanpa kontrak kerja tertulis.

“... di Bone, sebelum berangkat saya tidak tahu kalau akan mendapat upah sebesar 8 ringgit per hari. Tidak ada perjanjian kerja secara tertulis ataupun lisan. Baru setelah di Malaysia, saya di kasih tahu oleh mandor, kalau pertama masuk hanya dapat upah 7 ringgit. Diberitahu secara lisan, itu saja...tidak ada surat-surat,...

Mereka dipekerjakan sesuai dengan pesanan kayu yang diterima perusahaan dan tergantung dari ada tidaknya kayu yang akan diproses ; jika tak ada pesanan atau tak ada kayu yang akan diproses (meskipun ada pesanan) mereka dirumahkan tanpa mendapatkan upah dan tunjangan apapun. Mereka juga tidak mendapatkan cuti haid, tidak ada jaminan kesehatan. Jika mereka tak bisa bekerja karena sakit, mereka pun tak mendapatkan upah atas hari absen tersebut dan tak ada jaminan kesehatan.

“... Kerja saya selama di Malaysia adalah menyusun dan merapikan kayu-kayu Renggas berdasarkan ukurannya sendiri-sendiri. Saya datang ke tempat kerja pagi jam tujuh; selesai kerja magrib, istirahat beberapa kali. Pagi

mulai pukul 07.00 sampai 09.00, istirahat selama 30 menit. Setelah itu melanjutkan pekerjaan sampai pukul 12.00. Istirahat kembali selama satu jam, lalu bekerja lagi hingga pukul 15.00. Selanjutnya mendapat waktu istirahat selama 30 menit lagi, hingga kemudian kembali bekerja sampai waktu bekerja berakhir pukul 18.30. Kalau hari minggu pekerja mendapat waktu istirahat sebanyak dua kali. Jadi selama bekerja, setiap hari mendapat waktu istirahat selama 2 jam, serta bekerja setiap hari tanpa libur tujuh hari dalam sepekan.

Hitungan upah, harian, tapi bayarannya bulanan; kalau tidak kerja sehari ya... dipotong. Waktu pertama kali kerja, upah saya cuma 7 ringgit per hari, bulan berikutnya upah harian saya jadi 8 ringgit per hari; dapatnya bulanan dngan menghitung berapa jumlah hari kerja kali 8 ringgit, lalu dipotong untuk bayar kontrak 3 ringgit dan dipotong belanja sehari-hari pada istri mandor. Jadi tiap akhir bulan hampir tidak ada sisa.

Upah laki-laki jauh lebih besar, per hari 13 ringgit meskipun pekerjaannya sama dengan saya. Pemberian upah sering terlambat 2 sampai 5 hari dari tanggal gajian. Untuk keperluan sehari-hari kita ngutang di kios milik mandor. Nanti upah kita langsung di potong. Per bulan saya biasanya dipotong untuk biaya makan sekitar 50 ringgit Saya pasrah saja.

Menu makanan saya nasi dengan sayur, dan ikan kering; kadang dengan telur; tapi sering selama sebulan terus saya hanya makan dengan ikan kering. Upah saya terlalu kecil, buat kebutuhan sehari-hari saja saya banyak ngutang; saya tidak pernah bisa mengirim uang untuk keluarga di kampung. Penghasilan saya secara keseluruhan tak sampai sejuta, paling 500 ribu rupiah

Selama tujuh bulan di Malaysia saya hanya pernah mengirim 1 kg susu milo untuk keluarganya, itupun pemberian mandor. Saya pernah sakit... satu minggu, tidak bisa kerja, ya tidak mendapatkan upah sama sekali; saya

sakit parah, di bawa ke klinik oleh mandor dengan mobil perusahaan. Tidak bermalam di klinik, langsung pulang. Kalau sakit-sakit biasa, ya ngobatin sendiri, kalau sakit agak parah, baru ada bantuan dari perusahaan. Kami tak punya cuti haid, kalau sakit perut boleh tidak kerja, tapi dihitung tidak kerja dan tidak dapat upah.

Kondisi Pekerja tak Berdokumen

Pekerja tak berdokumen di Malaysia terus menerus dihantui ketakutan. Peraturan keimigrasian dan tindakan polis setempat dikenal sangat tegas dan keras. Pekerja yang tak berdokumen harus pandai sembunyi atau main kucing-kucingan dengan petugas. Halima terus menerus dilanda ketakutan walaupun dia tak pernah mengalami tindakan keras secara langsung.

“...Saya tidak pernah tertangkap polisi, karena, di tempat kerjaku kalau polisi datang untuk memeriksa maka mandor memberi kode kepada kita agar kita bersembunyi. Saya biasa sembunyi di hutan, lari tunggang-langgang untuk sembunyi, lamanya sembunyi tergantung sampai polisi selesai memeriksa dan pulang. Saya pernah lari ke pantai... karena tak ada tempat sembunyi, saya masuk saja ke dalam air, terus saya jongkok, seolah-olah lautan sudah dalam... polisi berhenti tak mengejar saya lagi, mungkin disangkanya saya akan mati sendiri...digulung ombak, mereka berhenti mengejar....lalu pergi”

Tanpa dokumen di tangan, para pekerja hidup bagai dalam penjara dan menjadi sasaran empuk para pedagang kebutuhan hidup mereka. Mereka tak bisa keluar berbelanja di tempat yang lebih murah harganya. Untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, odol, obat nyamuk, dan makanan mereka beli pada kedai milik mandor. Satu-satunya kedai dengan harga yang tidak biasa, harga yang lebih tinggi dari pasaran. Kalau mereka butuh pakaian mereka membeli dari pedagang keliling yang menjual dengan cara cicilan.

“Saya boleh jalan-jalan tapi hanya di daerah itu saja soalnya kita takut di tangkap oleh polisi. Kadang-kadang saya ikut sama istrinya mandor ke kota...”

Mereka juga mudah diperlakukan sewenang-wenang oleh mandor atau majikan, sebagaimana yang dialami oleh salah satu pekerja di perusahaan tempat Halima bekerja

didenda dan dibawa pulang ke Nunukan. Jadi bagi saya yang sangat menakutkan adalah saat pemeriksaan dan di saat melihat polisi meskipun bukan kita yang akan diperiksa tapi kita juga yang ketakutan....

"... Saya juga takut juga sama teman-teman laki-laki karena tidur dalam satu ruangan, dan saya takut dengan mandor, ia sering mengganggu pekerja perempuan.. Di sana tidak ada rasa nyaman, tapi saya pasrah karena sudah terlanjur ada di Malaysia, kami mau pulang uang sudah habis dan mandor tidak mengijinkan kami pulang sebelum cukup satu tahun bekerja..

"... Ada teman saya yang ditangkap, lalu ditelanjangi karena di perusahaan ada barang yang hilang tapi tidak ada yang mau mengaku sehingga teman saya yang tidak punya surat itu di tuduh dan disuruh mengaku mengambil barang yang hilang. Pendetang yang tidak punya surat itu selalu dituduh meskipun bukan dia yang melakukan perbuatan salah.... Teman saya itu mawanti-wanti kepada saya agar hati-hati jangan sampai nasib yang pernah di alaminya terjadi juga sama saya. Bayangkan ditelanjangi, kita diperiksa cuma pakai celana dalam...

" ...Ada juga yang bekerja tanpa digaji atau sebagian gajinya dipotong oleh mandor, gaji lebih banyak yang dipotong daripada yang diterima. Terus, saya juga mendengar cerita langsung dari teman yang pernah di tangkap polisi, dia bilang setelah ditangkap , dipukuli,

Pengalaman Halimah tersebut di atas sama dialami oleh buruh migran tak berdokumen yang lain:

Kita bekerja tidak tenang , selalu di cari oleh polisi , gampang dibodoh-bodohi, tapi ada juga yang memiliki surat-surat palsu seperti membeli surat orang lain kemudian kita pergunakan tapi ada juga potongan-potongannya dan tidak ada jaminan asuransi seperti pak Tahir, ia memiliki surat-surat tapi surat palsu (Ibu Yusmi).

"...kita sering di tuduh kalau ada kejadian meskipun bukan kita yang melakukan, di buat rumah di tengah kebun kalapa sawit, sering di hantui perasaan takut , gaji di bayar seenaknya saja, tidak ada perlindungan...; (Tahang).

Pengalaman ini diperkuat oleh mantan buruh migran berdokumen yang juga pernah melintasi

"... Ada teman saya yang ditangkap, lalu ditelanjangi karena di perusahaan ada barang yang hilang tapi tidak ada yang mau mengaku sehingga teman saya yang tidak punya surat itu di tuduh dan disuruh mengaku mengambil barang yang hilang. Pendetang yang tidak punya surat itu selalu dituduh meskipun bukan dia yang melakukan perbuatan salah

masa kerja tanpa dokumen, sebagaimana yang dinyatakan Muhamad Amin (38 tahun)

“...Ketika berangkat, saya tak punya dokumen, baru setelah sekitar satu tahun saya memiliki pasport, ini karena toke saya tidak mau lagi mempekerjaan saya kalau saya tidak punya dokumen. Tokelah yang mengurus pasport, dengan tetap bekerja di toke tersebut beliau menguruskan pasport untuk saya, gaji saya di potong per bulan sampai biaya pasport itu lunas. Saat saya belum punya pasport saya sering merasa takut, bekerja tidak tenang apabila jumpa dengan polisi langsung di tangkap, gaji dipermainkan tapi setelah saya punya pasport saya merasa tenang, bebas berkeliaran, aman, dan tidak takut lagi sama polisi gampang mencari pekerjaan dan gaji memuaskan...ada perbedaan gaji anrata yang punya surat dan yang tidak punya surat; kalau yang punya surat gajinya lebih banyak dan di tanggung oleh company sedangkan yang tidak punya surat biasa gajinya dipermainkan dan tidak di tanggung oleh company... Gaji saya setelah punya surat-surat mencapai 1000 ringgit perbulan yang kalau di rupiahkan dua juta lebih... (Muh Amin)

PULANG: mengubur harapan

Tekanan hidup yang dihadapi Halima selama bekerja di Malaysia, nyaris tak tertahankan. Tinggal di barak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suasana yang serba darurat, mandor yang sering mengganggu, tidak bisa jalan ke luar secara bebas, lelah kucing-kucingan dengan polisi, dan ketidak pastian hasil kerja adalah rentetan dari bentuk-bentuk tekanan yang dialami Halimah sebagai buruh migran tak berdokumen.

Yang paling membuat saya ingin pulang adalah pekerjaan yang tidak lancar... kadang satu minggu kerja, lalu satu minggu berenti....(Halima)

Halima pulang bersama dengan dua orang temannya. Teman Halima yang lain masih bertahan bekerja meskipun tak berdokumen karena mereka harus melunasi hutang-hutang mereka terlebih dahulu kepada mandor. Kepulangan Halima diurus oleh mandor.

“... Istri Dulmin mengantar sampai di bandara Sandakan, dari sana kami naik pesawat, sebentar saja, kira-kira 15 menit sudah sampai Tawau. Dari Tawau kami naik perahu kecil ke Nunukan, perjalanan dari Sandakan hingga Nunukan semuanya ditanggung oleh mandor Dullah. Di Nunukan saya menginap dua malam menunggu tiket pulang, tiket itu, tiket KM AWU ke Pare-pare diurus oleh seseorang yang bernama Haji Baco. Perjalanan ke Pare-pare makan waktu selama 2 hari 2 malam setelah itu kami naik mobil hingga rumah. Biaya perjalanan dari Nunukan sampai Pare-pare tidak ditanggung oleh mandor lagi, saya bayar sendiri, Rp 200.000,-. Wah, keluarga sangat senang waktu saya

pulang. Maklum sekian lama saya tidak memberi kabar, saya sempat dianggap hilang... (Halima)

Kepulangan Halima dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan bagian dari deportasi. Pada tahun 2002, menurut Dinas Tenaga Kerja Bone diperkirakan ada lebih dari 1800 orang Bone yang dideportasi dari Malaysia melalui pintu pelabuhan Pare-pare. Di antara jumlah itu hanya 106 orang yang melapor resmi sebagai buruh migran deportant. Masalah jumlah pelapor yang kecil dan waktu pelaporan yang nyaris kadaluarsa dinyatakan oleh salah satu polisi sektor kecamatan Cina. Bapak Briptu Ibrahim.

“... Kami tidak tahu menahu orang yang kerja ke Malaysia karena rata-rata mereka itu tidak pernah melapor ke polisi, jangankan ke polisi, ke kepala desa saja tidak, mereka berangkat secara ilegal, sembunyi-sembunyi, kami sebagai aparat tidak tahu sama sekali tentang pemberangkatan tenaga kerja tersebut, setelah mereka mendapatkan masalah itu, baru kita tahu kalau mereka itu kembali dari Malaysia dan mendapatkan masalah di sana...”

Kasus-kasus yang dialami Halima dan para deportan telah ikut mendorong Pemda untuk bekerja sama dengan PJTKI

“... kami sudah kedatangan tamu PJTKI yaitu PT. Bijak yang akan mendirikan PJTKI di

Bone, mereka cuma menyurat kepada kita nanti kami yang akan menyurat ke bapak Bupati. Inilah nanti yang akan menjadi mitra kita untuk merekrut kembali TKI yang akan ke Malaysia dengan cara legal. Di sini ada perjanjian kerja antara PJTKI dan company, di ketahui oleh konsulat-konsulat kita disana .ini khusus yang ke Malaysia. Pekerjaan mereka di perkebunan; rencananya kami akan menjajaki pekerjaan itu, dan memang mereka (PJTKI) sudah punya job order. PJTKI yang tidak punya job order tidak akan kami ladeni, tapi PJTKI ini perwakilannya di Makassar saya meminta beliau membuka kantor penghubung untuk menangani kembali pemberangkatan tenaga kerja khususnya di bidang perkebunan di Malaysia dan di dasari oleh job order karena tanpa job order kita tidak bisa ladeni . Alhamdulillah dalam 2 bulan ini insyiah Allah akan ada PJTKI di bone karena beliau ini masih di bicarakan di Jakarta...”.

Jalan keluar yang sedang dirumuskan Pemda tersebut di atas lebih didasari oleh informasi PJTKI, sementara pengalaman buruh migran tak berdokumen dari Bone nampak tidak dijadikan acuan. Dinas Tenagakerja kabupaten Bone menyatakan bahwa:

“...Kalau TKI memproses keberangkatannya secara legal mereka akan di jemput dan dilepas secara resmi; Kita juga akan datang kesana ke tempat kerjanya untuk mengecek apakah pekerjaan mereka sesuai dengan perjanjian dan dalam jangka 6 bulan PJTKI harus memonitoring. ... kita tidak akan melayani yang mau berangkat secara ilegal, kita akan meneliti, calon tenaga kerja harus menyeter beberapa kartu pengenalan seperti : kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan lain sebagainya, pasport yang di keluarkan harus sesuai dengan yang terdaftar dan penyerahan pasport harus kepada yang bersangkutan, rencana kami ini akan diperkuat dengan sosialisasi menginformasikan kepada masyarakat kalau mereka ingin ke luar negeri jangan lagi ada yang melewati jalur tidak resmi karena sudah ada PJTKI yang mau membantuh mereka dalam hal pemberangkatan, perlindungan dan pemulangan dengan

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

aman dan terkoordinasi ... Selama ini rata – rata mereka bekerja di perkebunan dan mereka tidak merasa keberatan dengan pekerjaan mereka karena pekerjaan mereka tidak jauh beda dengan pekerjaan di tempat asalnya. Karena itu, kami sangat setuju dengan PJTKI yang punya job order perkebunan. Dengan adanya job order dan perjanjian kerja gaji mereka bisa sampai 45 ringgit perhari, dekarang gaji mereka hanya 18 ringgit itu pun tidak di terima semua oleh buruh, yang mereka terima cuma 18 ringgit, itu karena permainan tekong. Ada beda upah pekerja laki-laki dan perempuan, kalau perempuan lembur mungkin tidak dibayar. Semua itu karena tekong-tekong yang membawa mereka. Tapi insyah Allah dengan adanya nanti PJTKI nasib mereka akan berubah....”

Setelah kembali di kampung halaman, keinginan untuk kembali mencari pekerjaan di Malaysia masih kuat.

“...Saya berharap bisa kembali ke Malaysia, asal tidak ke tempat kerja yang dulu, tetapi ke tempat kerja yang layak. Harapan saya ini menggantung jauh, mungkin tidak bisa saya raih... ibu saya sudah tua memerlukan bantuan, kerja di desa tidak bisa dilakukan ibu sendiri, selain itu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat-surat mahaaaaalllll sekali, tak dapat saya penuhi dengan kondisi keuangan keluarga. Saya akan menguburkan keinginan untuk kembali ke Malaysia, biarlah di desa saja...”.

masih di sana, kerja di Malaysia, dia tidak gagal seperti aku...

Dengan penghasilan sebagai buruh tani yang terbatas sebagaimana dikemukakan Lala, masyarakat desa Mat Tangguk –laki-laki maupun perempuan— terdorong untuk bekerja di Malaysia Timur dengan atau tanpa dokumen. Ada yang dianggap sukses, ada juga yang merasa gagal. Pada umumnya mereka memasuki Malaysia Timur lewat jalan yang disebut bantuan tekong. Tekong adalah orang yang dianggap tahu tentang lapangan kerja, tentang calon majikan, dan tentang cara menuju pekerjaan itu, walaupun tanpa jaminan sama sekali. Hal ini antara lain terlihat dalam perjalanan Lala ke Malaysia Timur.

Pengalaman Lala: Berjalan dalam Lingkaran, Kembali ke Titik Awal Berulang-ulang

Perjalanan orang-orang desa Mat Tangguk kecamatan Tebas di kabupaten Sambas (Kalimantan Barat) menuju negara tetangga Malaysia untuk bekerja, sudah dianggap biasa. Mungkin karena karena lokasi kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia, bagi penduduk desa ini lalu lalang keluar masuk perbatasan tanpa membawa dokumen resmi yang dipersyaratkan merupakan hal yang lumrah. Hal yang mereka utamakan hanyalah bagaimana mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang lebih baik dari apa yang didapat di desanya. Desa ini terdiri dari dua dusun: dusun Karya Bakti dan Karya Tani. Mata pencaharian utama penduduknya bertani atau berkebun di tanah sendiri atau tanah orang lain sebagai buruh tani.

Namaku Lala, perempuan kelahiran desa Mat Tangguk, sejak kecil aku biasa membantu orang tuaku bekerja sebagai buruh tani milik tetangga. Sekarang aku sudah berkeluarga, kerjaku masih jadi buruh tani. Hasilnya tidak seberapa, hampir tidak cukup untuk menghidupi keluargaku, dari dulu. Aku pernah dua kali pergi ke Kuching Malaysia, tidak pakai surat-surat, dua kali kabur dari majikan, belum punya pikiran kembali lagi. Adikku..., laik-laki,

Keberangkatanku yang pertama ke Malaysia itu tahun 1997, aku belum kawin waktu itu. Aku pergi dengan bantuan tekong. Di desaku ada banyak tekong, kira-kira delapan lah, tak kurang dari delapan orang. Waktu tahun 1997 itu aku dibantu tekong Muanna. Tekong Muanna cuma membawa aku sampai Pemangkat saja, terusnyaku diofer-oper, ; yang aku ingat itu, di Pemangkat, aku diserahkan oleh tekong Muanna kepada Pak Bani yang membawaku ke Singkawang. Aku menginap selama 2 malam di Singkawang sebelum dibawa ke Entikong. Pak Bani menyerahkan aku kepada kenalannya namanya bu Nisa di Entikong. Oleh bu Nisa aku dibawa ke Sibul di Kuching, di sana aku ditempatkan di agen Lau. Baru oleh agen Lau aku dicarikan majikan...

Ketergantungan calon buruh migran kepada tekong sangat tinggi. Harga jasa tekong-tekong ini tidak berstandar, ada yang dibayar kontan oleh calon buruh migran, ada yang “menjual” buruh migran pada majikan; ada juga yang mengambil gaji buruh migran beberapa bulan sebagai bayaran jasa yang tekong berikan. Selain itu, tidak ada kepastian apapun yang bisa dipegang oleh calon buruh migran dari jasa tekong. Tempat kerja yang dicarikan oleh tekong juga sering berbeda dengan janji sebelumnya atau jauh di luar kesepakatan calon buruh migran. Lala mengungkapkan pengalamannya sebagai berikut:

Majikan pertamaku memulangkan aku ke agen Lau, karena dia tidak bisa membayar aku sebesar 3000 Ringgit Malaysia (RM), kira-kira lima apa enam juta rupiah; uangnya bukan buat aku tapi buat agen yang membawaku. Aku tidak mengerti mengapa dia harus bayar aku semahal itu. Tahu-tahu, setelah tiga hari di rumah majikan aku dikembalikan ke Kuching ke tempat pak Lau. Lama aku ditempat pak Lau... menunggu dapat majikan. Di tempat pak Lau aku disuruh bekerja di restoran miliknya, aku tidak dibayar sama sekali walaupun aku kerja mulai dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Aku tinggal di ruangan yang kotor, dan makan dari sisa-sisa makanan yang ada di restoran. Sekitar satu bulan saya bekerja tanpa upah di restoran pak Lau. Setelah itu pak Lau mempertemukan aku dengan majikan baruku. Orang kaya, rumahnya dua besar-besar. Aku disuruh kerja di dua rumah itu. Aku tinggal di kamar sendiri, di lantai dua. Aku merasa tertekan, karena pekerjaan begitu banyak dan aku sendirian mengerjakan semua itu. Aku tidak tahan kerja di dua rumah; terus aku minta dikembalikan kepada agen. Agen marah luar biasa, aku dianggap tidak berterima kasih sama dia. Terus aku diantar pak Lau untuk bekerja di karaoke...Kerja di karaoke ternyata jauh lebih sulit lagi. Kami semua seperti dipenjara, kami tak boleh berhubungan dengan orang luar, bahkan kami dilarang menghubungi kerabat jauh walaupun hanya dengan telepon. Yang lebih susah, kami tak boleh mempunyai kegiatan lain selain bekerja....Aku sungguh tidak tahan....

Tidak ada peraturan yang dapat menghukum praktek-praktek serupa perdagangan manusia yang dilakukan oleh para tekong. Jika buruh migran menghadapi masalah akibat dari penempatan yang tidak sesuai dengan dirinya, buruh migran menganggap hal itu bukan karena tangan calo, lebih sebagai nasibnya sendiri yang harus ia hadapi sendiri. Masyarakat setempat dan perwakilan Indonesia di Malaysia Timur, cenderung menghindari, takut pada resiko jika menampung buruh migran yang didatangkan calo-calo tanpa dokumen lengkap.

Waktu aku sudah benar-benar tidak tahan lagi, akhirnya aku kabur bersama dengan dua orang yang juga tidak tahan bekerja di karaoke tersebut. Kami melarikan diri, masuk hutan. Dua hari dua malam kami di dalam hutan tanpa makan dan minum. Untung kami menemukan pondok di tengah hutan itu, kami terlindung dari guyuran air hujan dan sengatan matahari di siang hari. Kami dicekam rasa takut yang luar biasa... kami terus berjalan menembus hutan, sampai menemukan jalan besar. Kami singgah di salah satu rumah, tapi penduduk setempat menyarankan kami untuk segera melapor ke konsulat karena mereka takut ada razia polisi. Kami diberi uang dan diantarakan sampai tempat bis

lewat. Kami sami sekali tidak tahu kemana bis yang membawa kami menuju. Kami berhenti di satu tempat dengan ketakutan. Untung kami bertemu dengan sopir taxi yang baik, sopir tersebut bersedia mengantarkan kami sampai ke konsulat meski tanpa bayaran. Kami tidak ditanya macam-macam di konsulat. Kami cepat-cepat dipulangkan. Aku kembali ke desaku, kembali menjadi buruh tani. Sementara itu adikku pergi ke Malaysia, ternyata dia berhasil.....

Meski desa Mat Tangguk merupakan desa yang hampir semua penduduknya pernah bekerja sebagai buruh migran, namun pihak pemerintahan desa tidak memiliki data yang pasti tentang warganya yang menjadi buruh migran di Malaysia Timur. Pemerintahan desa juga tidak pernah menyediakan informasi tentang cara bekerja ke luar negeri yang resmi dan aman, satu-satunya informasi yang didapat oleh masyarakat ialah dari para tekong yang berkeliaran di desanya. Buruh migran yang gagal di Malaysia Timur, pada umumnya tidak jera dan putus asa untuk terus mengadu untung di Malaysia.

Pengalaman adikku itu membuatku ingin kembali ke Malaysia, apalagi bibiku menawarkan jasa agen yang sudah dia kenal, namanya Mila dan Mahdi, sepasang suami istri.

Keberangkatanku yang kedua terjadi pada tahun 1999, bersama rombongan dari desa. Bibiku mengantar sampai di Semparuk. Seperti waktu berangkat pertama dulu, kali inipun aku pergi tanpa surat-surat, tidak ada surat jalan, tidak bawa KTP, tidak punya pasport. Agen janji akan memberikan surat-surat itu dari tempat lain. Semua biaya transportasi dan administrasi ditanggung oleh agen. Kami berangkat ke Malaysia melalui jalan darat. Dari Semparuk rombongan naik bis umum menuju Singkawang, dari sana kami melanjutkan perjalanan menuju kecamatan Seluas Kab. Bengkayang. Dari Seluas kami ganti angkutan menuju kecamatan Jagoi Babang, di sini aku melihat petugas disuap dengan uang sebesar RM 80, agar bisa melewati perbatasan. Dari Jagoi Babang kami berjalan kaki menuju Serikin (Malaysia), menginap satu hari di sana, pagi harinya kami langsung dibawa ke Kuching untuk mulai bekerja dengan majikan masing-masing.

Aku bersama tiga orang teman mula-mula dipekerjakan di pompa bensin, tapi setelah tiga hari disana, hanya dua temanku yang terus bekerja di pompa bensin, aku sendiri dibawa ke rumah majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga..

Masalahnya, harapan tak berjalan seiring dengan kenyataan. Buruh migran terus menerus berada dalam situasi tanpa kepastian, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar dan lebih sulit dari yang dibayangkan semula, upaya untuk bertahan tidak selamanya berhasil sebagaimana yang dialami Lala pada perjalanannya yang kedua kali.

Ternyata pekerjanku sangat berat dan majikanku sangat kasar. Aku mulai bekerja jam 4 pagi baru selesai jam 12 tengah malam. Seluruh pekerjaan rumah dilakukan olehku sendiri mulai dari mengepel, menyapu, mencuci, hingga mencabut rumput, dan melayani 8 orang penghuni rumah. Salah satu diantara delapan orang ini selalu meminta

dipijat hingga ia tertidur. Aku baru bisa tidur sesudah seluruh penghuni rumah tertidur. Tempat tidurku di lantai dua rumah tersebut, aku disediakan kasur yang tipis untuk tidur di lantai. Aku tidak punya waktu istirahat yang memadai, tidak ada hari libur. Hari Minggu malah lebih banyak pekerjaan.

Bekerja di rumah majikan ini tidak pernah terlepas dari siksaan. Aku sering sekali dibentak, dimarahi, atau dipukul. Aku juga pernah dilempar dengan gelas beling sampai tanganku berdarah hanya karena terlambat mempersiapkan minuman saat makan. Majikan dan anaknya selalu minta dilayani dengan cepat dan segera. Aku pernah melawan dan mengatakan bahwa bagaimana akan cepat melayani sedangkan yang mengerjakan hanya satu orang. Saat itu juga aku langsung dipukul dan dibentak oleh anak majikan.

Aku tidak pernah tahu berapa sebenarnya upahku. Majikanku marah waktu aku minta upah, dia mengatakan bahwa aku tidak akan menerima upah selama 4 bulan kerja karena agen telah mengambil uang dari majikan sebesar 400 Ringgit Malaysia. Aku merasa seperti sudah dijual, disiksa, harus pula aku kerja keras setengah mati. Aku sempat protes pada majikan karena aku tahu upah pembantu rata-rata 200 Ringgit Malaysia per bulan; agen juga menjanjikan upah sebesar itu.

Akhirnya aku tidak tahan, apalagi anak laki-laki majikan mulai ikutan memukulku. Pagi hari, sekitar jam delapan, majikanku sedang santai di belakang rumah, aku pura-pura menyapu di halaman, lalu diam-diam aku mengambil tas di atas lantai, lari ke jalan. Aku tanya orang di jalan bagaimana caranya ke konsulat Indonesia, ada orang yang menunjukkan halte terdekat. Di halte itu bis tidak datang-datang, lama sekali, aku, was-was setengah mati. Aku takut majikan datang. Penduduk menyarankan aku menyeberangi sungai dan naik taksi saja ke konsulat. Aku ikuti sarannya, naik taksi dengan membayar enam ringgit. begitu sampai di konsulat, aku ditampung di sana. Dari konsulat, aku pulang lagi ke Indonesia dengan bis umum melewati perbatasan.... Aku belum tahu apakah aku nanti akan balik lagi ke Malaysia Timur. Suamiku sekarang masih bekerja di Riau, upahnya 300.000 per bulan dibagi-bagi untuk hidup keluarga kami... Kalau aku balik, mungkin akan mengalami hal yang sama lagi, seperti berjalan dalam lingkaran saja, aku terus menerus ketemu yang itu-itu lagi dan selalu balik lagi ke tempat asalku, capek....

Pengalaman Sawitri - Lampung: Migrasi Berakhir di Penjara

Semua berawal dari keinginannya untuk merubah nasib dengan datang mencari kerja ke Jakarta. Indah berasal dari Desa Beno I, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Tanjung Karang, Bandar Lampung. Waktu datang ke Jakarta, ia baru saja menyelesaikan pendidikan SMP-nya. Keinginannya untuk pergi merantau juga dilatari keinginan hidup mandiri setelah Ibunya meninggal dunia dan Bapaknya menikah lagi. Selama di Jakarta, Indah tinggal di rumah bibinya di Tangerang.

Memulai kehidupan di Jakarta, Indah bekerja di *citra footwear aeratama* yang salah satu produk-sinya adalah sandal. Namun, penghasilan menjadi buruh pabrik tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari. Indah sangat tertarik waktu teman-temannya yang dulu bekerja di perusahaan yang sama menginformasikan peluang kerja ke luar negeri. Dengan harapan kehidupan akan lebih baik nantinya Indah mencoba peruntungan bekerja ke luar negeri.

Migrasi : Pengalaman Pertama

Ternyata tak mudah proses bekerja ke luar negeri. 2 kali Indah ditipu oleh PJTKI yang berjanji memberangkatkannya, bahkan uang pendaftaran dibawa

kabur oleh PJTKI tersebut. Namun demikian, ia tetap bersikeras untuk mencoba peruntungannya lagi. Dengan membayar Rp 1,5 juta ke PJTKI di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Indah akhirnya berangkat dengan dilengkapi dokumen seperti paspor, visa kerja, surat medikal serta kontrak kerja yang telah ditandatangani. Setelah seminggu menunggu di penampungan, Indah berangkat ke Malaysia dari Tanjung Balai dengan menggunakan kapal ferry. Waktu itu bulan April 2001.

Indah bekerja pada majikan perempuan (belum menikah) dengan dua orang saudaranya yang tinggal di rumah berlantai 2. Majikannya juga mengelola salon. Walaupun tidak sesuai dengan kontrak, Indah tidak bisa menolak bekerja di 2 tempat yaitu rumah dan salon. Indah bekerja overtime, mulai jam 06.00 pagi sampai – 2 pagi dengan beban pekerjaan dari mengurus keseluruhan rumah sampai menjaga salon.

Selama bekerja, dokumen Indah ditahan majikan dengan alasan takut dirinya kabur. Di dalam kontrak kerja, Indah menerima upah sebesar RM 350 (±805 ribu rupiah). Tapi, upahnya jangankan setiap bulan diberikan, dia hanya bisa menerimanya setelah kontrak berakhir. Pernah Indah minta tapi majikan bilang bahwa upahnya sudah di agen dan dapat diambil setelah masa kontrak habis. Itupun dipotong 4 bulan untuk fee agen.

Pernah pada suatu malam, Indah merencanakan kabur dari majikannya karena sudah tidak tahan dengan pekerjaan yang dilakukan, tidak pernah mendapatkan libur dan upah yang diterima tidak sebanding dengan beban pekerjaan. Pagi hari, kira-kira jam 06.00, sewaktu majikan belum bangun, Indah kabur dari rumah majikan. Karena tidak tahu arah yang dituju begitupun alamat agency maupun KBRI tidak dia ketahui, Indah memutuskan pulang kembali ke rumah majikan. Walaupun sebelumnya sempat menelpon agen. Agen memarahinya dan memintanya untuk tetap tinggal.

Menikah dan kehidupan di Penjara

Selama bekerja di salon, Indah berkenalan dengan laki-laki warga negara Pakistan. Mereka berhubungan dekat dan akhirnya menikah secara agama (siri) di Lampung pada bulan Januari 2003. 2 bulan di Lampung setelah masa kontrak kerja habis, Indah memutuskan untuk kembali ke Malaysia dengan menggunakan visa turis. Kali ini lebih atas permintaan suaminya tersebut. Suaminya sendiri telah memiliki *Identification Card* warga negara asing yang tinggal di Malaysia.

Selama di Malaysia, Indah tidak bekerja, dia tinggal bersama keluarga suami di Pucung Prima, Kuala Lumpur. Setiap bulannya, dengan uang pemberian suami, Indah selalu memperpanjang visa turisnya dengan membayar RM 450 (\pm Rp 1.035 juta). Selama ini Indah selalu mengurus perpanjangan visa sendiri. Namun pada saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, perpanjangan visa diurus oleh kakak iparnya.

Bulan September 2004, Polisi Malaysia merazia pada tenaga kerja asing yang tidak berdokumen. Indah terkena razia. Visa turis dalam paspor yang dibawanya ternyata palsu. Polisi tidak peduli walaupun Indah sedang hamil 9 bulan. Indah di tahan di Langkep Perak, Malaysia. Barang-barang yang dibawanya dirampas oleh Polisi Malaysia sampai tak ada yang bersisa.

“ Semua barang saya, uang RM 300 dan perhiasan diambil sama polisi Malaysia. Kalau mau mengeluarkan saya, keluarga harus memberi jaminan sebesar RM 10.000. Mereka tidak sanggup membayar dengan uang sebesar itu.”

“ Saya melahirkan anak laki-laki dengan keadaan tangan diborgol dan keluarga tidak boleh menengok,”

Di dalam penjara tersebut hanya terdapat dua ruangan besar untuk menempatkan tahanan laki-laki dan perempuan. Indah mendapat perlakuan tidak manusiawi selama di dalam penjara.

“... setiap pagi kira-kira jam 1 atau 2 pagi, kami dibangunkan untuk berbaris (apel) untuk menghitung penghuni penjara, masih utuh atau tidak. Kami tidur pakai alas tikar tipis, padahal saya lagi hamil tua, saya kedinginan. Tiap pagi cuma sarapan biskuit 4 buah dan teh manis trus makan siang dan malam, nasi dan lauk ikan kembung saja. Kuku tidak boleh panjang. Kalau sudah panjang harus dipotong kukunya, kalau tidak dipukul jarinya pake rotan. Saya pernah dipukul/dirotan padahal saya tidak tahu salah apa.”

Pada tanggal 17 Oktober 2004 Indah di bawa ke rumah sakit saat ia akan melahirkan bayinya.

“ Saya melahirkan anak laki-laki dengan keadaan tangan diborgol dan keluarga tidak boleh menengok,”

Keesokan harinya setelah melahirkan, Indah dibawa lagi ke Rutan dalam kondisi fisik belum pulih benar. Indah hanya membawa obat tanpa perawatan apapun. Ketika menggendong dan menyusui, tangan Indah tetap diborgol. Keluarga suami Indah pernah sesekali datang membawa makanan tetapi

mereka tidak diperbolehkan bertemu Indah.

Setelah satu bulan berada di penjara, November 2004, Indah dideportasi oleh pemerintah Malaysia bersama ratusan deportan lainnya. Ketika itu Indah bersama anaknya yang baru berumur 18 hari naik kapal fery yang muatannya melebihi batas normal. Indah pulang hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan bayi yang digendongnya. Di kapal, Indah tidak mendapatkan tempat duduk, beruntung ada teman yang kasihan melihatnya dan memberikan tempat duduknya. Perjalanan memakan waktu 2 hari 2 malam. Dari Malaysia menuju Tanjung Balai dan berakhir di Tanjung Priuk, Jakarta.

Sampai di Tanjung Priuk, kondisi Indah dan anaknya sangat lemah. Indah dibantu salah satu lembaga advokasi di Jakarta untuk pemulihan fisik dan juga perlindungan bayinya.

Indah tetap ingin merubah nasibnya. Keinginan terbesarnya adalah membuka salon sendiri. Pada waktu diwawancarai, Indah telah bekerja di salah satu salon di Jakarta dan anaknya dititipkan pada bibinya di Jakarta. Apakah ada keinginannya untuk kembali bekerja di Malaysia?

“ ... Nggak. Saya kapok banget, tidak mau lagi ke Malaysia. Takut dideportasi!”

BAB III.

Dinamika Mempertahankan Kehidupan dalam Migrasi tak berdokumen:

Mengais peluang untuk kepastian dan kelayakan pendapatan

Mengapa Tak Berdokumen?

Dalam kondisi dimana sektor pertanian tidak lagi dapat diandalkan untuk menopang kehidupannya dan ketiadaan alternatif berpenghasilan lain di wilayah asal maupun Indonesia secara keseluruhan maka satu-satunya pilihan yang ada, terjangkau dan masih memberikan peluang perbaikan pada tingkat kehidupan adalah menjual tenaga menjadi buruh kasar di wilayah lain Indonesia atau sebagai buruh migrant ke Malaysia. Hal ini nampak dari alasan terbesar yang mendorong menjadi buruh migrant. Meskipun proses perjalanan, maupun selama bekerja di negara Malaysia penuh dengan catatan kasus menyedihkan, namun dorongan untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan tetap dan peningkatan kesejahteraan hidup diri dan keluarga menjadi dorongan utama untuk meninggalkan wilayah asal dan bekerja di Malaysia. Penelitian ini berhasil menggali beberapa alasan kuat yang mendorong perempuan untuk bekerja sebagai buruh migrant yaitu:

1. Mencari pekerjaan dan penghasilan tetap untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan orang tua
2. Membeli emas (sebagai bentuk tabungan yang fleksibel untuk disimpan maupun dijual dalam kondisi penting/darurat)
3. Memperoleh pengalaman kerja dan mendapatkan tambahan wawasan.
4. Mencari peruntungan jodoh. TKI yang berangkat ke Malaysia berharap mendapatkan jodoh orang Malaysia. Dalam bahasa mereka *"mencari ringgit dan laki malaysia..."* (kuat tertangkap untuk

kasus Kalbar, meskipun pada kasus-kasus lain, mengindikasikan orientasi yang sama yaitu menikah dengan orang Malaysia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan memperoleh keamanan dari status mereka sebagai buruh tidak berdokumen) dan meningkatkan kesejahteraan.

Terdapat kategori besar alasan perempuan bekerja sebagai buruh migran tak berdokumen. Pertama, secara sadar perempuan mengambil status sebagai buruh migran tak berdokumen termasuk resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi. Pada umumnya informasi dari para mantan buruh migran tak berdokumen yang beruntung dengan statusnya akan menginformasikan pengalamannya kepada para perempuan calon buruh migran yang lain. Pilihan sadar tersebut juga seringkali didorong oleh ketiadaan dana untuk mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan. Berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen diposisikan sebagai resiko kerja atau pengorbanan dalam rangka memperoleh tingkat penghidupan yang lebih baik. Kedua, membawa dokumen visa pelancong. Alasan yang mendasarinya adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengurus visa pelancong dibandingkan dengan mengurus visa kerja. Berbekal visa pelancong, perempuan calon buruh migran berharap pihak majikan akan membantu mereka dalam mengurus visa kerja mereka.

Sementara alasan spesifik yang mendorong perempuan buruh migran pergi bekerja tanpa dokumen adalah: 1) Secara teknis lebih mudah. Hanya dengan mengandalkan teman/tetangga/saudara yang telah dikenal dengan baik, maka calon perempuan buruh migran dapat langsung pergi dan bekerja pada majikan yang ditentukan. 2) Dari sisi biaya lebih murah. Perempuan calon buruh migran tidak perlu mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan, sehingga hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen tersebut. Perempuan calon buruh migran pun tidak perlu berhutang atau menyediakan sejumlah dana untuk kebutuhan mengurus dokumen. Hal ini meringankan bagi calon buruh migran maupun keluarga yang ditinggalkan karena tidak harus sibebani oleh hutang. 3) Mudah mendapatkan pekerjaan. Dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen diuntungkan dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan. Pada umumnya perantara yang membawa perempuan calon buruh migran telah membuat semacam kesepakatan lisan dengan pihak-pihak tertentu yang akan bertindak sebagai majikan kelak. Atau bahkan tidak jarang majikan-majikan Malaysia mereka yang meminta jasa perantara 'informal' untuk mencarikan tenaga kerja untuk kebutuhannya. Kondisi ini lebih memudahkan perempuan buruh migran untuk secara cepat memperoleh pekerjaan dan majikan tanpa harus melalui proses penampungan dan pelatihan terlebih dahulu seperti yang selalu harus dilakukan oleh buruh migran berdokumen. 4) Dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen ada 'fleksibilitas' yang dirasakan untuk dapat berganti majikan. Dalam beberapa kasus dimana perempuan buruh migran tak berdokumen ini tidak cocok atau tidak tahan dengan perlakuan yang dilakukan majikannya, maka buruh migran dapat melarikan diri untuk mencari majikan yang lain tanpa harus khawatir dengan dokumen (pasport, visa kerja) yang 'ditahan' oleh pihak majikan (catatan Jatim dan NTB). 5) Tidak mengetahui secara persis dokumen-dokumen maupun besaran biaya yang dibutuhkan untuk

dapat bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Dengan kata lain bahwa faktor informasi, faktor ketersediaan dana untuk memenuhi dokumen tersebut yang pada akhirnya memposisikan perempuan khususnya kasus SulSel sebagai buruh migran tak berdokumen. 6) Pandangan yang salah mengenai dokumen. Dokumen yang seringkali disebut sebagai syarat untuk dapat bekerja di Malaysia adalah kartu pas dan pasport (sebagian dari informan kasus sudah ada yang mengetahui jenis pasport yaitu pasport pelancong dan pasport kerja). Dengan pemilikan dua dokumen tersebut, sebagian calon buruh migran telah merasa dirinya sebagai buruh migran yang resmi dan dapat bekerja secara aman tanpa gangguan rasia dari aparat polisi Malaysia.

Hasil penelitian inipun menemukan bahwa selain alasan-alasan di atas yang memposisikan perempuan sebagai buruh migran tak berdokumen, terdapat juga kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh tekong atau perantara mereka. Awalnya tekong atau perantara menjanjikan akan mengurus kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh berbagai alasan. Dalam kasus penipuan ini, terdapat kasus dimana calon buruh migran telah memberikan sejumlah dana kepada tekong atau perantara dalam kaitan dengan pengurusan dokumen yang dibutuhkan.

Document-undocument Sebagai Sebuah 'Siklus'

Keberadaan buruh migran tidak berdokumen pada intinya berbasis pada persepsi yang dikembangkan sekaligus konsekuensi yang harus ditanggung oleh buruh migran yang bersangkutan. Basis persepsi yang ada selama ini dan tertanam kuat sebagai perspektif pemerintah baik Indonesia maupun Malaysia adalah berbasis pada dokumen (surat-surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang) untuk mensyahkan atau tidak mensyahkan seseorang sebagai buruh migran yang diakui atau tidak diakui.. Konsekuensi dari diakui atau tidaknya seseorang sebagai buruh migran dikaitkan dengan sebuah tindakan pelanggaran atau kriminal yang jelas memiliki konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dokumen inipun secara langsung menjadi sebuah legitimasi negara untuk memperlakukan buruh migrannya, tidak saja untuk negara asal buruh migran tetapi juga negara tujuan buruh migran. Pandangan orang cenderung selalu diarahkan kepada keberadaan dokumen ketika terjadi pembahasan buruh migran. Dokumen cenderung dilihat dari satu sisi sebagai alat yang dapat digunakan untuk melindungi hak warga negara. Dokumen dari sisi lain jarang dilihat yaitu sama-sama sebagai alat tetapi bukan melindungi tetapi justru melanggar hak-hak asasi sebagai manusia dalam konteks yang lebih luas.

nya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat, sementara mereka ingin segera bekerja karena desakan kebutuhan hidup harian. Namun pada buruh migran yang menyatakan ini tidak berkeberatan untuk memiliki dokumen sejauh pengurusan murah, cepat dan tidak berbelit .

Studi ini memperlihatkan bahwa status buruh migran berdokumen menjadi tidak berdokumen atau sebaliknya seperti seolah sebagai sebuah siklus. Dengan kata lain bahwa seseorang yang berdokumen tidak menjamin selamanya dalam proses menjalani kerjanya akan terus menjadi buruh migran berdokumen atau sebaliknya. Ada banyak faktor yang membuat buruh migran berdokumen menjadi tidak berdokumen dan sebaliknya. Kategori yang berhasil dirumuskan dari berbagai alasan yang muncul dari mantan buruh migran berdokumen maupun mantan buruh migran yang tak berdokumen diataranya adalah:

1. Dokumen ditahan dan tidak dikembalikan oleh majikan sebagai alat jaminan
2. Dokumen habis masa berlakunya karena tidak diberikan waktu oleh majikan untuk memperpanjang masa berlakunya
3. Ditipu oleh agen, calo atau tekong. Mereka dijanjikan untuk diurus surat-surat sesampainya di Malaysia, namun hal tersebut tidak terbukti. Kasus yang lain adalah mereka telah memberikan sejumlah dana untuk pengurusan surat/dokumen, namun surat atau dokumen yang dijanjikan tidak keluar.
4. Pilihan sadar dari calon buruh migran. Hal tersebut disebabkan karena tidak memiliki informasi tentang dokumen yang dibutuhkan oleh seorang buruh migran, ketiadaan dana untuk pengurusan surat-surat resmi, dan lama-

Sementara alasan yang dikemukakan beberapa mantan buruh migran tidak berdokumen yang selama masa kerjanya kemudian menjadi berdokumen adalah faktor majikan, tekong atau calo. Majikan, calo atau tekong menjadi salah satu pihak yang mendorong atau bahkan menguruskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan buruh migran atas biaya buruh migran yang bersangkutan. Realitas ini menunjukkan bahwa majikan, calo atau tekong dapat memainkan peranan yang membantu pihak buruh migran. Pada kasus-kasus tertentu dimana tenaga kerja memiliki kinerja yang baik dan majikanpun sangat membutuhkan maka pihak majikan dapat berperan sebagai pihak yang membantu dalam mengadakan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, majikan menjadi pihak yang menjamin keberadaan buruh migran yang dipekerjakannya. Sejauh ini kasus-kasus seperti memang tidak boleh diabaikan keberadaannya, meskipun jumlahnya memang kecil. Keberadaan kasus seperti itu cenderung mengandalkan pada niat baik majikan. Belum ada sistem maupun landasan hukum formal yang memungkinkan hal tersebut berlaku umum untuk semua buruh migran. Dengan demikian faktor majikan, calo atau tekong yang baik hanya merupakan sebuah keberuntungan untuk keberadaan seorang buruh migran. Dengan kata lain tidak ada mekanisme kontrol –baik di negara asal maupun negara tujuan—yang memungkinkan adanya majikan, calo atau tekong yang baik tetapi juga sebaliknya tidak ada mekanisme yang memberikan sanksi kepada majikan yang berbuat tidak baik, eksploitatif terhadap buruh migran.

Kesadaran bahwa berdokumen atau tidak berdokumennya seorang buruh migran sebagai sebuah siklus menyadarkan bahwa menyerahkan keberadaan dan nasib buruh migran hanya pada keberadaan dokumen tidak akan menyelesaikan persoalan buruh migran. Dalam konteks ini sekaligus menyatakan bahwa proses deportasi sebagai sebuah kebijakan pemerintah untuk menertibkan dokumen buruh migran hanya menunda waktu dan tidak menyelesaikan masalah buruh migran secara mendasar. Penyelesaian buruh migran harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas –tidak hanya sekedar dokumen—yaitu pada persoalan hak asasi manusia.

Eksplotasi Vertikal dan Horizontal

Temuan penting lain dari studi ini memperlihatkan terdapatnya pihak-pihak yang mengeksploitasi keberadaan buruh migran tak berdokumen. Temuan ini bukan merupakan temuan baru dalam isu perempuan buruh migran tak berdokumen. Namun temuan studi ini mempertegas bahwa kasus-kasus eksploitasi terhadap perempuan buruh migran dan buruh migran pada umumnya bukan merupakan kasus yang dapat hilang dengan sendirinya. Temuan studi ini lebih meyakinkan bahwa perlu upaya khusus, strategis, dan berlandaskan pada legal formal yang berbasis pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Secara sederhana, eksploitasi di sini dipahami sebagai proses mengambil dan memupuk keuntungan oleh pihak tertentu atas biaya dan resiko pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Hubungan eksploitatif yang tertangkap tidak saja pada hubungan atau relasi kerja antara buruh migran tak berdokumen dengan majikan, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberangkatan, tempat kerja sampai dengan proses pemulangan. Secara umum, eksploitasi terhadap buruh migran terjadi secara vertikal dan horizontal. Eksploitasi vertikal dilakukan oleh majikan dalam konteks relasi kerjanya, dan pihak-pihak lain seperti calo, PJTKI, oknum-oknum lain di Malaysia. Sementara eksploitasi horizontal terjadi pada sesama buruh yaitu dari buruh migran yang berdokumen terhadap buruh migran yang tak berdokumen.

Modus dan wujud eksploitasi terhadap buruh migran diantaranya yaitu :Dari pihak majikan yaitu :menahan semua dokumen yang dimiliki buruh migran, Mempekerjakan buruh migran tanpa batas lingkup dan waktu kerja yang jelas. Membayar besar upah di bawah standar atau bahkan tidak membayar upah

buruh sama sekali. Mengancam melaporkan buruh migran tak berdokumen jika menuntut haknya. Eksploitasi vertikal yang dilakukan pihak majikan terhadap buruh-buruh migran tak berdokumen mengindikasikan dilakukan majikan sebagai strategi bisnis dalam rangka mencari keuntungan. Perekrutan buruh migran tak berdokumen pada proyek-proyek konstruksi dilakukan untuk menekan upah buruh dan menghindari diri dari kewajiban membayar berbagai tunjangan seperti kesehatan, kesejahteraan buruh, menghindari diri dari membayar uang lembur, dll sehingga pada akhirnya menekan biaya operasional atau biaya produksi serendah-rendahnya untuk mengakumulasi keuntungan yang sebesar-besarnya. Kecenderungan yang sama terjadi pada sektor-sektor lain seperti jasa pembantu rumah tangga. Umumnya pihak majikan mempekerjakan pekerja rumah tangga tak berdokumen dengan motivasi membayar upah yang lebih rendah dari standar atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Kebijakan deportasi pun seringkali dimanfaatkan oleh pihak majikan tertentu untuk menyelubungi wujud eksploitasi yang dilakukan terhadap buruh migran tak berdokumen yang dipekerjakannya. Dengan alasan rasia polisi Malaysia, pihak majikan dapat mengusir atau memulangkan buruh migran tak berdokumen tanpa memenuhi kewajibannya. Pengalaman salah satu perempuan mantan buruh

migran tak berdokumen yang bekerja membuka warung nasi di proyek konstruksi bersama suami menunjukkan bahwa isu akan adanya rasia besar-besaran yang akan dilakukan polisi Malaysia seringkali membuat kalut para buruh migran tak berdokumen. Kekalutan, ketakutan dan kekhawatiran akan dipenjara, seringkali mendorong buruh-buruh migran lari pulang tanpa berusaha meminta haknya kepada majikan terlebih dahulu. Pada kasus pedagang warung nasi, kekalutan dan ketakutan mendorong dirinya kembali ke Indonesia dan membiarkan piutang-piutangnya tak tertagih. Resiko yang harus ditanggung buruh migran tak terbatas pada berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi yang dilakukan tetapi seringkali kerugian dalam bentuk materi; upah maupun piutang yang tak tertagih.

Wujud eksploitasi dari pihak calo/mandor terhadap perempuan buruh migran yaitu melakukan penipuan terhadap buruh migran dengan cara menarik sejumlah dana kepada buruh migran dengan alasan untuk pengurusan dokumen, tetapi pengurusan dokumen tidak dilakukannya. Memotong upah buruh migran tanpa kesepakatan. Menjual calon buruh migran ke calo atau tekong lain yang akan membawanya langsung ke Malaysia dengan imbalan sejumlah uang. Memaksa buruh migran untuk tinggal dan makan pada pemondokan atau warung milik calo tanpa pilihan dan melakukan pemotongan upah tanpa kesepakatan.

Di luar eksploitasi vertikal yang terjadi antara pihak buruh migran dan pihak-pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seperti dalam kasus-kasus di atas, perempuan buruh migran tak berdokumen pun mengalami eksploitasi horizontal. Eksploitasi horizontal yang dimaksud disini adalah eksploitasi yang dilakukan antara sesama buruh migran baik yang tak berdokumen maupun yang berdokumen. Wujud eksploitasi horizontal yang dilakukan buruh migran berdokumen kepada perempuan buruh migran tak berdokumen adalah dengan menawarkan foto copy identitas dengan imbalan sejumlah uang tertentu.

Diskriminasi dan Eksploitasi Berbasis Gender

Dalam relasi kerjanya, perempuan buruh migran tak berdokumen cenderung mengalami diskriminasi dan eksploitasi berlevel kerjanya yaitu sebagai buruh migran tak berdokumen dan sebagai perempuan. Dengan kata lain bahwa perempuan buruh migran tak berdokumen di samping rentan terhadap wujud eksploitasi vertikal dan horizontal juga rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi lainnya karena keperempuanannya.

Wujud eksploitasi yang sangat umum terjadi di berbagai sektor –khususnya sektor jasa dan sektor manufaktur— dimana perempuan buruh migran tak berdokumen terkonsentrasi di dalamnya adalah berupa perbedaan besaran upah buruh antara buruh laki-laki dan perempuan meskipun sama-sama berstatus sebagai buruh migran tak berdokumen. Untuk rentang waktu yang sama panjang, jenis pekerjaan yang sama perempuan buruh migran dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki buruh migran (berapa persis perbedaannya tidak ada dalam catatan lapangan).

Perempuan buruh migran tak berdokumen rentan terhadap pelanggaran hak-haknya sebagai perempuan. Kasus informan yang berasal dari Jakarta memperlihatkan bagaimana perempuan diperlakukan sangat tidak manusiawi dalam kondisinya yang sedang hamil dan saat melahirkan. Informan menjalani hukuman penjara ketika kandungannya berusia 9 bulan. Informan dengan kondisinya harus tinggal beberapa bulan lamanya bercampur dengan laki-laki buruh migran tak berdokumen yang sama-sama menjalani hukuman. Informan juga harus menjalani proses persalinan di penjara dalam kondisi tangan diborgol. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa negara seringkali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi. Hak-hak perempuan belum secara diakomodir dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Malaysia dalam memperlakukan perempuan buruh migran (lisa, apa ada studi atau bahan yang mendukung pernyataan ini?)

Perempuan buruh migran tak berdokumen karena keperempuanannya seringkali sangat rawan terkena kasus *trafficking*. Dalam konteks ini perempuan buruh migran tak berdokumen tidak dipekerjakan pada sektor tertentu sesuai dengan kesepakatan atau penjelasan awal. Perempuan buruh migran tak berdokumen melalui jaringan tertentu dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Dalam relasi keluarga, perempuan memiliki beban yang lebih besar untuk mendukung keluarga untuk tetap bertahan. Dalam konteks keluarga miskin, setiap anggota keluarga memiliki posisi yang relative sama untuk dapat memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga. Dengan kata lain; suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan bekerja dalam peluang dan kesempatan yang ada untuk dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada keluarga yang memiliki lahan produktif, kiriman dari anggota keluarga dapat disimpan dan diakumulasikan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti pembangunan atau renovasi rumah tinggal. Namun bagi keluarga yang tidak memiliki lahan atau pemilik lahan sempit, hasil kiriman dari anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh migran sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian. Dalam keluarga yang miskin dan sangat miskin, perempuan cenderung memiliki beban yang lebih berat. Perempuan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah banyak keterbatasan. Bahkan untuk wilayah NTB, beban kemiskinan cenderung dibebankan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan faktor budaya local yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan di tingkat keluarga. Ketika suami bekerja di luar wilayah asal, perempuan harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga selama ditinggalkan

suami. Berbasis pada kepemilikan lahan yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, perempuan harus memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya.

Strategi Bertahan Buruh Migran Tak Berdokumen
Penjelasan dan gambaran di atas membentuk satu pandangan bahwa pada seluruh tahapan hidup dalam statusnya sebagai perempuan buruh migran tak berdokumen merupakan proses yang penuh strategi untuk tetap bertahan hidup. Secara lebih detail, penelitian ini menangkap wujud strategi yang dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen sejak proses pemberangkatan, di lingkungan kerja sampai dengan tahap pemulangan.

Tahap pemberangkatan

Pada tahapan ini, strategi yang dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen ditujukan untuk menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian –Indonesia maupun Malaysia untuk dapat sampai ke Malaysia dengan selamat. Pada kasus-kasus tertentu terutama saat penyeberangan, perempuan buruh migran tak berdokumen misalnya harus rela bersembunyi diantara tumpukan sayur yang akan dijual ke Malaysia.

Strategi lain yang dilakukan pada tahapan ini adalah menghindar dari jeratan calo terutama di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia. Beberapa strategi yang dilakukan diantaranya adanya perempuan buruh migran tak berdokumen tidak boleh lepas dari rombongannya, apapun alasannya. Jika hendak ke kamar kecilpun maka perempuan buruh migran tak berdokumen harus didampingi buruh migran lainnya (terutama harus didampingi oleh laki-laki sebagai pihak yang dianggap kuat untuk memberikan perlindungan dalam situasi-situasi darurat). Pada kasus informan dari Bone, ketakutan yang mendera begitu kuat sehingga harus menahan sakit untuk tidak buang air kecil selama perjalanannya sampai dengan di Malaysia. Hal ini

mengakibatkan informan sakit beberapa waktu setelah sampai di Malaysia.

Selama dalam perjalanan termasuk waktu istirahat, perempuan buruh migran tak berdokumen dilarang keras oleh calo untuk keluar dari kendaraan yang membawanya ke Malaysia. Untuk tidak mendapatkan masalah apapun, perempuan buruh migran tak berdokumen rela berjam-jam bahkan sehari-hari tidak turun dari kendaraan sehingga pada beberapa kasus kaki-kaki mereka bengkak selama dalam perjalanan. Padahal kondisi bus yang ditumpangi dalam penggambaran informan sangat tidak nyaman. Jumlah penumpang hampir dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya, sehingga bus sangat sesak dan tidak nyaman. Namun bagaimanapun hal tersebut tidak dapat dihindarkan dan dimaknai sebagai bagian dari resiko yang dihadapi untuk dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

Tahap kerja.

Strategi bertahan hidup juga dilakukan selama proses perempuan buruh migran tak berdokumen bekerja. Strategi dalam tahap ini secara umum dilakukan untuk memperjuangkan haknya berupa besar upah yang diterima atau sekedar untuk memiliki sedikit waktu untuk beristirahat selama proses kerjanya. Strategi lain juga dilakukan untuk menghinarkan diri dari tindakan-tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan majikan terhadap mereka. Beberapa strategi yang dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah : Untuk mempertahankan haknya, buruh-buruh migran meskipun 'takut', namun mereka mencoba untuk menanyakan bahkan menagih upah mereka. Pada beberapa kasus, penagihan upah seringkali kemudian diikuti oleh ancaman bahkan pemukulan dari pihak majikan. Pihak majikan mengancam bahwa mereka akan melaporkan keberadaan mereka sebagai buruh-buruh tidak berdokumen (kasus illa)

Pada beberapa kesempatan perempuan buruh migran tak berdokumen untuk mendapat penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaannya. Hal ini dilakukan karena pada realitasnya perempuan buruh migran merasa jam kerja yang sangat panjang dan beban kerja yang berat. Umumnya respon yang diterima dari pihak majikan adalah marah dan juga balik mengancam akan melaporkan keberadaan buruh migran kepada polisi Malaysia.

Jika kondisi kerja terlalu buruk dan buruh migran sudah merasa tidak tahan terhadap kondisi kerja yang dialami, maka strategi yang dapat dilakukannya adalah melaporkan kondisi tersebut kepada tekong

untuk dapat penggantian majikan. Namun hal tersebut seringkali sulit untuk berhasil, terlebih jika pihak majikan sudah merasa cocok dengan buruh migran yang bersangkutan.

Strategi terakhir dapat dilakukan untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tekanan adalah melarikan diri ke hutan atau jika memiliki informasi yang memadai adalah melarikan diri ke konsulat seperti yang pernah dilakukan oleh informan dari Kalbar.

Pada kasus-kasus tertentu dimana perempuan buruh migran tak berdokumen tidak lagi tahan dengan sikap majikan yang tidak manusiawi dan strategi-strategi yang rasional tidak mampu memberikan penyelesaian, maka buruh migran menggunakan 'ilmu hitam' untuk bisa mengendalikan majikannya. Buruh migran menggunakan darah bulanannya untuk dimasukkan ke dalam makanan dan minuman yang akan dimakan oleh majikan. Cara-cara tersebut dianggap berhasil karena pada akhirnya mampu merubah dan mengendalikan majikan sehingga lebih manusiawi dalam memperlakukan buruh migrannya.

Untuk sekedar memperoleh waktu istirahat yang sebenarnya menjadi bagian dari haknya sebagai buruh, perempuan ayng berkeja sebagai pembantu rumah tangga tetap harus melakukan strategi. Jika

tidak, mereka bekerja hampir seharian tanpa waktu istirahat. Jika kondisi fisik benar-benar tidak tahan, maka perempuan buruh migran tak berdokumen membuat alasan sakit seperti tangannya sakit, terkilir, dll sehingga tidak dapat bekerja. Dengan cara tersebut maka majikan memperbolehkannya beristirahat 1 hari.

Untuk buruh kilang, strategi yang biasa dilakukan untuk sekedar mendapat sedikit waktu beristirahan adalah dengan berpura-pura sakit sehingga memperoleh ijin beristirahat seharian di klinik yang disediakan. Hal tersebut biasanya dilakukan dalam kondisi dimana buruh diharuskan lembur dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus untuk mengejar target produksi tertentu. Atau untuk mempersiapkan diri menghadapi pergantian shift yang mengharuskan buruh-buruh migran masuk malam untuk jangka waktu tertentu (rata-rata 10 hari secara terus menerus untuk satu kali shift)

Menikah dengan warga Malaysia atau buruh yang memiliki IC sebagai buruh tetap dan diakui di Malaysia merupakan strategi lain yang dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen untuk memenuhi rasa aman dalam statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen. Selain dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan status sosial ekonomi.

Tahap pemulangan.

Strategi tetap harus dilakukan perempuan buruh migran tak berdokumen saat akan kembali ke tempat asal. Pada tahap ini para buruh harus berupaya untuk melepaskan diri dari praktek-praktek calo maupun polis yang akan mengambil uang hasil kerja mereka. Untuk mengamankan uang hasil kerja mereka maka berbagai strategipun dilakukannya seperti:

- a. Menyimpan uang ke dalam lipatan softex (pembalut wanita) dan memakai pembalut tersebut dari mulai Malaysia sampai tiba di Indonesia. Tidak jarang dengan strategi yang dilakukannya tersebut, perempuan buruh

- migran harus berjalan dengan rasa sakit akibat luka pada pangkal pahanya.
- b. Menggulung uang-uang ringgit mereka kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam tempat bedak.
 - c. Mengirimkan uang hasil kerja mereka kepada agen, meskipun harus mengeluarkan uang jasa untuk agen. Namun cara tersebut lebih aman dibandingkan dengan membawa uang sendiri.
 - d. Untuk menghindarkan diri dari calo money changer di wilayah perbatasan, buruh biasanya sudah menyiapkan sedikit uang yang akan ditukarkan. Dengan cara tersebut maka buruh tidak akan selalu dipaksa oleh money changer. Menukar di money changer cukup merugikan karena harga tukar ditentukan sepihak oleh pihak money changer.

Modal Sosial Dalam Konteks Keberadaan Buruh Migran

Modal sosial tertanam didalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, norma dan praktek sosial dan dapat dipandang sebagai perekat sosial yang menyatukan antarmanusia dan institusi-institusi terdekatnya. Hal ini memungkinkan anggota komunitas dapat meraih tujuan kolektif maupun tujuan perorangan. Aset modal sosial dalam berbagai bentuk seperti pengajaran agama, kegiatan-kegiatan sosial, rukun kematian, kegiatan-kegiatan PKK sebagai media sumber informasi misalnya nampak tidak berjalan di hampir semua wilayah penelitian. Ketiadaan kegiatan-kegiatan ini telah memperkecil aset yang dapat membangun rasa kepercayaan diri dan kohesi sosial antar anggota masyarakat.

Ikatan sosial diantara anggota warga masyarakat menjadi sangat renggang, akibat tekanan ekonomi (pemenuhan kebutuhan) yang begitu menekan setiap keluarga. Tekanan ini mendorong orang cenderung berpikir untuk diri dan keluarganya. Pada umumnya orang cenderung mengalokasikan sepenuh waktunya untuk bekerja memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Seringkali meskipun telah seluruh hari dimanfaatkan untuk bekerja, namun pendapatan yang dihasilkan seringkali belum memnuhi kebutuhan dasar keluarga. Pada akhirnya setiap anggota keluarga masih tetap memanfaatkan waktu luangnya untuk tetap bekerja mencari pendapatan tambahan seperti mengupas kacang, menumbuk wijen, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hampir tidak ada waktu tersisa untuk kegiatan-kegiatan sosial. Saat-saat penting seperti kematian seorang warga, juga tidak nampak ikatan yang kuat yang mengindikasikan adanya solidaritas sosial antarwarga masyarakat. Hal tersebut nampak pada satu peristiwa kematian warga yang terjadi saat penelitian di Kalbar ini berlangsung. Dalam kesempatan tersebut hanya para sesepuh yang hadir untuk mengurus berbagai keperluan jenazah dan menghibur keluarga yang

3.1 Buruh Migran Tak Berdokumen: Sebuah Produk Kemiskinan Struktural Perdesaan

ditinggalkan. Sementara kaum mudanya cenderung tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dalam pandangan mereka, itu umumnya menjadi peran dari para orang tua. Solidaritas sosial cenderung lebih banyak muncul ketika saat pesta perkawinan, dimana setiap anggota masyarakat dengan sendirinya memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Kondisi solidaritas dan kohesi sosial yang rendah di tingkat komunitas berdampak juga pada wilayah kerja.

Sulit ditemui kohesi sosial antarburuh migran tak berdokumen di tempat kerja meskipun mereka memiliki kesamaan ; asal daerah, budaya maupun agama. Indikasi yang ada justru mengarahkan bahwa masing-masing buruh migran tak berdokumen cenderung untuk menyelamatkan nasibnya sendiri. Buruh migran harus senantiasa memikirkan nasib diri sendiri dan menjauhkan berbagai hal yang dapat mengancam kelangsungan pekerjaan dan hidupnya. Rendahnya modal sosial merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruh migran tak berdokumen semakin rentan. Tidak ada jaringan dan ikatan sosial yang dapat diandalkan buruh migran tak berdokumen dalam situasi-situasi darurat. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk diharapkan dapat terbentuk atau terbangun solidaritas sosial antar buruh migran dalam kaitan untuk memperbaiki situasi, kondisi kerja dan terpenuhinya hak-hak lain sebagai buruh.

Secara geografis, wilayah yang menjadi kantong-kantong buruh migran di Indonesia merupakan wilayah perdesaan terpencil yang jauh dari sarana dan prasarana. Wilayah ini jauh dari akses infrastruktur jalan, informasi, pendidikan, kesehatan yang menghambat komunikasi dengan dunia luar. Fasilitas yang paling berharga yang dimiliki masyarakat saat ini adalah listrik. Fasilitas ini merupakan satu-satunya media yang menghubungkan masyarakat ini dengan dunia luar melalui saluran televisi dan itupun masih sangat terbatas. Dalam situasi rendahnya dari berbagai akses, perempuan cenderung harus menanggung beban yang lebih. Nilai dan budaya patriarki seringkali cenderung memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memperoleh akses di luar wilayahnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut nampak dari pola migrasi yang terjadi pada masing-masing wilayah penelitian. Migrasi awal senantiasa dilakukan oleh laki-laki. Sementara perempuan harus tetap bertahan. Pada fase berikutnya migrasi baru melibatkan perempuan.

Mayoritas penduduk wilayah perdesaan menumpukan hidupnya pada sektor pertanian sebagai petani pemilik lahan, penggarap dan buruh tani. Pada realitanya, pendapatan dari sektor pertanian ini sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal keluarga. Pada umumnya masyarakat wilayah ini mengkombinasikan sektor pertanian dan non-pertanian (sebagai buruh kasar) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal. Berbagai situasi yang melingkari kondisi wilayah kantong-kantong buruh migran mengarahkan bahwa masyarakat ini berada pada situasi kemiskinan. Pengertian kemiskinan dalam konteks ini adalah suatu kondisi dimana orang mengalami berbagai ancaman untuk dapat hidup layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya konsumsi, kerentanan, pendidikan

yang rendah, tidak memadainya layanan kesehatan dasar, infrastruktur yang tidak dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari (air bersih, sanitasi, jalan dan perumahan yang memadai) dan kurangnya peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial bagi sesamanya. Dimensi lain yang juga ditangkap dalam penelitian ini yang menentukan dan meningkatkan kemiskinan adalah eksploitasi dan pencabutan hak asasi dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang merupakan gantungan hidup manusia. Kemiskinan yang dialami diakibatkan oleh situasi, kondisi dan relasi intitusi termasuk negara yang berada diluar kendali mereka.

Keradaan kantong-kantong buruh migran tak berdokumen mempertegas gambaran ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang lebih memprioritaskan pembangunan di perkotaan dan cenderung meninggalkan wilayah-wilayah perdesaan. Keberadaan buruh migran dan arus migrasi yang terus meningkat mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Pemerintah tidak mampu memberdayakan sektor pertanian sebagai basis pencaharian mayoritas masyarakat desa dan keterbatasan dalam menciptakan peluang kerja pada sektor alternative lainnya.

3.2 Kebijakan Pertanian Yang Tidak Berpihak

Persoalan pertanian memang persoalan pelik di Indonesia. Persoalan utama terletak pada petani yang tak pernah dapat menopangkan hidupnya dari lahan pertanian yang dimilikinya. Pekerjaan di sektor ini mendatangkan pendapatan yang paling kecil dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan dari non sektor dan sangat rentan terhadap berbagai guncangan. Ironisnya meskipun kondisi yang buruk dari sektor ini, namun sektor ini menjadi bantalan dan 'lemparan' tenaga-tenaga kerja yang 'terlempar' dari sektor-sektor yang lain. Dengan kata lain, tenaga-tenaga kerja yang tidak lagi bekerja di sektor non pertanian di perkotaan, akan masuk kembali ke sektor-sektor pertanian sebagai pilihan akhir. Produktivitasnya semakin rendah, jika membandingkan antara luas lahan yang digarap dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Lukisan nasib petani semakin memprihatinkan jika dilihat indikator upah yang dikontraskan pada kebutuhan fisik minimum. Pendapatan buruh tani perempuan hanya berkisar sekitar Rp 10.000/ hari dan Rp 14.000/hari untuk laki-laki.

Strategi petani mengusahakan komoditas unggulan dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan petani, nampaknya juga tidak didukung. Bahkan nampak pada dua wilayah tertentu (Kalbar dan Sulse) terjadi intervensi pemerintah yang justru mengakibatkan lumpuh atau bahkan matinya komoditas unggulan wilayah tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan tata niaga jeruk yang pada awalnya dirancang untuk membangun jalur distribusi dan pemasaran produk jeruk tetapi pada kenyataannya justru memonopoli dan menghancurkan harga produk di tingkat petani. Harga jual jeruk yang ditetapkan melalui kebijakan tata niaga jeruk ini sangat rendah dan sama sekali tidak dapat menutupi biaya kerja maupun biaya produksi secara keseluruhan. Kondisi ini mendorong petani untuk menghancurkan komoditas ini dengan cara menebang pohon-pohon jeruk dan membuang jeruk-jeruk yang dihasilkan sebagai pupuk. Penghancuran komoditas ini tidak saja menyebabkan musnahnya komoditas ini sebagai komoditas unggulan wilayah, tetapi juga mematikan pendapatan petani. Intervensi kebijakan pemerintah pada sektor pertanian lain ; asupan, pemerkerjaan, modal /perkreditan juga tak menyentuh wilayah-wilayah ini. Kebijakan penetapan harga dasar gabah sebagai kebijakan nasional seringkali juga tak membantu petani karena perilaku calo-calo pada rantai perdagangan beras.

3.3 Document-undocument Sebagai Sebuah Siklus

Keberadaan buruh migran tidak berdokumen pada intinya berbasis pada persepsi yang dikembangkan sekaligus konsekuensi yang harus ditanggung oleh buruh migran yang bersangkutan. Basis persepsi yang ada dalam konteks ini hanya dibatasi oleh dokumen (surat-surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang) untuk mensyahkan atau tidak mensyahkan seseorang sebagai buruh migran yang diakui atau tidak diakui. Konsekuensi dari diakui atau tidaknya seseorang sebagai buruh migran dikaitkan dengan sebuah tindakan pelanggaran atau kriminal yang jelas memiliki konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dokumen inipun secara langsung menjadi sebuah legitimasi negara untuk memperlakukan buruh migrannya, tidak saja untuk negara asal buruh migran tetapi juga negara tujuan buruh migran. Pandangan orang cenderung selalu diarahkan kepada keberadaan dokumen ketika terjadi pembahasan buruh migran. Dokumen cenderung dilihat dari satu sisi sebagai alat yang dapat digunakan untuk melindungi hak warga negara. Dokumen dari sisi lain jarang dilihat yaitu sama-sama sebagai alat tetapi bukan melindungi tetapi justru melanggar hak-hak sebagai manusia dalam konteks yang lebih luas.

Pada realitanya status berdokumen atau tak berdokumen memperlihatkan sebagai sebuah siklus. Dengan kata lain bahwa seseorang yang berdokumen tidak selamanya dalam proses menjalani kerjanya terus menjadi buruh migran berdokumen atau sebaliknya. Ada banyak faktor yang membuat buruh migran berdokumen menjadi tidak berdokumen dan sebaliknya. Kategori yang berhasil dirumuskan dari berbagai alasan yang muncul dari mantan buruh migran mengapa tak berdokumen diataranya adalah: 1) penahanan dokumen sebagai alat jaminan oleh pihak majikan, 2) Dokumen yang habis masa berlakunya karena majikan tidak memberikan kesempatan pada buruh untuk memperpanjangnya, 3) praktek penipuan dokumen yang dilakukan oleh agen, calo atau

tekong, 4) Pilihan sadar dari calon buruh migran. Hal tersebut disebabkan karena tidak memiliki informasi tentang dokumen yang dibutuhkan oleh seorang buruh migran, ketiadaan dana untuk pengurusan surat-surat resmi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat.

Sementara alasan yang dikemukakan beberapa mantan buruh migran tidak berdokumen yang selama masa kerjanya kemudian menjadi berdokumen adalah faktor majikan, tekong atau calo. Majikan, calo atau tekong menjadi salah satu pihak yang mendorong atau bahkan menguruskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan buruh migran atas biaya buruh migran yang bersangkutan. Realitas ini menunjukkan bahwa majikan, calo atau tekong dapat memainkan peranan yang membantu pihak buruh migran. Namun sistem yang memungkinkan hal tersebut tidak ada, sehingga faktor majikan, calo atau tekong yang baik hanya merupakan sebuah keberuntungan seorang buruh migran. Dengan kata lain tidak ada mekanisme kontrol dan basis legal formal –baik di negara asal maupun negara tujuan—yang mengharuskan perilaku majikan, calo atau tekong yang senantiasa menghargai hak-hak asasi manusia dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Kesadaran bahwa berdokumen atau tidak berdokumennya seorang buruh migran sebagai sebuah siklus menyadari bahwa menyerahkan keberadaan dan nasib buruh migran hanya pada keberadaan dokumen tidak akan menyelesaikan persoalan buruh migran. Dalam konteks ini sekaligus menyatakan bahwa proses deportasi sebagai sebuah kebijakan pemerintah untuk menertibkan dokumen buruh migran tidak menyelesaikan masalah buruh migran. Penyelesaian buruh migran harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas –tidak hanya sekedar dokumen—yaitu persoalan hak asasi manusia.

3.4 Kebijakan dan Pelaksanaan Deportasi

3.4.1. Pemerintah Malaysia

Deportasi merupakan kebijakan Pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk memulangkan tenaga-tenaga kerja migran yang tidak berdokumen. Kebijakan ini berbasis pada sisi kepentingan Malaysia didasarkan pada aspek: 1) kedaulatan negara, 2) penegakan hukum, 3) keamanan dan 4) kebijakan pajak. Sementara dari sisi Pemerintah Indonesia cenderung merupakan kebijakan reaktif terhadap kebijakan deportasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan pemberlakuan kebijakan deportasi dari Pemerintah Malaysia hanya mencerminkan dua pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan ekonomi. Pendekatan

dikembalikan ke Indonesia tanpa pernah bertemu dengan keluarga (khususnya suami) sebelumnya. Informanpun harus kehilangan uang RM 300, pakaian dan perhiasan yang dirampas oleh pihak Polisi Malaysia.

3.4.2. Pemerintah Indonesia

Tidak ada pandangan dan tindakan kritis dari Pemerintah Indonesia dalam memandang kebijakan deportasi, alasan-alasan yang mendasari hingga implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia cenderung bersifat responsif. Kebijakan penanganan buruh migran tak berdokumenpun cenderung parsial. Dengan kata lain persoalan buruh migran lebih diletakkan pada kelengkapan dokumen semata, tanpa melihat pada persoalan-persoalan yang bersifat lebih mendasar.

yang melihat bahwa buruh migran sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan, perlindungan dan keamanan dimanapun berada sesuai dengan Konvensi PBB tentang buruh migran cenderung diabaikan. Akibatnya proses implementasi kebijakan deportasi pun banyak yang melanggar hak asasi manusia. Bahkan kebijakan deportasi cenderung menjadi alat legitimasi pihak-pihak tertentu (termasuk aparat keamanan Malaysia) untuk melakukan tindakan kekerasan, perampasan dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lain atas nama keamanan.

Pengalaman informan kasus memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan deportasi yang dilakukan oleh pihak aparat sangat tidak manusiawi. Buruh migran tak berdokumen tidak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga saat penangkapan sampai dengan proses deportasi ke Indonesia. Termasuk dalam kondisi-kondisi khusus sekalipun seperti kondisi informan yang saat itu tengah hamil besar (9 bulan). Pihak keluarga dalam hal ini sama sekali tidak diijinkan untuk melihat kondisi informan di penjara karena tidak mampu memberikan uang jaminan sebesar RM10.000 (untuk bisa dibebaskan). Bahkan ketika informan harus melalui masa persalinan di rumah sakit dengan kondisi tangan diborgol. Informanpun

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan deportasi yaitu menetapkan 'Kebijakan Satu Atap' di 14 lokasi pada tanggal 1 Februari 2005. Kebijakan ini secara lebih khusus diperuntukkan bagi BMI yang telah memiliki visa tetapi bukan visa kerja, BMI yang memiliki visa yang telah lebih batas waktunya (*overstay*), dan bagi BMI yang memiliki kontrak kerja serta identitasnya dikenali dalam sistem *biometric*. Dalam kebijakan ini seluruh departemen atau instansi yang terkait dalam pengurusan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh calon buruh migran bekerja dalam satu atap (satu sistem). Kebijakan ini dilakukan agar pengurusan dokumen dapat dilakukan cepat, tidak berbelit dan murah. Kebijakan satu atap ini tidak hanya melibatkan instansi atau departemen Indonesia tetapi juga termasuk pihak imigrasi Malaysia. Lebih detail, instansi dan peran yang dilakukan dalam kebijakan satu atap adalah: Departemen Kehakiman dan HAM, Depnaker, Depsos, Konsorsium PJTKI program Amnesty, Depsos, PJTKI, dan Keimigrasian Malaysia. Melalui kebijakan satu atap proses pengurusan dokumen dapat lebih cepat, murah, dan terkontrol. Namun dalam pelaksanaannya, nampak masih menunjukkan beberapa kelemahan

dalam hal koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses deportasi ini, sehingga proses monitoring dan kontrol terhadap buruh migran tak berdokumen tidak sepenuhnya berjalan.

Keseluruhan proses kebijakan deportasi baik di Malaysia maupun Indonesia semakin mengentalkan gambaran berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh migran yang berbasis pada kepemilikan dokumen. Dalam konteks ini, buruh migran diposisikan sebagai pelaku tindak kriminal tanpa memilah dan melihat alasan mengapa mereka menjadi tak berdokumen. Salah satu alasan mengapa mereka tak berdokumen adalah kelemahan sistem sosialisasi informasi dari aparat pemerintah pada calon-calon buruh migran mengenai jenis dokumen yang harus dimiliki, prosedur dan lain-lain yang tidak berjalan. Persoalan penting lain dari keberadaan buruh migran adalah lemahnya tindakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat pada keberadaan buruh migran tak berdokumen. Sanksi cenderung hanya diberlakukan sepihak pada buruh migran tak berdokumen sementara tak ada sanksi bagi pihak-pihak lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi buruh migran.

3.5 Eksploitasi Vertikal dan Horizontal

Buruh migran tak berdokumen merupakan pihak yang menjadi korban dari perilaku kekerasan, eksploitasi dari berbagai pihak. Secara sederhana, eksploitasi di sini dipahami sebagai proses mengambil dan memupuk keuntungan oleh pihak tertentu atas biaya dan resiko pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Hubungan eksploitatif yang tertangkap tidak saja pada hubungan atau relasi kerja antara buruh migran tak berdokumen dengan majikan, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberangkatan, tempat kerja sampai dengan proses pemulangan

Secara garis besar, eksploitasi terhadap buruh migran terjadi secara vertikal dan horizontal. Eksploitasi vertikal dilakukan oleh majikan dalam konteks relasi kerjanya, dan pihak-pihak lain seperti calo, PJTKI, oknum-oknum lain di Malaysia. Sementara eksploitasi horizontal terjadi pada sesama buruh yaitu dari buruh migran yang berdokumen terhadap buruh migran yang tak berdokumen. Modus dan wujud eksploitasi terhadap buruh migran diantaranya yaitu :Dari pihak majikan yaitu: (1) menahan dokumen apapun yang dimiliki buruh migran, (2) mempekerjakan buruh migran tanpa batas lingkup dan waktu kerja yang jelas,(3) membayar upah di bawah standar atau tidak membayar upah, (4)mengancam melaporkan buruh migran tak berdokumen jika menuntut haknya. Dari pihak calo/mandor: (1) penipuan

terhadap buruh migran (menarik sejumlah dana kepada buruh migran untuk pengurusan surat dokumen yang ternyata tidak ada), (2) memotong upah buruh migran tanpa kesepakatan, (3) menjual calon buruh migran ke calo atau tekong lain yang akan membawanya langsung ke Malaysia dengan imbalan sejumlah uang, (4) memaksa buruh migran untuk tinggal dan makan pada pemondokan atau warung milik calo serta memotong upah tanpa kesepakatan. Sementara eksploitasi horizontal dilakukan oleh buruh berdokumen terhadap buruh tak berdokumen dengan menawarkan foto copy identitas dengan imbalan sejumlah dana tertentu.

Kecenderungan yang terus menguat bahwa perlakuan dan eksploitasi vertikal yang dilakukan majikan terhadap buruh-buruh migran tak berdokumen sebagai suatu strategi bisnis. Perekrutan buruh migran tak berdokumen dilakukan untuk menekan biaya lebih murah atau bahkan menghindarkan kewajiban seperti pajak, tunjangan kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain.

3.6 Diskriminasi dan Eksploitasi Berbasis Gender

Perempuan buruh migran tak berdokumen di samping rentan terhadap wujud eksploitasi vertikal dan horizontal juga rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi spesifik lainnya karena keperempuannya. Wujud eksploitasi yang sangat umum terjadi

baik di sektor jasa maupun manufaktur dimana perempuan buruh migran tak berdokumen terkonsentrasi di dalamnya berupa perbedaan besaran upah buruh migran laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama (khususnya untuk pekerjaan pada sektor manufaktur), diskriminasi terhadap hak reproduksi perempuan, dan rentabilitas terhadap perdagangan perempuan yang tinggi.

Perempuan buruh migran tak berdokumen pada situasi-situasi tertentu dilanggar hak-haknya sebagai perempuan. Kasus seorang buruh migran tak berdokumen Indonesia yang diperlakukan sangat tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia dan sebagai perempuan. Buruh migran tak berdokumen ini harus menjalani hukuman penjara ketika kandungannya berusia 9 bulan. Buruh migran tak berdokumen ini pada akhirnya juga harus menjalani proses persalinan di rumah sakit yang diawasi petugas penjara dengan kondisi tangan diborgol.

Perempuan buruh migran tak berdokumen karena keperempuannya lebih rawan terkena kasus *trafficking*. Dalam konteks ini perempuan buruh migran tak berdokumen tidak dipekerjakan pada sektor tertentu sesuai dengan kesepakatan atau penjelasan awal. Perempuan buruh migran tak berdokumen melalui jaringan tertentu dipekerjakan sebagai pekerja seks. Pada realitasnya perempuan buruh migran tak berdokumen mengalami diskriminasi dan eksploitasi yang berlevel dalam posisinya sebagai buruh, buruh yang tak berdokumen dan perempuan.

3.7 Modal Sosial

Modal sosial tertanam didalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, norma dan praktek sosial dan dapat dipandang sebagai perekat sosial yang menyatukan manusia dan institusi-institusi. Hal ini memungkinkan anggota komunitas untuk dapat meraih tujuan kolektif dan tujuan perorangan. Aset modal sosial ini hampir tidak dimiliki oleh komunitas miskin di wilayah asal

Buruh Migran Tak Berdokumen

SEBUAH STRATEGI PEREMPUAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN
Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan INDONESIA yang Bekerja di MALAYSIA

mereka. Ketiadaan aset modal sosial ini pada akhirnya menempatkan kelompok miskin dalam membangun rasa kepercayaan diri dan kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat. Ikatan sosial diantara anggota warga masyarakat menjadi sangat peka akibat tekanan ekonomi (pemenuhan kebutuhan) yang begitu menekan setiap keluarga. Tekanan ini mendorong orang cenderung berpikir untuk diri dan keluarganya. Hal ini berakibat sulitnya untuk juga membangun kohesi sosial antarburuh migran tak berdokumen di tempat kerja meskipun mereka memiliki kesamaan ; asal daerah, budaya maupun agama. Indikasi yang ada justru mengarahkan bahwa masing-masing buruh migran tak berdokumen cenderung berfikir untuk menyelamatkan nasibnya sendiri. Rendahnya modal sosial merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan buruh migran tak berdokumen semakin rentan. Tidak ada jaringan dan ikatan sosial yang dapat diandalkan buruh migran tak berdokumen dalam situasi-situasi darurat. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk diharapkan dapat terbentuk atau terbangun solidaritas sosial antar buruh migran dalam kaitan untuk memperbaiki situasi, kondisi kerja dan terpenuhinya hak-hak lain sebagai buruh.

Bab IV

Pengalaman Dideportasi: Tambah Himpitan dan pelanggaran HAM;

Kebijakan Ekonomi Politik Deportasi :Berpihak Pada Siapa?

SALAH satu kebijakan yang hangat dibicarakan berkaitan dengan keberadaan buruh migran tak berdokumen asal Indonesia di Malaysia adalah deportasi. Kebijakan deportasi ini bertujuan untuk menertibkan keberadaan buruh migran berbasis pada kepemilikan dokumen resmi yang harus dipenuhi seorang buruh untuk dapat bekerja di satu negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran Indonesia (KADBMI), jumlah buruh migran yang terancam mengalami deportasi dari Negara Malaysia berkisar antara 1,2 sampai dengan 1,5 juta orang dan diantaranya terdapat 700.000 sampai dengan 900.000 orang berasal dari Indonesia¹.

Terdapat dua jenis deportasi yaitu: deportasi reguler dan deportasi yang diposisikan sebagai kebijakan amnesti. Masuk dalam kategori pertama yaitu buruh migran Indonesia yang dideportasi secara reguler melalui beberapa pintu pemulangan utamanya yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang yang kemudian transit di Pelabuhan Tanjung Priuk, selanjutnya melalui jalan darat diberangkatkan menuju Surabaya menggunakan transportasi bus yang telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam realitasnya, mereka yang masuk dalam kategori ini adalah buruh migran yang ditangkap oleh polisi Malaysia melalui berbagai rasia yang dilakukan di tempat-tempat tinggal buruh migran di lokasi tempatnya bekerja seperti

di sektor konstruksi, jasa (restoran-restoran). Setelah melalui suatu proses peradilan singkat –tanpa didampingi pengacara dan rata-rata divonis 1 sampai 12 bulan penjara dan harus dikembalikan ke negara asal. Buruh migran yang masuk dalam kategori ini jumlahnya cukup besar. Hal tersebut diindikasikan dengan jumlah penghuni penjara Semenji, Kajang, Malaka, Pekan Nanas diperkirakan mencapai jumlah 100.000-150.000 orang.

Masuk dalam format kebijakan amnesti kategori kedua adalah buruh migran Indonesia yang tidak dipenjara tetapi akan terancam ditangkap dan dimasukkan penjara jika mereka masih berada di negara Malaysia sampai dengan berakhirnya masa pengampunan yang ditetapkan Pemerintah Malaysia. Jumlah buruh migran dalam kategori ini diperkirakan antara 600.000 sampai dengan 800.000 orang yang tersebar di berbagai negara bagian Malaysia.

¹ Catatan Singkat Kondisi Deportasi Buruh Migran Indonesia Tahun 2004, Koalisi Anti Deportasi Buruh Migran Indonesia (KADBMI).

Sejarah Kebijakan Deportasi

(Mbak Tati mungkin dapat mengisi ini)

Deportasi ; Dalam Perspektif Pemerintah Malaysia (data untuk bagian ini juga terbatas)

Deportasi merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Malaysia yang bertujuan untuk memulangkan tenaga-tenaga kerja migran yang tidak berdokumen. Kebijakan ini berbasis pada sisi kepentingan Malaysia didasarkan pada aspek: 1) kedaulatan negara, 2) penegakan hukum, 3) keamanan dan 4) kebijakan pajak. Sementara Pemerintah Indonesia dalam konteks kebijakan deportasi ini cenderung hanya bersifat reaktif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia tersebut.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan pemberlakuan kebijakan deportasi dari Pemerintah Malaysia menekankan pada dua pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan ekonomi. Pendekatan dalam kerangka yang melihat bahwa buruh migran sebagai manusia yang memiliki hak asasi untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan, perlindungan dan keamanan dimanapun berada sesuai dengan Deklarasi PBB tentang buruh migran cenderung diabaikan. Akibatnya proses implementasi kebijakan deportasi banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan kebijakan deportasi cenderung menjadi alat legitimasi pihak-pihak tertentu (termasuk aparat keamanan Malaysia) untuk melakukan tindakan kekerasan, perampasan, dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lain atas nama keamanan terhadap buruh migran tak berdokumen.

Kebijakan deportasi saat ini belum ditempatkan sebagai kebijakan bersama antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia sebagai negara tempat bekerja dan negara asal para buruh migran tak berdokumen. Kebijakan deportasi harus ditempatkan sebagai kepentingan kedua belah pihak dan dalam kaitan dengan perlindungan buruh migran sebagai warganegara dan dalam kerangka hak asasi manusia (harus ada penjelasan deklarasinya, dan inti deklarasinya sebagai bahan analisis).

Deportasi: Dalam Perspektif Pemerintah Indonesia

Dalam konteks kebijakan deportasi yang saat ini telah berlangsung beberapa kali, Pemerintah Indonesia masih tetap bertindak sebagai pihak yang hanya mampu merespon kebijakan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Malaysia. Dalam posisinya ini, tidak nampak sikap dan tindakan kritis dari Pemerintah Indonesia dalam memandang kebijakan deportasi, alasan-alasan yang mendasari hingga implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia cenderung bersifat responsif karena memang dituntut harus bertindak cepat. Antisipasi dari kebijakan deportasi yang telah berulang diberlakukan Pemerintah Malaysia belum mampu mendorong pemerintah untuk membangun satu sistem dan rencana advokasi yang tidak hanya memberikan pelayanan pemulangan deportan, tetapi melindungi hak-hak buruh migran sebagai warganegara dan sebagai manusia. Kebijakan penanganan buruh migran tak berdokumen yang dideportasi masih cenderung parsial. Dengan kata lain persoalan penyelesaian kasus buruh migran tak berdokumen hanya diletakkan pada basis kelengkapan dokumen semata, tanpa melihat pada persoalan-persoalan yang bersifat lebih mendasar yaitu dalam kaitan dengan perlindungan hak warga negara dan hak asasi manusia.

Dalam kaitan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen untuk para buruh migran yang dideportasi, pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2005 menetapkan 'Kebijakan Satu Atap' di 14 lokasi pada tanggal. Kebijakan ini secara lebih khusus diperuntukkan bagi BMI yang telah memiliki visa tetapi bukan visa kerja, BMI yang memiliki visa

yang telah lebih batas waktunya (*overstay*), dan bagi BMI yang memiliki kontrak kerja. Dalam kebijakan ini seluruh departemen atau instansi yang terkait dalam pengurusan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh calon buruh migran bekerja dalam satu atap (satu sistem). Kebijakan ini dilakukan agar pengurusan dokumen dapat dilakukan cepat, tidak berbelit dan murah. Kebijakan satu atap ini tidak hanya melibatkan instansi atau departemen Indonesia tetapi juga termasuk pihak imigrasi Malaysia. Lebih detail, instansi dan peran yang dilakukan dalam kebijakan satu atap adalah: Departemen Kehakiman dan HAM, Depnaker, Depsos, Konsorsium PJTKI program, Depsos, PJTKI, dan Keimigrasian Malaysia. Melalui kebijakan satu atap diharapkan proses pengurusan dokumen dapat lebih cepat, murah, dan terkontrol

Namun dalam pelaksanaan kebijakan deportasi ini nampak masih menunjukkan beberapa kelemahan dalam hal koordinasi antarpihak yang terlibat dalam proses deportasi ini, sehingga proses monitoring dan kontrol terhadap buruh migran tak berdokumen tidak berjalan. Beberapa kelemahan yang tergal saat penelitian ini dilakukan diantaranya adalah: 1) Lemahnya data tentang jumlah buruh migran yang dideportasi per satuan waktu tertentu (identitas buruh migran, wilayah asal, teknis pemulangan, dll). Kelemahan dalam hal data membuka peluang praktek trafficking di titik-titik pemulangan menjadi sangat terbuka dan tanpa kontrol. 2) Lemahnya sosialisasi terhadap tahapan-tahapan proses deportasi. Buruh migran tak berdokumen pada umumnya tidak mengetahui informasi mengenai tahapan apa yang akan dilaluinya dalam proses deportasi ini. Kelemahan ini membuka peluang terjadinya penipuan, pemerasan aktor-aktor tertentu terhadap buruh migran tak berdokumen berkaitan dengan fasilitas yang diberikan secara gratis, dll. 3) Lemahnya kontrol terhadap proses deportasi ini memungkinkan banyak tindakan kekerasan dari pihak-pihak tertentu kepada buruh migran tanpa ada sanksi. 4) kebijakan ini diskriminatif terhadap buruh migran yang tak berdokumen (tidak memiliki dokumen sama sekali). Kebijakan

ini tidak mengantisipasi pada arus migrasi buruh migran tak berdokumen yang terus ada berlangsung dan pemerintah pada dasarnya tidak menyelesaikan persoalan buruh migran sekalipun hanya pada persoalan administrasi.

Keseluruhan proses kebijakan deportasi baik di Malaysia maupun Indonesia semakin mengentalkan gambaran berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh-buruh migran yang berbasis pada kepemilikan dokumen. Dalam konteks ini, buruh migran diposisikan sebagai pelaku tindak kriminal tanpa memilah dan melihat alasan mengapa mereka menjadi tak berdokumen. Salah satu alasan mengapa mereka tak berdokumen adalah kelemahan sistem sosialisasi informasi dari aparat pemerintah pada calon-calon buruh migran mengenai jenis dokumen yang harus dimiliki, prosedur dan lain-lain yang tidak berjalan.

Persoalan penting lain dari keberadaan buruh migran adalah lemahnya tindakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat pada keberadaan buruh migran tak berdokumen. Sanksi cenderung hanya diberlakukan sepihak pada BMI dan tidak pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam keberadaan buruh migran tak berdokumen. Pihak pemerintahpun (khususnya keimigrasian) tidak peka dalam penempatan kantor-kantor keimigrasian sesuai dengan pemilahan wilayah untuk mempermudah akses BMI terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen.

Berbagai kelemahan dalam sistem pemulangan buruh-buruh migran tak berdokumen menunjukkan kurangnya kesiapan Pemerintah Indonesia membangun satu bentuk perlindungan terhadap buruh migran secara lebih komprehensif. Persoalan buruh migran tak berdokumen tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan dokumen atau persoalan administratif semata. Persoalan ini lebih menyangkut persoalan kebijakan pembangunan Indonesia yang sampai dengan saat ini masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan Jawa, persoalan penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Jika persoalan tersebut tidak dipandang dari perspektif tersebut maka persoalan buruh migran tak berdokumen akan mengasilkan situasi klimaks yang dapat berdampak pada konflik tingkat negara maupun internal Indonesia.

Penanganan masalah buruh migran tak berdokumen secara parsial juga akan membuka kesempatan

dan penanganan masalah TKI Kewenangan ini dijalankan pihak PJTKI dengan mengembangkan pendekatan yang cenderung hanya bersifat ekonomi, yaitu pengiriman sebanyak-banyaknya TKI tanpa dibarengi dengan pembangunan sistem perlindungan hak asasi para TKI. Pendekatan ini mendorong pada munculnya fenomena 'penjualan manusia' yang di dalamnya diwarnai dengan berbagai tindakan tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia. PJTKI dalam teknis kerjanya mensyaratkan prosedur dan biaya tertentu yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh calon-calon buruh migran.

pada pelaku-pelaku tertentu untuk memanfaatkan moment deportasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Dalam sebuah catatan singkatnya KADBMI menemukan indikasi bahwa Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial cenderung membuat kebijakan komersialisasi pemulangan buruh migran yang dideportasi dari Malaysia dengan membuat MOU dengan pihak PT. Indosima Mahkota Indah (PJTKI) sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memulangkan buruh migran tak berdokumen secara reguler yang berasal dari penjara-penjara di Malaysia. Dalam data IMI telah tercatat sekitar 30.000 buruh yang dipulangkan pada periode Januari-November 2004 dengan total nilai proyek sebesar 4 milyar. Nilai proyek tersebut mencakup pembiayaan transportasi, logistik, pelayanan medis bagi buruh migran yang dideportasi. Indikasi komersialisasi ini bisa saja terjadi karena kebijakan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tersebut yang tidak bersifat transparan. Akibatnya sosialisasi dari kebijakan tersebut juga tidak sepenuhnya optimal. Dalam konteks kebijakan ini, tidak ada transparansi dari alokasi, distribusi dan penggunaan dana dari proyek tersebut.

Alur dan Manajemen Migrasi

Dalam hal manajemen migrasi, pada dasarnya negara telah memberikan kewenangan kepada PJTKI untuk mengelola pengiriman, pemulangan

Dalam situasi demikian, calo dan tekong dalam konteks buruh migran tak berdokumen pada beberapa hal telah menjalankan fungsi yang tidak dapat dimainkan oleh PJTKI. Calo dan tekong dalam banyak posisi telah membantu calon-calon buruh migran sampai ke negara tujuan. Meskipun memang tidak dapat diabaikan bahwa tidak sedikit calo atau tekong yang juga mengeksploitasi calon-calon buruh migran. Namun masyarakat satu komunitas dengan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai buruh migran pada akhirnya mengembangkan mekanisme sendiri untuk menilai calo atau tekong yang baik. Masyarakat memiliki kriteria tertentu untuk menilai bahwa calo atau tekong tertentu baik dan tidak baik. Masyarakat juga sekaligus mengembangkan kontrol terhadap praktek-praktek yang dimainkan oleh para calo atau tekong tersebut.

Yang dibutuhkan dalam menanggapi fenomena keberadaan calo atau tekong dalam konteks buruh migran tak berdokumen idealnya bukan pada penghapusan keberadaan calo atau tekong tersebut. Calo atau tekong pada banyak konteks buruh migran tak berdokumen, tidak saja memberikan bantuan pada proses pemberangkatan calon buruh migran, tetapi menjalankan fungsi sebagai mediator dalam memberikan informasi terhadap kondisi buruh migran kepada keluarganya dan juga menyampaikan kiriman kepada keluarga dengan imbalan dalam jumlah yang wajar.

Kebijakan Deportasi Pada Tataran Implementasi

Pengalaman informan kasus memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan deportasi yang dilakukan oleh pihak aparat sangat tidak manusiawi. Buruh migran tak berdokumen tidak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga saat penangkapan sampai dengan proses deportasi ke Indonesia. Termasuk dalam kondisi-kondisi khusus seklaipun seperti kondisi informan yang saat itu tengah hamil besar (9 bulan). Pihak keluarga dalam hal ini sama sekali tidak diijinkan untuk melihat kondisi informan di penjara karena tidak mampu memberikan uang jaminan sebesar 10.000RM (untuk bisa dibebaskan). Bahkan ketika informan harus melalui masa persalinan di penjara dengan kondisi tangan diborgol. Informan dikembalikan ke Indonesia tanpa pernah bertemu dengan keluarga (khususnya suami) sebelumnya. Informanpun harus kehilangan uang 300RM dan perhiasan yang dirampas oleh pihak Polisi Malaysia (Apakah akan ditambah dengan paparan kasus-kasus lain atau terbatas pada pengalaman informan yang dijadikan kasus penelitian?)

Bab V.

Analisa Kebijakan dan Peraturan yang Tersedia;

Ekonomi-Politik Buruh Migran Tak Berdokumen: Kemiskinan Struktural Di Pedesaan

Strategi Pembangunan: Memakmurkan Kota, Meminggirkan Desa

Logika dan strategi pembangunan Indonesia sejak 1967 hingga sekarang sepenuhnya mengadopsi gagasan-gagasan modernisasi yang dipromosikan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada dasarnya, modernisasi melihat akar persoalan pembangunan yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara-negara miskin bekas jajahan Barat, terletak pada situasi dan kondisi internal negara-negara tersebut, yang meliputi ketiadaan modal, lemahnya aspek-aspek kelembagaan, dan buruknya sumber daya manusia (keterampilan, mentalitas, dan budaya) (Faqih, 2002: 52-70; Hettne, 1995: Bab 6; Clements, 1997: Bab 1 dan II). Dengan cara pandang seperti itu, maka jalan ke luar yang dapat dilakukan adalah dengan cara penguatan modal, penataan kelembagaan, dan pembenahan sumber daya manusia. Secara teknis, hal itu dilakukan melalui bantuan luar negeri (finansial, teknis, dan asistensi) dan investasi asing. Hal tersebut harus dilakukan menurut tahapan-tahapan tertentu yang bergerak secara linier, seperti yang dikonsepsikan secara baik oleh Rostow. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan diukur berdasarkan indikator-indikator kuantitatif yang ketat. Yang paling dikenal adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Logika dan strategi inilah yang diyakini berhasil membawa Barat mencapai tingkat kemajuan seperti saat ini.

Logika dan strategi pembangunan seperti di ataslah yang dipraktekkan secara konsisten di Indonesia pada masa Soeharto hingga saat ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan (Mas' oed, 1989: Bab III). *Pertama*, membangun kembali jaringan dengan negara-negara kapitalis (Barat) dan berbagai lembaga internasional (IMF, World Bank, Asia Development Bank) sebagai sumber modal bagi pembangunan Indonesia. *Kedua*, membuka akses bagi masuknya modal asing melalui pemberlakuan UU Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). *Ketiga*, menyusun semacam panduan umum dan cetak biru pembangunan Indonesia baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek, sebagaimana tertuang dalam Trilogi Pembangunan (stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan), GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dengan langkah-langkah di atas, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan Indonesia bergerak secara positif menurut indikator-indikator modernisasi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, turunnya inflasi, terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, dan sebagainya. Hingga sebelum Soeharto jatuh, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5-8 persen, inflasi di bawah dua

digit, dan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 30 juta dari jumlah total penduduk Indonesia.

Kemiskinan Struktural di Pedesaan

Namun, jalan kapitalisme yang ditempuh Indonesia sarat pula dengan berbagai persoalan yang berpuncak pada krisis ekonomi pada tahun 1998 yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Pemerintahan Soeharto. Persoalan-persoalan tersebut antara lain, *pertama*, pembangunan tersebut sebagian besar dibiayai oleh hutang luar negeri sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghutang terbesar di dunia. Karenanya, sebagian besar pendapatan Indonesia habis digunakan untuk membayar hutang beserta bunganya. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang secara teoritik akan menghasilkan 'efek mengucur ke bawah' ternyata tidak terjadi. Pertumbuhan tersebut cenderung hanya dinikmati oleh elit ekonomi-politik. Hal ini sekaligus mencerminkan tingginya kesenjangan ekonomi antara elit ekonomi-politik yang jumlahnya sedikit dengan mayoritas penduduk Indonesia *Ketiga*, merajalelanya korupsi baik terhadap bantuan luar negeri maupun berbagai kekayaan yang dimiliki negara. Ahli ekonomi senior Djojohadikusumo menduga bahwa tingkat korupsi tersebut sekitar 30%.

Dengan uraian di atas, maka yang diuntungkan dalam pembangunan Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto, bahkan mungkin hingga saat ini, adalah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, negara-negara kapitalis dan lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan dan hutang kepada Indonesia, serta elit ekonomi dan politik nasional. Berbagai kebijakan negara dalam rangka industrialisasi, seperti subsidi, pemotongan pajak, proteksi, dan sebagainya, lebih banyak dinikmati oleh mereka.

Di sisi lain, proses pembangunan dan industrialisasi yang terjadi di Indonesia —yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir elit lokal—, ternyata tetap dapat berjalan karena digerakkan oleh kondisi buruh sektor formal dengan upah buruh yang rendah, jam kerja yang panjang, pembungkaman serikat buruh oleh negara, dan pembatasan berbagai hak normatif lainnya. Kondisi lebih parah dialami oleh buruh perempuan. Selain mengalami berbagai pembatasan seperti yang dialami buruh laki-laki, buruh perempuan juga mengalami berbagai penindasan yang terkait dengan statusnya sebagai buruh perempuan, seperti upah yang lebih rendah daripada upah buruh laki-laki, rendahnya jaminan pada masa haid dan hamil, dan sebagainya. Sehingga kondisinya menjadi sangat ironis bahwa industrialisasi yang telah digerakkan

kaum buruh, justru menempatkan mereka pada posisi marjinal karena terkekang secara politik dan miskin secara ekonomi.

Proses industrialisasi yang berjalanpun tidak hanya didukung oleh buruh sektor formal tetapi juga didukung oleh kontribusi petani dan sektor pertanian. Hampir separuh (44,96%) dari tenaga kerja nasional bermata pencaharian sebagai petani (lihat Tabel 1)¹.

Dalam bidang ekonomi, petani adalah produsen sekaligus konsumen yang penting dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Sebagai produsen, mereka merupakan penyedia konsumsi masyarakat yaitu dalam berbagai bentuk kebutuhan masyarakat, seperti beras, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Mereka juga konsumen untuk berbagai produk, baik yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, misalnya alat-alat pertanian, bibit tanaman, obat-obatan, pupuk, maupun yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti pakaian, makanan olahan, bahan-bakar, barang-barang elektronik, dan sebagainya.

Namun demikian, peran petani yang signifikan di atas tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan, peran sosial maupun politik mereka. Secara umum, dalam ketiga hal tersebut petani berada dalam posisi yang marjinal. Rata-rata petani

di Indonesia adalah keluarga miskin. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003 yang dilakukan Biro Pusat Statistik, jumlah petani gurem di Indonesia meningkat dari 52,7% pada tahun 1993 menjadi 56,5% pada tahun 2003². Hal ini mengindikasikan proses pemiskinan petani akibat proses pembangunan yang dijalankan semakin meningkat. Nilai tukar petani pada Maret 2004 memang mengalami peningkatan 127,88 menjadi 142,43. Namun hal ini belum tentu menggambarkan realitas yang sesungguhnya³. Dengan kata lain bahwa jumlah yang riil dari kelompok petani miskin dapat lebih besar dari data yang tersedia. Kampung-kampung petani di berbagai wilayah di Indonesia secara kasat mata memperlihatkan kemiskinan mereka. Dengan kondisi di atas, desa hanya menjadi ajang bagi kekuatan eksternal, yang dalam gerakannya sangat sulit ditemukan bukti adanya dukungan yang nyata bagi perbaikan kehidupan rakyat.

TABEL 1
Jumlah Petani Tahun 1992-1998 dan Persentase terhadap Jumlah Tenaga Kerja Nasional

Tahun	Jumlah Petani (orang)	Persentase Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Nasional (%)
1992	41 160 615	53.68
1993	39 057 278	49.31
1994	36 851 780	44.92
1995	36 008 095	42.98
1996	35 164 410	41.03
1997	34 555 660	39.70
1998	39 474 765	44.96

1 Data dikutip dari Amelia Nani Siregar, "Perencanaan dan Aktivasi Sumber Daya Manusia di Sektor Pertanian", Makalah yang diambil dari www.google.com.
 2 Pikiran Rakyat, 2/1/2003.
 3 Kompas, 2/6/2004.

Perempuan Buruh Migran Tak Berdokumen: Korban Kebijakan Peminggiran Sektor Pertanian

Telah banyak studi yang mengkaji kaitan antara peranan perempuan dalam proses pembangunan yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari peran perempuan dalam revolusi hijau yang terjadi, dimana kebijakan revolusi hijau telah signifikan memberikan kontribusi pada tercapainya swasembada pangan di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut ternyata harus diikuti oleh pengorbanan kaum perempuan perdesaan, khususnya bagi mereka yang miskin yang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Kaum perempuan miskin terpaksa tidak dapat lagi mengikuti peristiwa panen di desa mereka secara bebas karena para pemilik sawah membatasi jumlah perempuan miskin yang diizinkan ikut panen di sawah mereka. Ketika terjadi perubahan teknologi panen dari ani-ani ke teknologi sabit maka sekali lagi kelompok perempuan miskin di perdesaan terpaksa menyingkir dan tempatnya digantikan oleh buruh tani laki-laki. Demikian pula ketika terjadi perubahan teknologi dalam proses seing pada dan teknologitumbuh padi ke teknologi huller juga telah menggantikan posisi dan menggeser perempuan. Dampaknya jelas bagi kehidupan perempuan miskin yang menggantungkan diri pada perolehan 'bawon' untuk menopang kehidupan mereka⁴. Perempuan seringkali harus kehilangan kegiatan dan wewenang tradisionalnya, serta menemukan dirinya terbuang dalam tugas-tugas produktivitas rendah yang tak dimodernisasi, dengan penghasilan-penghasilan rendah yang menggiringnya. Intervensi-intervensi pemerintah mungkin tanpa sengaja telah membuat berat sebelah peluang-peluang baru lebih untuk laki-laki (Griens; 1992, 14). Tetapi yang jelas bahwa perubahan-perubahan itu mengakibatkan para perempuan kelompok miskin harus menggantungkan food security keluarga mereka pada pasar bebas. Kelompok petani didorong terus memberikan kontribusi dan subsidi pada proses pembangunan yang berjalan. Petani dituntut untuk tetap menghasilkan produktivitas pertanian yang tinggi, sementara input produksi berupa bibit, dan obat-obatan melambung tinggi tidak terkendali. Kondisi tersebut diperparah dengan perilaku-perilaku 'pengambil keuntungan' yang 'bermain' dalam penentuan harga gabah di pasaran. Panen raya tidak lagi dapat diposisikan

4 Lihat: Soetrisno Loekman, Kemiskinan, Perempuan, Pemberayaan, Kanisius, 1997. Griens Mies, dkk, Gender, Marginalisasi dan Industri Perdesaan, Project Research Report Series No: RB-6, PSP-IPB, ISS, PPLH-ITB, Hardjono Joan; Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Perdesaan Jawa Barat, 1987, Gajah Mada University Press.

Bab VI

Kesimpulan dan Rekomendasi.

sebagai situasi yang menguntungkan bagi petani. Karena seringkali pada saat-saat panen raya tersebut petani menanggung kerugian yang besar akibat jatuhnya harga gabah. Mereka senantiasa ada dalam situasi harus menjual gabahnya segera karena tuntutan untuk menutup pinjaman biaya produksi sampai dengan panen. Pilihan yang tersisa untuk para petani adalah terus mengusahakan lahannya dengan kondisi yang terus merugi atau membiarkan lahannya dan bekerja pada sektor-sektor jasa marjinal lainnya.

Dalam kondisi demikian, peluang-peluang pekerjaan bagi perempuan di perdesaan pun pada akhirnya cukup langka, sehingga seringkali terjadi apa yang disebut Hardjono sebagai situasi 'terpaksa bermalas-malasan (*enforced idleness*)' (Hardjono; 1985, Niewhof; 1988). Pilihan satu-satunya yang tersedia bagi perempuan adalah menjual tenaganya dan keluar dari perdesaan. Kondisi kemiskinan yang membelit memposisikan karakteristik perempuan dengan ciri tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya akses pada informasi, rendahnya akses pada produk dan prosedur hukum, dan melempar mereka pada posisi sebagai tenaga kerja 'rendahan'. Peluang yang nampaknya memberikan harapan lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan merubah taraf kesejahteraan keluarga adalah dengan menjual tenaganya sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara termasuk Malaysia.

Kesimpulan

Migrasi tak Berdokumen adalah Strategi Perempuan mempertahankan Hidup Dari Himpitan Kemiskinan Berbagai gambaran situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan buruh migran dari wilayah dimana mereka berasal, proses pemberangkatan, situasi dan kondisi kerja, kebijakan pemulangan dan kembalinya buruh migran tak berdokumen ke komunitas asal memperlihatkan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perilaku-perilaku tidak manusiawi pada satu sisi. Pada sisi lain berbagai upaya juga dilakukan oleh buruh migran tak berdokumen dalam menyiasati berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan banyak pihak terhadap mereka. Berbagai bentuk strategi yang dilakukan buruh-buruh migran tak berdokumen bersifat individual, sesaat dan sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak ada strategi yang mengarah pada strategi yang bersifat kolektif, strategis, terarah dan jangka panjang akibat dari posisinya sebagai buruh migran tak berdokumen. Namun dari berbagai wujud strategi yang dilakukan buruh migran tak berdokumen mencerminkan wujud strategi buruh-buruh migran tak berdokumen untuk hanya bertahan hidup dan terlepas dari kemiskinan yang bersifat sesaat.

Strategi bertahan hidup dilakukan buruh migran tak berdokumen sejak pemberangkatan, di lingkungan kerja sampai dengan tahap pemulangan.

Tahap pemberangkatan

Pada tahapan ini, strategi yang dilakukan buruh migran bertujuan untuk menghindari diri dari berbagai pemeriksaan pihak kepolisian -- Indonesia maupun Malaysia— sehingga sampai tempat tujuan dengan selamat. Beberapa hal yang berusaha dihindarkan diantaranya adalah berbagai jeratan calo terutama di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia — Malaysia. Untuk itu, buruh migran tak berdokumen tidak boleh lepas dari rombongannya. Jika hendak ke kamar kecil maka perempuan buruh migran tak berdokumen harus didampingi teman laki-laki dari rombongan yang sama. Begitu juga selama dalam perjalanan termasuk waktu istirahat, buruh migran tak berdokumen dilarang keras oleh calo untuk keluar dari kendaraan yang membawanya ke Malaysia.

Tahap kerja

Beberapa strategi yang dilakukan buruh migran untuk memperjuangkan haknya atau sekedar untuk memiliki sedikit waktu untuk beristirahat adalah :

1. Meskipun dengan rasa 'takut', mereka mencoba untuk menanyakan bahkan menagih upah mereka. Pada beberapa kasus, bahkan terjalin solidaritas buruh migran tak berdokumen untuk melakukan mogok kerja sampai upah mereka diberikan. Pada kasus lain ketika solidaritas terjadi, pihak majikan akan mengancam, mereka melaporkan keberadaan buruh migran sebagai buruh-buruh tidak berdokumen.
2. Pada beberapa kesempatan buruh-buruh migran juga sempat mempertanyakan ruang lingkup pekerjaannya (karena dirasakan bahwa pekerjaan terlalu berat dan jam kerja yang digunakan pun terlalu panjang. Respon yang muncul dari pihak majikan adalah marah dan juga balik mengancam akan melaporkan keberadaan buruh migran kepada Polis Malaysia.
3. Jika kondisi kerja terlalu buruk dan buruh migran sudah merasa tidak tahan terhadap kondisi kerja tersebut, maka strategi yang lain adalah melaporkan kondisi tersebut kepada agen untuk mendapatkan majikan baru. Namun hal tersebut jarang sekali berhasil. Apalagi jika pihak majikan sudah merasa cocok dengan buruh migran yang telah bekerja padanya.

4. Strategi terakhir yang dilakukan adalah melarikan diri ke hutan atau jika mengetahui akan melarikan diri ke Konsulat.
5. Jika sikap majikan yang tidak manusiawi dan buruh migran tidak lagi bisa mengendalikannya maka beberapa buruh migran menggunakan 'ilmu hitam' untuk bisa mengendalikan majikan. Buruh migran mencampur darah bulannya ke dalam makanan dan minuman yang disajikan ke majikan. Cara-cara tersebut dianggap berhasil karena mampu mengendalikan majikan sehingga menjadi lebih sayang dan manusiawi dalam memperlakukan buruh migran.
6. Buruh migran beralasan tangannya sakit, terkilir, dll sehingga tidak dapat bekerja. Dengan cara tersebut maka majikan memperbolehkannya beristirahat 1 hari.
7. Untuk buruh kilang, strategi yang biasa dilakukan untuk sekedar mendapat sedikit waktu beristirahat adalah dengan berpura-pura sakit kemudian dapat beristirahat seharian di klinik. Hal tersebut biasanya dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pergantian shift yang mengharuskan buruh-buruh migran masuk malam untuk jangka waktu tertentu (biasanya 10 hari untuk satu kali shift)
8. Menikah dengan warga Malaysia atau buruh yang memiliki IC sebagai buruh tetap dan diakui. Hal ini merupakan salah satu strategi yang juga dilakukan perempuan buruh migran

tidak berdokumen. Dengan menikah mereka dapat memiliki peluang untuk menjadi warga Malaysia di samping upaya untuk meningkatkan status sosial ekonomi.

Tahap pemulihan.

Pada tahap ini para buruh migran harus berupaya untuk melepaskan diri dari praktek-praktek calo maupun Polis yang akan mengambil uang hasil kerja mereka. Untuk mengamankan uang hasil kerja mereka maka berbagai strategi pun dilakukan seperti:

1. Menyimpan uang ke dalam lipatan softex (pembalut wanita) dan memakai pembalut tersebut.
2. Menggulung uang-uang ringgit mereka kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam tempat bedak.
3. Mengirimkan uang hasil kerja mereka kepada agen, meskipun harus mengeluarkan uang jasa untuk agen. Namun cara tersebut lebih aman dibandingkan dengan membawa uang sendiri.
4. Untuk menghindarkan diri dari calo *money changer* yang mematok harga tukar lebih mahal, biasanya buruh migran telah menyiapkan sedikit uang yang akan ditukarkan. Dengan cara tersebut maka buruh migran tidak akan selalu dikejar-kejar oleh para calo ini.

5. REKOMENDASI

5.1. Rekomendasi Untuk Komisi HAM PBB dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migrant

- 5.1.1 to urge all sending and receiving countries to uphold the principles of the recently adopted UN Convention on the Rights of Migrants and Members of Their Families, which sets the standards for the equal treatment and protection of all migrant workers regardless of their lack of formal papers;
- 5.1.2 to cease all plans to implement abusive crackdowns on undocumented workers, and continue identifying, exposing, and challenging exploitative and discriminatory policies and laws which affect undocumented women migrant workers, victims of trafficking, and domestic workers;
- 5.1.3 to encourage the UN to convene an inter-governmental dialogue between origin and destination countries around the world to develop appropriate and more comprehensive international convention protection for women undocumented migrant workers, including women victims of trafficking and domestic workers;
- 5.1.4 to develop new bilateral or multilateral agreements which would protect undocumented migrant workers, including female migrant domestic workers, from abuse based on internationally accepted norms and principles of human rights;
- 5.1.5 to build up consultation meeting with migrant organizations and NGOs to develop a standard and effective documentation, reporting and monitoring mechanism on women undocumented migrant workers, including, women victims of trafficking and domestic workers.

5.2. Rekomendasi Untuk Pemerintah Indonesia

- 5.2.1. to enact national laws that will provide legal protection of undocumented women migrant workers, women victims of trafficking, and domestic workers, and to take all necessary steps to ensure the protection and promotion of workers' rights.
- 5.2.2. Penanganan masalah kemiskinan struktural di dalam negeri termasuk penanganan masalah pertanian berbasis pada kepentingan masyarakat desa dan keadilan sosial merupakan kunci utama untuk mengurangi proses migrasi buruh tanpa dokumen.
- 5.2.3. Pendekatan hukum untuk menata proses migrasi buruh tak berdokumen harus bersamaan dengan proses penegakan hukum secara menyeluruh sebagai bagian dari penataan pemerintahan

yang baik: termasuk adanya kepastian hukum untuk semua hal dan semua pihak, adanya efisiensi pelayanan aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat, adanya penyediaan informasi yang memadai, transparan, dan proses akuntabilitas publik.

- 5.2.4. Buruh migran yang tak berdokumen harus ditangani dengan cara-cara yang komprehensif dengan mengutamakan martabat kemanusiaan, memperhatikan hal-hal yang positif dan negatif dari faktor-faktor penyebab, keberlangsungan, dan dampak yang mungkin terjadi baik di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan bukan hanya posisi buruh migran tetapi juga peran majikan yang mempekerjakan buruh ilegal, peran bisnis, dan peran negara.
- 5.2.5. Proses pemulangan buruh migran tak berdokumen harus mewujudkan cara-cara yang aman dan berperikemanusiaan. Pemerintah harus bertanggung jawab sebagai implementasi dari kewajiban negara menerima warganegaranya kembali.
- 5.2.6. Membenahi proses migrasi secara keseluruhan. Dimana hal ini dengan mengoptimalkan peran seluruh unsur yang terkait dengan proses migrasi, baik dari Pemerintah, Swasta, NGO, Organisasi Buruh Mi-

gran, Mantan Buruh Migran, dan Keluarga Buruh Migran.

- 5.2.7. Perlu membangun kerjasama yang luas dalam proses penanganan di lapangan termasuk membuka dan memperlancar saluran-saluran dialog untuk memahami permasalahan dan perkembangannya secara lebih utuh dari berbagai sisi. Kerjasama ini harus berada dalam lingkup kerjasama regional dan international yang berkelanjutan termasuk mekanisme konsultasi regional untuk memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir dalam migrasi.
- 5.2.8. Meningkatkan kesadaran di berbagai level untuk mencegah proses penyelundupan dan perdagangan manusia dengan memanfaatkan keterdesakan rakyat miskin.
- 5.2.9. to develop new bilateral or multilateral agreements which would protect undocumented migrant workers, including female migrant domestic workers, from abuse based on internationally accepted norms and principles of human rights.

5.3. Rekomendasi Untuk Pemerintah Malaysia

- 5.3.1. to implement their rights of sovereignty and law enforcement without denying human dignity to non-citizens. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM dimana setiap negara wajib menyediakan perlindungan dan bantuan kepada setiap manusia warga negara maupun non warga negaranya;
- 5.3.2. to provide adequate opportunity for undocumented migrant workers to obtain the necessary papers for employment and access decent work;
- 5.3.3. to ensure that all undocumented workers, including women victims of trafficking, have the opportunity to pursue grievances before labor offices and courts in order to seek full redress for violations of their rights;

- 5.3.4. Migrasi tanpa dokumen dan berdokumen tidak terpisahkan satu dari lainnya. Penanganan hukum untuk Migrasi tanpa dokumen harus disertai dengan jaminan perlakuan manusiawi, termasuk adanya pelayanan kesehatan dan pelayanan masalah kemanusiaan lainnya;
- 5.3.5. to ensure the safe return of those migrant workers wanting to return to their countries of origin, including fulfillment of the specific needs of women migrants;
- 5.3.6. to develop new bilateral or multilateral agreements which would protect undocumented migrant workers, including female migrant domestic workers, from abuse based on internationally accepted norms and principles of human rights.
- 5.3.7. Sebagai upaya memenuhi perlindungan buruh migran perlu untuk meratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Lampiran Metodologi

PENELITIAN ini dilakukan di 5 wilayah, yaitu Desa Burno-Jawa Timur, Desa Mak Tangguk-Kalimantan Barat, Desa Kawerang-Bone, Sulawesi Selatan, dan Desa Batunyala-Nusa Tenggara Barat. Secara umum, wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari kantong-kantong buruh migran (legal dan ilegal). Sayangnya, data kuantitatif yang dapat dijadikan dukungan untuk pemilihan wilayah ini secara akurat sulit diperoleh. Namun, berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian beberapa lembaga, seperti LIPI, Word Bank, dan kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh jaringan Komnas Perempuan, memperlihatkan bahwa lokasi-lokasi ini cukup strategis untuk dijadikan wilayah penelitian. Sedangkan alasan-alasan spesifik pendukung pemilihan wilayah ini adalah : 1) posisi geografis. Wilayah Kalimantan Barat dan Lombok berada di wilayah berdekatan/berbatasan dengan Malaysia. Kedekatan wilayah ini memungkinkan terjadinya migrasi penduduk Indonesia ke Malaysia. Hal ini bukan saja terjadi baru-baru (atau tahun-tahun belakangan ini), tetapi sudah terjadi sejak dulu. Pola migrasi mereka sudah terjadi sejak nenek moyang mereka. Kondisi migrasi saat ini hanya merupakan lanjutan dari 'tradisi' atau kebiasaan yang sudah dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya. 2) relasi sosial-ekonomi. Ini terjadi pada wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah ini—khususnya Bugis—telah memiliki hubungan sosial ekonomi dengan penduduk di kesultanan Johor

dan Serawak. Kondisi inipun tidak hanya terjadi pada waktu-waktu belakangan ini tetapi sudah menjadi cerita dari nenek-nenek moyang mereka sebelumnya. 3) proses industrialisasi ekonomi internal Malaysia. Wilayah yang berkaitan dengan ini adalah wilayah Jawa Timur. Proses industrialisasi di Malaysia membutuhkan tenaga-tenaga kerja—yang dari sisi jumlah maupun kualifikasi—tidak dapat dipenuhi oleh internal Malaysia. Kondisi ini mendorong migrasi penduduk Jawa Timur untuk bekerja di Malaysia. Kondisi ini memang disadari bukan sesuatu yang sudah lama terjadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut merupakan fenomena yang relatif baru. Yang menarik apakah dengan latar belakang perbedaan di atas memiliki perbedaan atau persamaan pada situasi-situasi internal (secara ekonomi, sosio kultural) untuk seseorang menjadi tenaga migran tak berdokumen ke Malaysia.

Yang Dibutuhkan, Yang Diperlakukan Sewenang-wenang

Persoalan internal-eksternal di atas berdampak pada perlakuan buruk yang diterima buruh migran tak berdokumen, baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia, aparat pemerintah, agen penyalur tenaga kerja, hingga majikan tempat mereka bekerja. Bentuk-bentuk perlakuan buruk tersebut antara lain pemerasan, penipuan, pemalsuan dokumen, pelecehan seksual (khusus

untuk perempuan), upah yang tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan tidak dibayarkan sama-sekali, hingga berbagai bentuk tindak kekerasan. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut dialami TKI dari 'hulu' hingga 'hilir'; mulai dari proses rekrutmen, pengurusan dokumen, penampungan, saat memasuki perbatasan RI-Malaysia, selama bekerja di Malaysia, hingga pulang kembali ke kampung halaman masing-masing.

Perlakuan buruk yang sering dialami TKI tak berdokumen di Indonesia adalah penipuan dan pemalsuan dokumen oleh calo yang menjadi kepanjangan agen penyalur tenaga kerja pada saat rekrutmen, pemerasan oleh aparat pemerintah pada saat pengurusan dokumen, pelecehan seksual dan berbagai tindak kekerasan di tempat penampungan, pelanggaran kontrak dan penipuan yang dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja, pemerasan di perbatasan RI-Malaysia, hingga pemerasan dan penipuan pada saat pulang kampung. Menurut Jacob Nuwa Wea, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) pada masa pemerintahan Megawati, berbagai pihak yang terkait dengan proses rekrutmen, pemberangkatan hingga pemulangan kembali TKI, melakukan pemerasan terhadap TKI (Kompas, 21/2/2002).

Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Sebagai pembanding dan pelengkap untuk kepentingan analisis, hasil penelitian ini juga akan dibandingkan dengan berbagai hasil penelitian yang temanya kurang lebih sama.

Subyek penelitian ini terdiri atas lima orang mantan buruh migran tak berdokumen yang berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan yang sedang transit di Jakarta. Lima perempuan mantan buruh migran tak berdokumen juga dipilih berdasarkan variasi sektor dimana mereka pernah bekerja sebelumnya. Dengan variasi sektor diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lengkap di masing-masing sektor dan memungkinkan mendapatkan gambaran perbandingan kondisi perempuan buruh migran tak berdokumen antarsektor. Pemilihan 5 (lima) kasus perempuan buruh migran tak berdokumen inipun dipilih untuk mendapat gambaran yang mendalam mengenai kondisi mereka dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. *Pertama*, penelitian dokumentasi. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal tentang kondisi buruh migran tak berdokumen di tingkat nasional maupun di wilayah-wilayah yang dipilih.

Kedua, tahap orientasi. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum tentang situasi dan kondisi buruh migran tak berdokumen dari lembaga-lembaga pendamping (lembaga-lembaga yang selama ini melakukan pendampingan terhadap buruh migran tak berdokumen di wilayah-wilayah terpilih) maupun beberapa sumber yang relevan dengan fokus penelitian ini. Berdasarkan gambaran informasi tersebut dipilih 5 kasus buruh migran. Pemilihan kasus tersebut sejak awal tidak dimaksudkan untuk simplifikasi dan generalisasi persoalan buruh migran. Namun, hal itu merupakan kecenderungan kasus yang terbanyak di wilayah-wilayah yang dipilih.

Ketiga, mengadakan eksplorasi pengumpulan data yang dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian; dan melakukan penelitian terfokus, yakni mengembangkan hasil eksplorasi kepada fokus penelitian melalui wawancara mendalam. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam terhadap kasus dilakukan wawancara mendalam dan FGD yang juga melibatkan subyek-subyek lain, seperti anggota keluarga inti, anggota komunitas, pejabat tingkat desa/kabupaten/propinsi/nasional, dan aktifis pendamping buruh migran

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan teknik sirkuler dengan prosedur tiga langkah pendekatan yaitu (1) *indepth-interview*, (2) *participant observation*, dan (3) penelitian dokumentasi. Ketiga langkah pendekatan ini dilakukan secara *cyclical*).